



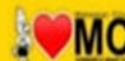
RENCANA STRATEGIS 2014 – 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR



DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

JL. URIP SUMOHARJO NO.8, MAKASSAR | TELP./FAX : 0411.450758
WEBSITE : WWW.DPU.MAKASSAR.GO.ID | E-MAIL : DPU@MAKASSAR.GO.ID



CALL CENTER & PENGADUAN

POSKO LANTON LAMPU JALAN : 0411.449340 I05M : 0823313123901
DRAINASE : 0811.4440470 I05M : 0812414936811
JALAN RUSAK : 0411.450758 I05M : 0813493292411
SEDOT TINJA : 0411.438721 I05M : 085106829777

KATA PENGANTAR.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar 2014 –2019, yang disebut juga sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini merupakan kali yang kedua pemerintah menyiapkan Renstra dalam periode pembangunan jangka panjang 2005-2025. Renstra pertama dibuat pada 2009–2014, sedangkan yang kedua adalah 2014–2019. Kerangka isi Renstra merupakan kerangka isi standar dan perbedaan mendasar antara Renstra pertama dengan Renstra sekarang adalah pada kebijakan pemerintah, dimana Renstra sekarang pada pokoknya sebagai kelanjutan dari program jangka menengah dan bagian dari program jangka panjang pemerintah. Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum yang disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014–2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2017 pada tanggal 4 Oktober 2017. Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar 2014–2019 merupakan bagian dari Renstra Pekerjaan Umum Propinsi. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2014 –2019. Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis dan Rincian untuk mencapainya. Sasaran utama yang ingin dicapainya antara lain yaitu persentase terbangunnya dan terpeliharanya jalan dan jembatan yang memadai, terbangunnya dan terpeliharanya sistem drainase kota makassar, berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan, tersedianya sarana dan prasarana air bersih,

tersedianya pengadaan lampu jalan, tersedianya akses layanan air limbah air sistem setempat (on site system) maupun sistem terpusat (off site system) untuk limbah domestik. Dengan diselesaikannya Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, maka acuan penyelenggaraan infrastruktur selama 5 tahun kedepan sudah tersedia sehingga Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar diharapkan dapat dicapai dan dapat mengakomodasi tuntutan Infrastruktur sampai akhir tahun 2019. Demikian juga sasaran dan target penyelenggaraan infrastruktur yang ditetapkan telah yang tidak hanya berorientasi pada input-output saja, tetapi berorientasi pula pada manfaat dan/atau outcome yang diperoleh. Sebagai dokumen perencanaan, Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar harus menjadi acuan dalam penyusunan program masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar setiap tahun mulai tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 sampai dengan tahun 2019. Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Saya mengharapkan agar jajaran Dinas Pekerjaan Umum dapat secara konsekuen melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan sehingga segala upaya penyelenggaraan infrastruktur, sebagaimana tertuang pada revisi Renstra ini, dapat dicapai guna memenuhi amanat RPJMD sekaligus dapat meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur kepada masyarakat.

Makassar, Oktober 2017
Dinas Pekerjaan Umum
Kota Makassar

Ir. M. Ansar, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19630517 199203 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar-----	i
Daftar Isi -----	ii
Daftar Tabel -----	ii
Bab 1 Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang -----	1
1.2 Landasan Hukum-----	6
1.3 Maksud dan Tujuan-----	9
1.4 Sistematika Penulisan-----	10
Bab 2 Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum-----	12
2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum-----	16
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum -----	22
2.4 Tantangan dan Peluang Dinas Pekerjaan Umum-----	49
Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum-----	58
3.2 Telaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih -----	63
3.3 Telaan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Propinsi-----	68
3.4 Telaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)-----	78
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis -----	90
Bab 4 Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan	
4.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar-----	95
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum-----	100
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum -----	105
Bab 5 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif -----	112
Bab 6 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD -----	160
Bab 7 Penutup-----	166

DAFTAR Gambar dan Tabel

Struktur Organisasi	-----	15
Gambar 2.2.1	Gambaran Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Mulai Thn 2012 s/d 2014-----	16
Tabel 2.2.2	Gambaran Keadaan PNS di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Berdasarkan Jenjang Pendidikan-----	18
Tabel 2.2.3	Gambaran Keadaan Pegawai Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Berdasarkan Jenjang Pendidikan -----	19
Tabel 2.2.4	Gambaran Keadaan Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin-----	20
Tabel 2.2.5	Rekapitulasi Daftar Perlengkapan/Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar-----	21
Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar-----	23
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar-----	25
Tabel 2.4	Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra Kementerian PU -----	50
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Renstra K/L-----	59
Tabel 3.2	Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)-----	62
Gambar III.1	Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih-----	65
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah-----	66
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum kota Makassar Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta faktor penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya-----	77
Tabel 3.5	Hasil Telaahan Struktur Ruang wilayah Kota Makassar-----	79

Tabel 3.6	Hasil Telaahan Pola Ruang wilayah Kota Makassar-----	81
Tabel 3.7	Hasil Analisis Dokumen KLHS Kota Makassar-----	88
Tabel 3.8	Skor Kriteria Penentu Isu-Isu Strategis-----	92
Tabel 3.9	Nilai Skala Kriteria-----	93
Tabel 4.0	Rata-rata SkorIsu-Isu Strategis-----	93
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum-----	96
Tabel 4.2	Perumusan Visi-----	97
Tabel 4.3	Penyusunan Penjelasan Visi-----	97
Tabel 4.4	Perumusan Misi-----	99
Tabel 4.5	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar-----	101
Tabel 4.6	Penentuan Alternatif Strategi-----	107
Tabel 4.7	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan-----	108
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas PekerjaanUmum Kota Makassar-----	123
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD-----	163

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang rentang waktu berlakunya yakni 5 (lima) tahun. Dokumen perencanaan tersebut disusun sebagai satu kesatuan dari dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang juga berlaku 5 (lima) tahun. Dengan kata lain bahwa Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar merupakan dokumen perencanaan yang lebih spesifik sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Pekerjaan Umum.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, aspek-aspek penting yang menjadi rujukan atau pertimbangan antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar yang memuat visi, misi, kebijakan dan pokok-pokok program Pemerintah Kota Makassar serta Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah yang kemudian secara lebih rinci diuraikan dalam uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja yang tergabung pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Hal ini dimaksudkan agar dapat tercipta sinkronisasi antara tujuan yang ingin dicapai sebagaimana tertuang di dalam RPJMD dengan ruang lingkup Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

Melalui Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014-2019, diharapkan mampu untuk meningkatkan dan atau mempertahankan kinerja organisasi dalam rangka menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta faktor-faktor berpengaruh lainnya, sehingga target dan sasaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat tercapai dengan indikator yang memadai.

Sebagai SKPD yang bertanggungjawab dalam pembangunan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sejauh ini telah berusaha untuk ikut berperan dalam upaya antisipasi berbagai permasalahan kota, utamanya melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan.

Visi Kota Makassar 2025 adalah **“Makassar Sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa Yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat”**. Visi Propinsi Sulawesi Selatan 2018 adalah **Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan Pada Tahun 2018**. Terhadap Visi Kota Makassar 2005-2025, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang menjadi arahan RPJPD untuk RPJMD periode 2014-2019. Terhadap Visi Propinsi Sulawesi Selatan 2018, perhatian difokuskan pada Prioritas Kebijakan Yang Relevan dengan isu strategis Kota Makassar. Terhadap visi kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019, perhatian difokuskan pada infrastruktur yang handal. Handal berarti tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong-royong* guna mencapai

masyarakat yang lebih sejahtera.

Berdasarkan analisis terhadap Permasalahan Pembangunan dan isu strategis daerah kota Makassar dengan Memperhatikan sepenuhnya Visi kepala daerah terpilih, maka visi pemerintah kota makassar 2014-2019; **“Makassar Kota Dunia Yang Nyaman Untuk Semua”**

Visi Pemerintah Kota Makassar 2019 ini memiliki konsistensi dengan visi kota makassar 2025, khususnya dengan penekanan visi RPJPD pada “orientasi global”, yang dalam visi RPJMD dirumuskan sebagai “kota dunia”, serta penekanan ”berwawasan lingkungan” dan “paling Bersahabat” pada visi RPJPD yang pada visi RPJMD dirumuskan sebagai “yang nyaman untuk semua”. Pokok visi “kota maritim, niaga, pendidikan, budaya dan jasa” pada visi RPJPD dalam visi RPJMD 2013-2018 ditempatkan sebagai bagian dari substansi “Kota Dunia”. Dihubungkan dengan visi pemerintah provinsi sulawesi selatan 2018, relevansi visi pemerintah kota makassar 2014-2019 terletak pada posisi “makassar kota dunia yang nyaman untuk semua” yang merupakan bagian penting dari terwujudnya “sulawesi selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional dan simpul jejaring akselerasi kesejahteraan pada tahun 2018”.

Pernyataan visi Pemerintah Kota Makassar 2019 Memiliki tiga pokok visi yang merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai kota makassar pada akhir periode 2014-2019. Penjelasan masing-masing pokok visi tersebut, adalah sebagai berikut.

Kota Dunia, dimaksudkan adalah kota makassar yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif dan inklusifitas yang berdaya tarik tinggi atau memukau dalam banyak hal. Diantaranya potensi sumberdaya alam dan infrastruktur alam dan infrastruktur sosial ekonomi yang menjanjikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat

dengan standar dunia. Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai terwujudnya “masyarakat sejahtera standar dunia”.

Nyaman, dimaksudkan adalah terwujudnya proses pembangunan yang semakin menyempitkan kesenjangan dan melahirkan kemandirian secara stabil, dalam struktur dan pola ruang kota yang menjamin kenyamanan bagi berkembangnya masyarakat yang mengedepankan prinsip inklusifitas serta pola hubungan yang setara antara stakeholder dan stakeowner dalam pembangunan. Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai terwujudnya “kota nyaman kelas dunia”.

Untuk Semua, dimaksudkan adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan yang dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial dan kemampuan diri (termasuk kelompok ditabel). Pokok visi ini dapat diristalkan sebagai terwujudnya pelayanan “pelayanan publik kelas dunia bebas korupsi” upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Setiap misi akan dijalankan untuk mewujudkan visi yang relevan. Rumusan misi RPJMD kota Makassar 2014-2019 adalah sebagai berikut:

(1) Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia.

Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal: (1) pengurangan pengangguran, (2) pemberian jaminan social keluarga dan disabilitas, (3) pelayanan kesehatan gratis, (4) pelayanan pendidikan gratis, (5) penukaran sampah dengan beras, (6) pelatihan keterampilan dan pemberian dana bergulir, mikota. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “masyarakat sejahtera standar dunia”.

(2) Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman berkelas dunia.

Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal: (1) penyelesaian masalah banjir, (2) pembentukan badan pengendali pembangunan kota, (3) pembangunan waterfront city, (4) penataan transportasi publik, (5) pengembangan infrastruktur kota, (6) pengembangan pinggiran kota, (7) pengembangan taman tematik, (8) penataan lorong. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “kota nyaman kelas dunia”.

(3) Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayan publik kelas dunia bebas korupsi.

Misi ini mencakup upaya umum dalam hal: (1) peningkatan pendapatan daerah, (2) peningkatan etos dan kinerja aparat RW/RT, (3) peningkatan pelayan kelurahan, (4) pelayan publik langsung kerumah, (5) pengembangan pelayan publik terpadu dikecamatan, (6) modernisasi pelayan pajak dan distribusi, (7) pengembangan akses internet pada ruang publik, (8) penguatan badan usaha milik daerah. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “ pelayan publik kelas dunia bebas korupsi”.

Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, daftar masalah tersebut pada garis besarnya mencakup; semakin meningkatnya tuntutan kuantitas bersahabat dan dan kualitas pelayanan administrasi pemerintah kota, kebutuhan masyarakat Kota Makassar yang berkembang dan cukup dinamis, keterbatasan sumber-sumber pendapatan untuk pembiayaan kegiatan Unit Kerja, masih terbatasnya kapasitas aparatur pemerintah serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan kegiatan, rendahnya disiplin aparatur dan masih adanya kesulitan dalam

mengoptimalkan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan yang melibatkan seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Agar harapan, kebutuhan serta tujuan yang ingin dicapai dapat direalisasi secara optimal, maka Rencana Strategis ini menjadi instrument yang bisa mengarahkan seluruh sumberdaya Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar secara sistematis dalam bentuk penyiapan kerangka kebijakan, program dan daftar kegiatan sebagai pedoman setiap unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan perda Nomor 26 tahun 2009 selanjutnya dikembangkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar. Terbitnya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, berimplikasi terhadap terjadinya perubahan rpjmd kota Makassar tahun 2014-2019, kewenangan, tugas pokok dan fungsi dinas pekerjaan umum. Untuk menyesuaikan sasaran, tujuan, program dan kegiatan dinas pekerjaan umum kota Makassar dengan kebijakan yang tertera dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 maka disusun revisi renstra dinas pekerjaan umum kota Makassar tahun 2014-2019.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dengan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
 5. Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan kemudian diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 nomor 4);

14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999/54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004/104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004/132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dimaksudkan untuk menjabarkan kebijakan pembangunan daerah dibidang ke Pu-an yang terdapat pada revisi RPJMD 2014-2019, sebagai salah satu sektor pendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah kota Makassar agar dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan renja tahunan yang berorientasi pada program dan kegiatan.

Tujuan disusunnya Revisi RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar 2014-2019 adalah: (1) Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara utuh dan menyeluruh; (2) Memberikan pedoman dalam menetapkan kebijakan operasional bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan urusannya dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis; (3) Memberi masukan bagi masyarakat dalam menyusun daftar usulan pembangunan melalui forum Musrenbang.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

- 3.2 Telaahan visi, misi dan program Walikota dan Wakil walikota Makassar
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Serta Renstra Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penentuan isu-isu strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
- 4.2 Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar,
- 4.3 Strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam lima tahun mendatang.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM

KOTA MAKASSAR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pekerjaan umum, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, sarana dan prasarana lingkungan, termasuk trotoar, drainase dan sungai di Kota Makassar. Sedangkan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yaitu :

1. Penyusunan rencana rumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan termasuk trotoar, drainase dan ketenagalistrikan;
2. Melaksanakan evaluasi pengawasan dan penyusunan laporan penyajian data dan informasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan;
3. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;

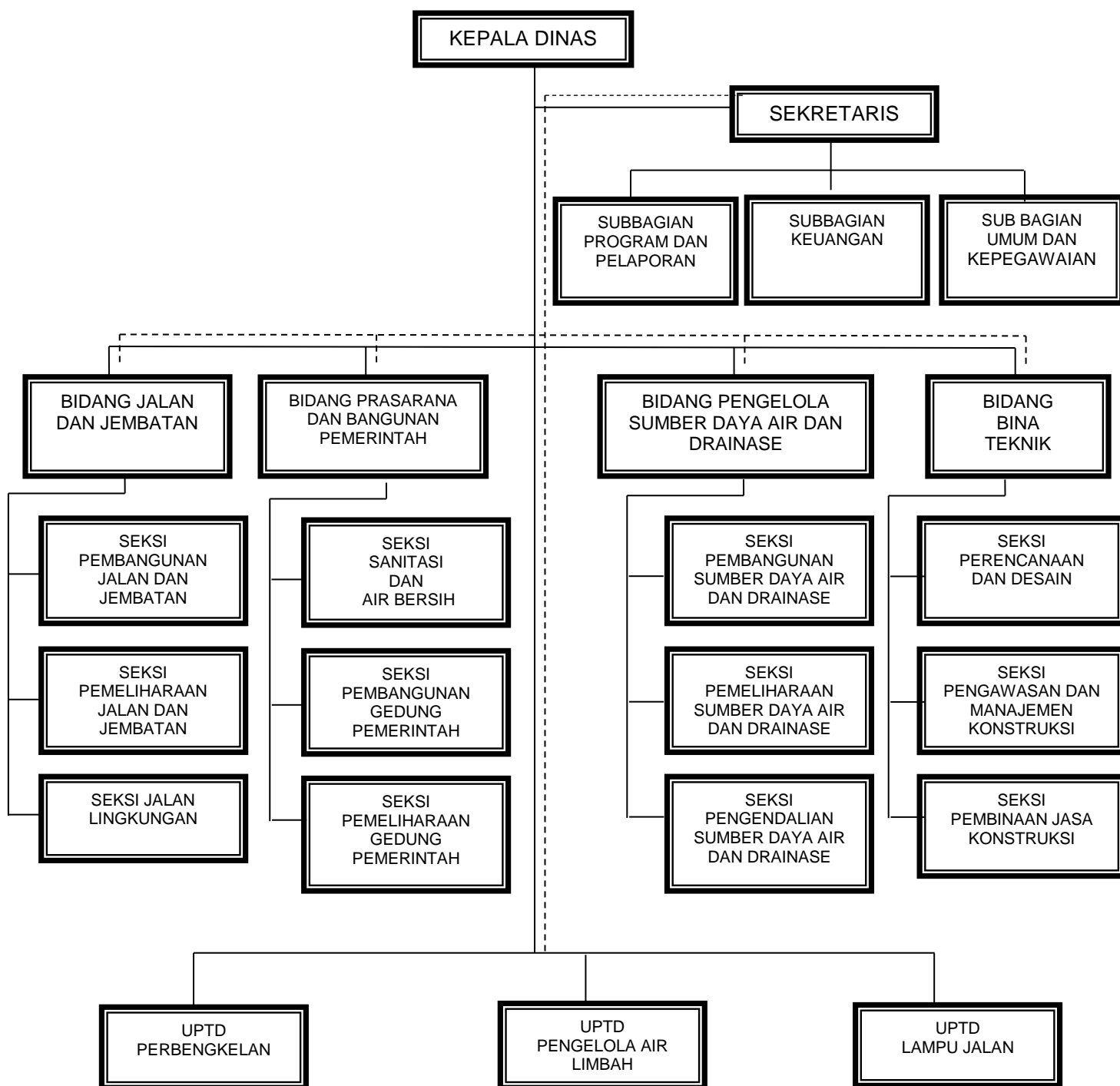
5. Pembinaan unit pelaksana teknis.

Struktur Kelembagaan Pemerintah Kota Makassar mengalami perubahan yang cukup penting dalam bentuk reorganisasi dan strukturisasi dibanding keadaan sebelumnya.

Hal ini dapat dilihat dengan adanya penggabungan program pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintah yang awalnya berada di dinas perumahan yang kemudian masuk dalam program di dinas pekerjaan umum. Hal ini dipandang penting mengingat pembangunan gedung pemerintah dan rehabilitasinya merupakan prasyarat untuk memperoleh gedung layak dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. Dengan demikian struktur kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai berikut :

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (3) Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - c. Seksi Jalan Lingkungan
- (4) Bidang Prasarana dan Bangunan Pemerintah, terdiri atas :
 - a. Seksi Sanitasi dan Air Bersih
 - b. Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah

- c. Seksi Pemeliharaan Gedung Pemerintah
- (5) Bidang Pengelola Sumber Daya Air dan Drainase, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air dan Drainase
 - b. Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Drainase
 - c. Seksi Pengendalian Sumber Daya Air dan Drainase
- (6) Bidang Bina Teknik, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Design
 - b. Seksi Pengawasan dan Manajemen Konstruksi
 - c. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi
- (7) UPTD, terdiri atas :
 - a. UPTD Perbengkelan
 - b. UPTD Pengelola Air Limbah (PAL)
 - c. UPTD Lampu Jalan



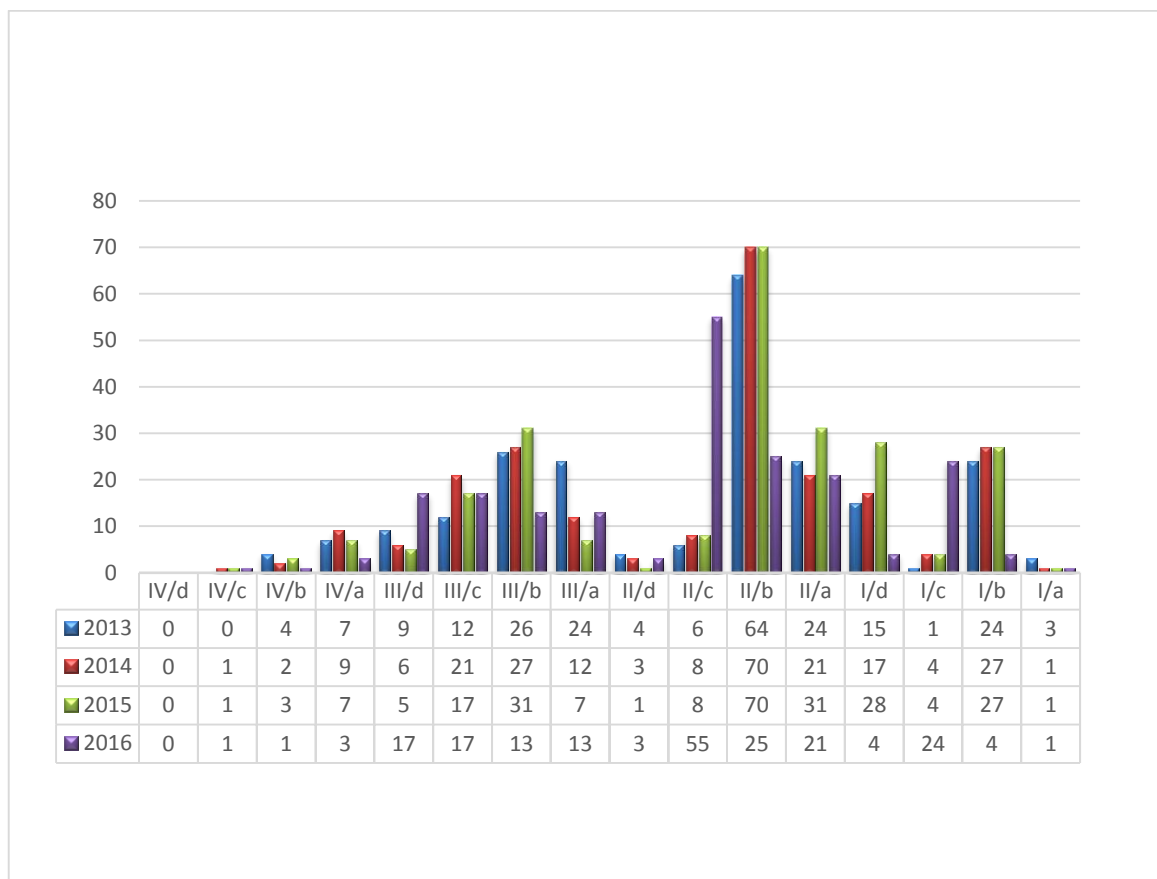
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan pada struktur organisasi di atas, potensi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar saat ini, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Gambaran Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Mulai Thn 2013 s/d 2014

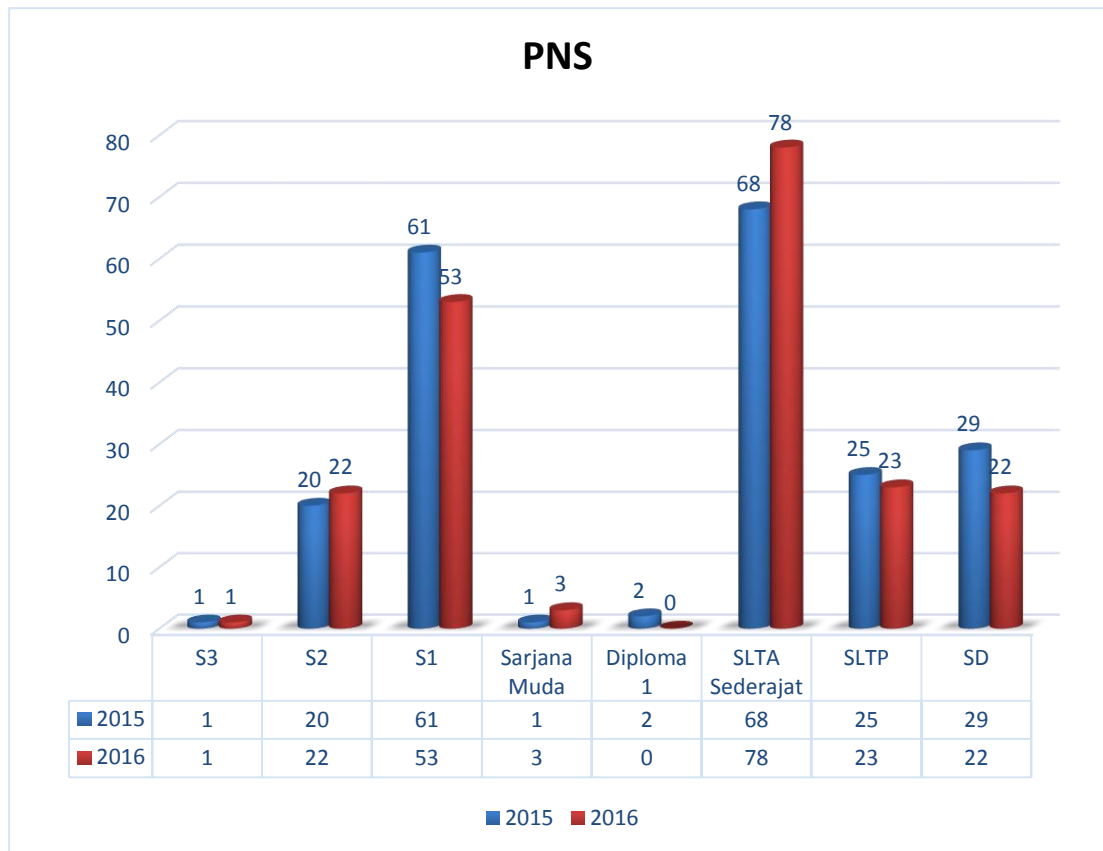


Sumber :Bagian Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, 2016

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari 202 orang Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Jumlah terbanyak adalah golongan II/c yakni 55 orang atau 27,2 % kemudian golongan II/b yakni 25 orang atau 12,3 %, golongan II/c yakni 24 orang atau 11,9 %, golongan II/a yakni 21 orang, golongan III/d sebanyak 17 orang, golongan III/c yakni 17 orang, golongan III/a dan III/b masing-masing berjumlah 13orang kemudian golongan I/b dan I/d masing-masing berjumlah 4 orang, golongan II/d dan IV/a masing-masing berjumlah 3 orang, dan golongan I/a, IV/b, IV/c masing-masing berjumlah 1 orang. Dibandingkan di tahun 2015 data kepegawaian di Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar berjumlah 208 Pegawai,disebabkan adanya mutasi, ke beberapa SKPD, Kecamatan dan Kelurahan yang berada di kota Makassar dan meninggal dunia 1 (satu) orang, maka jumlah pegawai berkurang sebanyak 5 orang. Data tersebut masih diluar data tenaga Non PNS yang berjumlah 268 orang sehingga total keseluruhan pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dan tenaga Honorer/Tenaga Non PNS berjumlah 470 orang.

Untuk susunan pegawai berdasar jenjang pendidikan dan status kepegawaian, dapat dilihat pada diagram berikut ini :

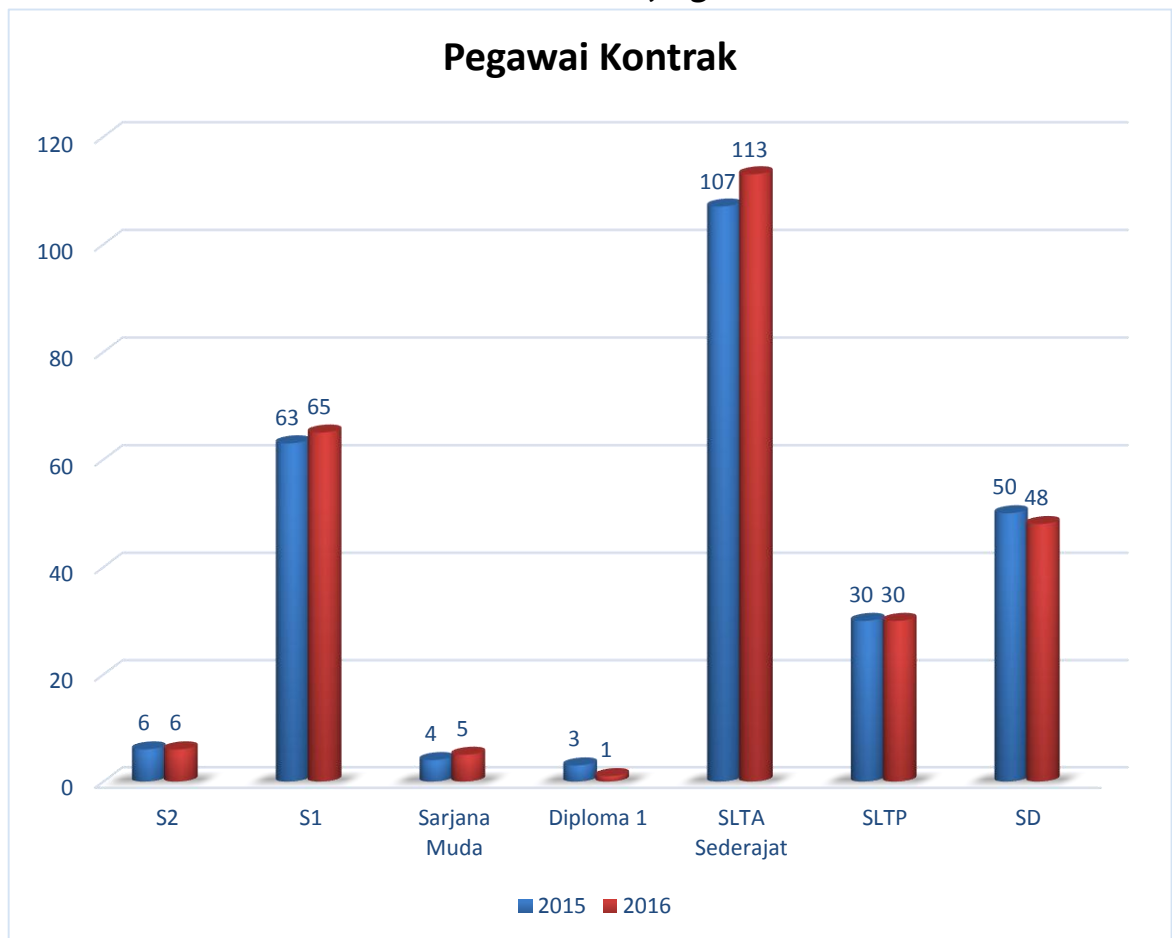
**Gambaran Keadaan PNS di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
Kota Makassar Berdasarkan Jenjang Pendidikan**



Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, 2016

Data pada diagram diatas menunjukkan bahwa dari 202 orang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, jumlah terbanyak adalah pegawai dengan pendidikan SLTA, yakni 78 orang atau 38,6 %, selanjutnya jenjang pendidikan S.1, yakni 53 orang atau 26,2 % , jenjang pendidikan SLTP, yakni 23 orang atau 11,4 % kemudian jenjang pendidikan S.2 dan SD masing – masing berjumlah 22 orang.

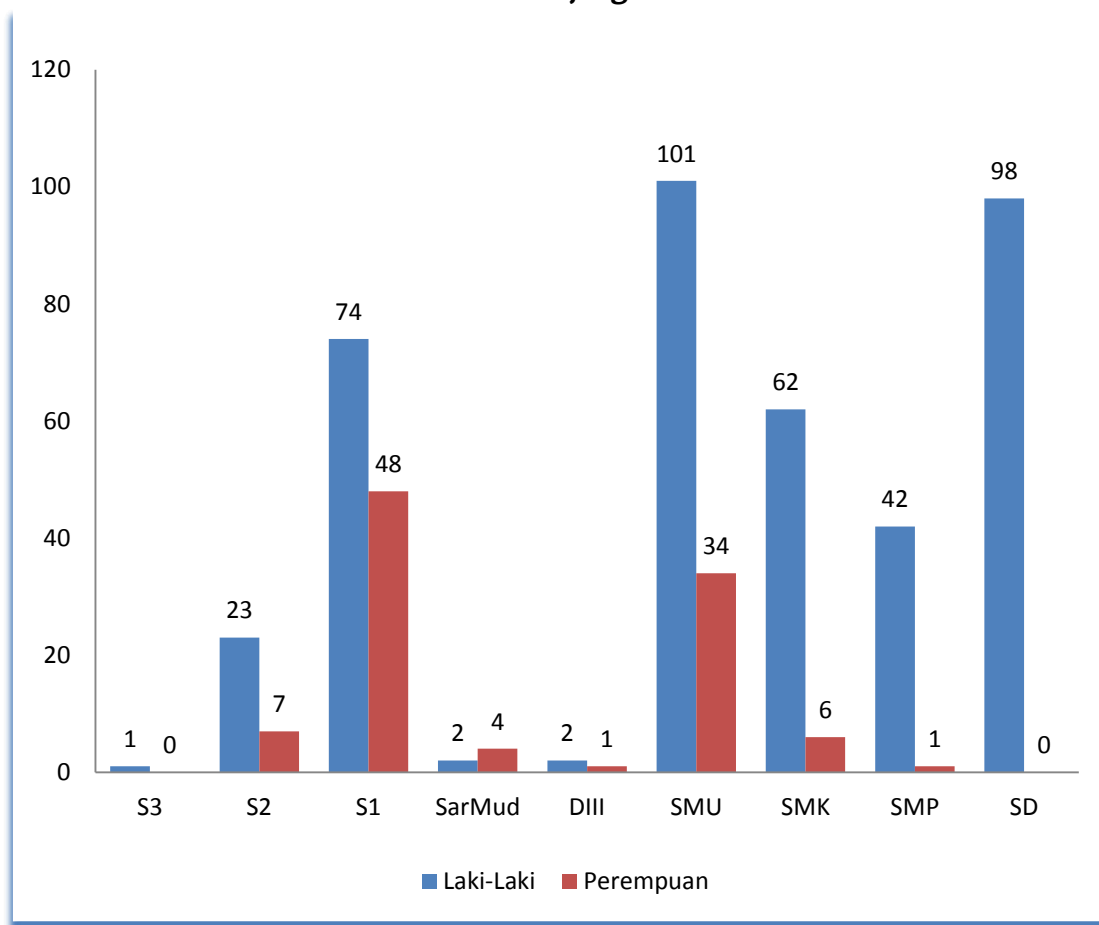
Gambaran Keadaan Pegawai Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, 2016

Pada diagram diatas menunjukkan bahwa dari 268 orang Pegawai kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, jumlah terbanyak adalah yang berpendidikan SLTA sederajat sebanyak 113 orang atau 42,2 %, kemudian dengan tingkat pendidikan S.1 berjumlah 65 orang atau 24,3 % dan jenjang pendidikan SD berjumlah 48 orang atau 17,9 %.

Gambaran Keadaan Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin



Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, 2016

Data diatas menunjukkan bahwa pegawai Laki-laki pada Dinas Pekerjaan Umum berjumlah 365 orang atau sebesar 77,7 % dan pegawai Perempuan berjumlah 105 orang atau sebesar 22,3 % yang tersebar pada Sekretariat dan Bidang – bidang dan UPTD.

2.2.2 Perlengkapan

Secara garis besar, perlengkapan/barang yang ada dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar terdiri atas 6(enam) bagian besar, yakni tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi barang bercorak kesenian/kebudayaan serta konstruksi dalam pengerjaan.

Mengenai jumlah dan nilai dari perlengkapan dan barang tersebut, dapat dilihat dibawah ini :

**Rekapitulasi Daftar Perlengkapan/Barang di Lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum Kota Makassar.**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI	KET
1.	Tanah	25	20.350.719.099.465	
2.	Peralatan dan Mesin			
	Alat-alat besar	39	55.847.121.676	
	Alat-alat angkut	56	18.428.361.000	
	Alat-alat bengkel & alat ukur	261	9.955.715.100	
	Alat-alat kantor & rumah tangga	320	7.603.200.304	
	Alat-alat studio & komunikasi	99	624.270.000	
	Alat-alat laboratorium	-	208.720.000	
	Alat-alat keamanan	1	7.960.000	
3.	Gedung dan Bangunan			
	Bangunan Gedung	85	77.862.467.359	
	Bangunan Monumen	25	936.323.919	
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	Jalan dan Jembatan	5.025	4.349.285.129.186	
	Bangunan Air Irigasi	294	194.277.229.172	
	Instalasi	57	27.327.409.308	
	Jaringan	-	29.389.639.060	
5.	Aset Tetap Lainnya			
	Barang bercorak kesenian/kebudayaan	2	302.682.824	
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	13	38.466.654.864	
	TOTAL	6.302	25.161.241.983.237	

Sumber : *Bagian Perlengkapan Dinas Pekerjaan Umum, 2016*

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 6 (enam) jenis Aset yang ada dan dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, nilai terbesar terletak pada nilai Tanah yaitu sebesar Rp.20.350.719.099.465,- menyusul Jalan, Irigasi dan Jaringan yakni Rp.4.600.279.406.726,- , kemudian Peralatan dan Mesin Rp. 92.675.348.080,-

selanjutnya Gedung dan Bangunan sebesar Rp.78.798.791.278,- disusul Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp.38.466.654.864,-. Dan terakhir Aset tetap lainnya Sebesar Rp.302.682.824,- .

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

Kinerja pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Berdasarkan permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang perencanaan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum hanya berada pada urusan wajib yaitu melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang meliputi kegiatan infrastruktur kota diantaranya pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan/rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan drainase, pemeliharaan/rehabilitasi drainase, pembangunan jalan lingkungan, pemeliharaan/rehabilitasi jalan lingkungan, inspeksi jalan dan drainase, pembangunan rumah pompa, pengendalian banjir, pengadaan lampu jalan, operasional dan rehabilitasi lampu jalan dan taman, serta pemeliharaan sarana penyedotan tinja. Ada beberapa rasio capaian yang tidak tercapai sama sekali hal ini disebabkan karena tidak tersedianya pagu anggaran , dan ada beberapa program yang dialihkan ke SKPD lain.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

NO	Indikator Kinerja *)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah titik genangan yang dikurangi tinggi, Luas, dan Lama Genangan	100%			1 titik	2 titik	5 titik	5 titik	5 titik	4 titik	5 titik				200 %	250 %			
2.	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	50 %			-	26.6%	30 %	40 %	50 %	-	73 %				-	274 %			
3.	Drainase dalam kondisi baik /Pembuangan Air tidak terdabet	70%			72%	75.6%	80 %	85%		70%	71.61%				97,2 %	94.7 %			
4.	Cakupan Wilayah banjir.	50%			-	-	13 %	-		-	14 %								
5.	Cakupan ketersediaan jalan dan jembatan yang terbangun	100%			0 km, 2 buah	0 km, 2 buah	3 km, 4 buah	2,2 km, 3 buah	2,6 km, 3 buah	0 km, 1 buah	0 km, 1 buah				50 %	50 %			
6.	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	60%			65%	66%	72%	75%	75%	60.66 %	66.80 %				94 %	102 %			

Rencana Strategis(RENSTRA) Tahun 2014-2019

NO	Indikator Kinerja *)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/08)	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7.	Persentase tersedianya Layanan izin usaha Jasa Kontruksi (IUJK) Dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (Sepuluh) Hari kerja setelah Persyaratan lengkap.	100%			-	-	100 %	100 %	100 %	-	-				100 %	100 %			
8.	Rumah Tangga Pengguna Air bersih	81,77 %			65%	70%	75%	80%	85%	75.67%	Belum ada balasan surat dari PDAM				116%				
9.	Persentase rumah Tangga Bersanitasi	88,83%			90%	95%	99%	99.5%	99.5%	90.10%	98%				100,1%	103.1%			
10.	Persentase Penduduk yang mendapatkan akses Air bersih yang aman	81,77 %			65%	70%	75%	80%	85%	75.67%	Belum ada balasan surat dari PDAM				116%				

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Uraian *)	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Jumlah titik genangan yang dikurangi tinggi, Luas, dan Lama Genangan	35.361.698.150	29.231.291.500	36.947.644.800	41.402.246.985	47.612.584.033	31.932.571.100	27.216.348.900				90 %	93 %					
Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	27.902.134.400	29.127.259.700	36.947.644.800	42.489.791.520	48.863.260.248	25.188.498.580	25.686.358.100				90 %	88 %					
Drainase dalam kondisi baik /Pembuangan Air tidak terdabet																	
Cakupan Wilayah banjir.	4.543.499.600	10.310.789.100	16.917.298.100	19.348.347.815	22.180.599.987	4.022.048.500	6.592.516.800				89 %	69 %					
Cakupan ketersediaan jalan dan jembatan yang terbangun	8.680.854	93.543.366.000	7.703.441.400	8.300.000.000	9.100.000.000	5.162.576.500	65.704.226.050				59 %	70 %					
Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	188.551.322.700	174.097.991.200	157.586.634.500	169.753.063.000	196.298.369.000	173.322.361.700	142.086.557.110				92 %	82 %					
Persentase tersedianya Layanan izin usaha Jasa Kontruksi (IUJK) Dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (Sepuluh) Hari kerja setelah Persyaratan lengkap.	-	-	27.207.220.150	32.057.850.865	35.228.635.952	-	-										
Rumah Tangga Pengguna Air bersih	4.370.064.750	15.090.471.200	10.993.367.400	13.116.428.900	14.418.071.790	3.577.517.050	9.287.887.040				82 %	62 %					
Persentase rumah Tangga Bersanitasi	16.532.215.200	26.769.257.300	11.383.581.400	19.531.201.800	20.945.321.980	12.718.074.920	23.610.617.700				77 %	88 %					

Rencana Strategis(RENSTRA) Tahun 2014-2019

Uraian *)	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Persentase Penduduk yang mendapatkan akses Air bersih yang aman	4.370.06 4.750	15.090.4 71.200	10.993.3 67.400	13.116.42 8.900	14.418.07 1.790	3.577.517 .050	9.287.88 7.040				82 %	62 %					

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Jenis kebutuhan	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
1	2	3
1) Belanja Tidak Langsung :		
- Belanja Pegawai	9.435.640.000,-	9.802.965.000,-
2) Belanja Langsung :		
- Belanja Pegawai	10.860.315.000,-	12.394.900.000,-
- Belanja Barang & Jasa	133.934.864.810,-	131.763.705.800,-
- Belanja Modal	310.646.068.190,-	406.734.700.200,-
Jumlah	455.450.683.640,-	560.696.271.000,-

Urusan Pekerjaan Umum diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Dinas PU pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran (belanja langsung) sebesar Rp.550.893.306.000,-dengan realisasi sebesar Rp.446.647.640.425,- atau 81,07%.Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan 5 (lima) Program Rutin dan 12 (duabelas) Program Utama. Program Utama Dinas PU yaitu:

- (1) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong,
- (2) Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong,
- (3) Program Pengendalian Banjir,
- (4) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan,
- (5) Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,
- (6) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan,

- (7) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih,
- (8) Program Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Lingkungan,
- (9) Program Pengadaan Lampu Jalan,
- (10) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan,
- (11) Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Limbah, (12) Program Peningkatan Pemeliharaan Saran dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah.

Capaian target kinerja dari program utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2016		
	2015	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah titik genangan yang dikurangi tinggi, luas dan lama genangan	30 Titik	28 titik	25 Titik	250%
Jumlah panjang dan % box culvert yang terpasang dan berfungsi sebagai sarana integrasi utilitas	15 Km	30 Km	24,44 Km	81,46%

Indikator Kinerja Program yang pertama adalah target menurun untuk jumlah titik genangan dan target panjang *box culvert* yang terpasang. *Base line* data untuk jumlah titik genangan pada tahun 2015 adalah sebanyak 30 titik dan ditargetkan pada tahun 2016 titik genangan menurun 2 titik. Realisasi kinerja tahun 2016 ada 5 titik

genangan yang dikurangi melalui Program Pembangunan Saluran Drainase yaitu pada titik:

- 1) Jalan Jipang Raya dsk,
- 2) Jalan Sungai Saddang Baru Kelurahan Balla Parang,
- 3) Jalan Paccerrakkang dsk,
- 4) Jalan Sultan Hasanuddin,
- 5) Jalan Tamalate I dsk. Sehingga

realisasi kinerja program adalah jumlah titik genangan berkurang menjadi 25 titik dari target 28 titik atau dengan capaian 250%.

Indikator kinerja yang kedua adalah pembangunan *box culvert* yang meliputi pekerjaan koneksitas saluran yang terdiri dari box culvert, pipa beton, u-ditch, plat duiker dan plat penutup telah dilaksanakan pada tahun 2016 sepanjang 9,44 Km (9.442,74 m'), dengan rincian: 26,80 m Box Culvert di Jalan Sultan Hasanuddin, 108 m u-ditch dan 60 m Box Culvert di Jalan Sungai Sadang Baru Kelurahan Balla Parang, 27 m Box Culvert di Jalan Jipang Raya dsk, 90 m u-dich di Jalan Ance Dg.Ngoyo, 100 m Pipa Beton di Jalan Hertasning Baru Kelurahan Kassi-Kassi, 7,40 m Box Culvert di Jalan Tamalate I dsk, 265 m u-ditch di Jalan Paccerrakkang dsk, 64 m Pipa Beton di Jalan Hertasning Baru/Aeropala. Sehingga total panjang koneksitas saluran yang dibangun adalah 9.442,74 m' (9,44 Km). Pada Tahun 2015

panjang box culvert yang dibangun adalah sepanjang 15 Km sehingga total panjang Box Culvert yang dibangun hingga tahun 2016 adalah sepanjang 24,44 Km dari target 30 km atau dengan capaian 81,46%.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas PU guna mendukung pencapaian indikator kinerja Program pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong adalah:

- 1) Inspeksi kondisi drainase
- 2) Perencanaan Teknis Drainase Perkotaan
- 3) Pembangunan Drainase Perkotaan
- 4) Penataan Anjungan Pantai Losari

Pencapaian indikator kinerja Program Pembangunan saluran Drainase/Gorong-gorong didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.231.291.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.216.348.900,- atau 93,10%.

2. Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong

Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2016		
	2015	Target	Realisasi	% Capaian
50 % Panjang Saluran yang berfungsi dengan baik dari total Panjang Saluran (34KM)	10%	10%	13,9%	139%

Panjang drainase yang direhab pada tahun 2016 adalah 41.392,85 m¹ dari total jumlah panjang drainase Kota Makassar adalah 3.233.424 m¹. Panjang drainase dalam kondisi baik adalah 2.315.475,50 m¹ atau 71,61% dari total panjang saluran, sehingga realisasi kinerja Program adalah 13,9% dari target 10% atau dengan capaian kinerja 139%.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas PU guna mendukung pencapaian indikator kinerja Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong adalah:

- 1) Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- 2) Gerakan Bersih Saluran Drainase (GBSD)
- 3) Pemeliharaan Rutin Berkala Saluran Drainase/gorong-gorong

Pencapaian target kinerja Program Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran drainase/gorong-gorong didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.127.259.700,-dengan realisasi sebesar Rp. 25.686.358.100,- atau 88,18%.

3. Program Pengendalian Banjir

Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2016		
	2015	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah unit dan panjang kanal dan pinggir kanal yang mencapai perbaikan fisik lokasi	-	14 km	7 km	50%
24 Rumah Pompa & Pintu Air	3 bgn	3 bgn	2 bgn	67%

Indikator kinerja Program ada 2 yaitu panjang kanal yang diperbaiki dan rumah pompa dan pintu air. Untuk indikator pertama yaitu panjang kanal dan pinggir kanal yang diperbaiki dengan target kumulatif 14 km hanyadilaksanakan berupa normalisasi/pengerukan kanal sepanjang 7 Km. Dalam program pengendalian banjir pembagian tanggungjawab terkait saluran primer dan kanal merupakan tanggung

jawab Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan dan Je'ne Berang, terkait saluran sekunder merupakan tanggung jawab Dinas PSDA Provinsi, terkait saluran/drainase tersier merupakan tanggungjawab Dinas PU Kota Makassar. Tahun 2016 dibangun 2 rumah pompa dan pintu air dari target 3 bangunan atau dengan capaian 67%. Untuk lokasi dan bangunan rumah pompa dan pintu air yaitu :

- 1) Pembangunan rumah pompa dan pintu air Toa'Daeng (Kelurahan Batua),
- 2)Pembangunan rumah pompa dan pintu air Adiyaksa (Kelurahan Pandang).

Saat ini jumlah rumah pompa sebanyak 28 unit, pintu air sebanyak 25 unit dan pompa air sebanyak 13 unit. Tahun 2016 dilakukan pemeliharaan pada 4 unit rumah pompa untuk menanggulangi masalah banjir yaitu pada titik :

- 1) Jalan Landak Baru,
- 2) Jalan Muhammadiyah,
- 3) Jalan Rappokalling,
- 4) Jalan Balaikota.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar guna mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pengendalian Banjir adalah:

- 1) Rehabilitasi dan Penataan Kanal
- 2) Normalisasi /Pengerukan Kanal Kota Makassar
- 3) Pembangunan Rumah Pompa & Pintu Air
- 4) Rehabilitasi Rumah Pompa dan Pintu Air
- 5) Operasional Pengelolaan pintu air
- 6) Penyusunan /Perencanaan Program Drainase

- 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Dermaga Kayu Bangkoa
- 8) Pembangunan Tanggul dan Talud

Pencapaian indikator kinerja Program Pengendalian Banjir didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.310.789.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.592.516.800,- atau 63,93%.

4. Program pembangunan Jalan dan Jembatan

Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2016		
	2015	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah panjang jalan yang dibangun		0 km Jalan	3,197 km Jalan	-
Jumlah jembatan yang dibangun	2 Buah Jembatan	2 buah Jembatan	1 buah Jembatan	50%

Indikator kinerja program adalah jumlah panjang jalan dan jembatan yang dibangun, dimana tahun 2016 ada 1 buah jembatan yang di bangun dengan volume 0.030 km yaitu jembatan kanal minasa upa kelurahan bangkala kecamatan manggala dari target 2 jembatan atau dengan capaian 50%. Tidak tercapainya target jumlah jembatan yang dibangun karena tidak ada peserta tender yang memenuhi kualifikasi pada proyek pembangunan jembatan Dg.Sirua/Leimena.

Pembangunan jalan yang bersumber dari dana hibah yaitu pembangunan jalan sekitar Kodim Wirabuana kelurahan mamajang dalam kecamatan mamajang dengan volume 0,162 km. Pembangunan jalan yang bersumber dari sisa DAK Tambahan 2015

dengan total volume 3,035 km di Jalan Garuda (kel.panambungan), Jalan Parinring (kel.manggala), Jalan Sanrangan (kel.pai), Jalan Hati Murni (kel.tamarunang) dan Jalan Hati Mulia (kel.mattoanging). Sehingga total jalan yang terbangun dari dana hibah dan sisa DAK Tambahan 2015) adalah 3,197 km.

NO.	NAMA PAKET	KECAMATAN	KELURAHAN	VOLUME (KM)	PELAKSANA
KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN (HIBAH KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA)					
I	PEMBANGUNAN JALAN SEKITAR KODIM WIRABUANA	Mamajang	Mamajang Dalam	0.162	CV. SULFA ABADI SEJAHTERA
JUMLAH				0.162	
KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN/JEMBATAN (SISA DAK TAMBAHAN)					
I	PEMBANGUNAN JALAN (SISA DAK TAMBAHAN 2015)				PT. HOSPINDO INTERNUSA JAYA
1	Jl. GARUDA	Mariso	Panambungang	0.300	
2	Jl. PARINRING	Manggala	Manggala	0.170	
3	Jl. SANRANGAN	Biringkanaya	Pai	1.650	
4	Jl. HATI MURNI	Mariso	Tamarunang	0.475	
5	Jl. HATI MULIA	Mariso	Mattoanging	0.440	
JUMLAH				3.035	

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar guna mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pembangunan Jalan dan Jembatan adalah:

- 1) Pembangunan Jembatan
- 2) Perencanaan Pembangunan Jalan
- 3) Perencanaan Pembangunan Jembatan
- 4) Pengukuran dan Pematokan Jalan

- 5) Penyusunan/Perencanaan Program Jalan dan Jembatan
- 6) Penyusunan Data Base Jalan
- 7) Pembangunan Jalan (Hibah kepada masyarakat/pihak ketiga)
- 8) Pembangunan jalan/Jembatan (DAK Tambahan)
- 9) Pembangunan Jalan/Jembatan (Sisa DAK)

Pencapaian target kinerja Program Pembangunan Jalan dan Jembatan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 101.172.555.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 72.184.271.050,- atau 71,34%.

5. Program Pemeliharaan jalan dan jembatan

Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2016		
	2015	Target	Realisasi	% Capaian
Panjang jalan dan jembatan yang diperbaiki	25 Km	50 Km	78,25 km	156,5%

Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan APBD II yang dilaksanakan sejumlah 4 paket pada 23 titik lokasi yaitu Paket I di Jl.Datuk Ditiro III (0,320 km), Jl.Andi Tadde (0,715 km), Jl.H.Bora (0,08 km), Jl.Kakatua Lr.7 (0,285 km), Jl.Sabutung/PPI Paotere (0,170 km), Jl.Tidung V (0,247 km), Jl.Tidung X (0,550 km), Jl.Bonto Mangepe (0,293 km). Paket II di Komp.TNI Al Kapasa (0,800 km), Jl.BTN Makkio Baji (0,637 km), Jl.Pampang 3 (0,730), Jl.Paccinang I Dsk (0,380 km), Jl.Pettarani I (0,350 km), Jl.Bitoe Raya/Depan kantor Camat (0,240). Paket III di Mamoa Raya (0,170 km), Jl.Bonto Mene (0,360 km), Jl.Muhajirin I (0,160 km), Jl.Mannuruki II (0,477 km), Jl.Darul Maarif (0,370 km),

Jl.Kalimantan (Kel.Tamalaba) (0,410 km), Jl.Faisal 14 (0,520 km), Jl.Campagaya (Komp.KODAM) (0,700 km). Paket IV di TPA Tamangapa Raya (0,830 km) dengan total panjang jalan 9,479 km. Total panjang jalan yang direhab melalui dana APBD II, DAK SPP, DAK IPD, DAK Tambahan adalah sepanjang 53,25Km. Pada tahun 2015 panjang jalan yang direhab adalah 25 Km sehingga total panjang yang direhab hingga 2016 adalah sejumlah 78,25 Km dari target kinerja program adalah 50 Km sehingga capaian kinerja program adalah 156,5%.

Pembangunan trotoar (pedestrian bintang lima) tahun 2016 yang berlokasi di jalan penghibur (1.007 meter) dan jalan pasar ikan (413 meter). Sedangkan pembangunan pedestrian bintang lima di lokasi jalan ujung pandang (374,5 meter), jalan nusantara (1.230 meter) dan jalan nusantara baru (645 meter) pada tahun 2016 tidak selesai dan menjadi kegiatan lanjutan pada tahun 2017. Penataan Simpang Jalan pada tahun 2016 dilaksanakan pada 8 Simpang Jalan : 1) Jl.Pelita Raya-Jl.A.P.Pettarani, 2) Jl.Haji Kalla-Jl.Campagaya, 3) Jl.Paccinang-Jl.Urip Sumiharjo, 4) Jl.S.SaddangJl.G.Latimojong, 5) Jl.Tamangapa Raya-Jl.RPH, 6) Jl.Rappocini Raya-Jl.A.P.Pettarani, 7) Jl.Bontolangkasa-Jl.A.P.Pettarani, 8) Jl.A.P.Pettarani-RSI Faisal (CCO).

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas PU Kota Makassar guna mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah:

- 1) Pemeliharaan jalan kota
- 2) Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan APBD II
- 3) Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

- 4) Pembangunan Trotoar
- 5) Penataan Simpang Jalan
- 6) Rehabilitasi/Pemeliharaan trotoar
- 7) Inspeksi Jalan Kota
- 8) Sarana dan Prasarana Jalan (DAK)
- 9) Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik Daerah (DAK)

Pencapaian indikator kinerja Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 166.468.801.700 dengan realisasi sebesar Rp.135.606.512.610,-atau 81,46%.

6. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2016		
	2015	Target	Realisasi	% Capaian
Cakupan peralatan alat-alat berat dlm kondisi baik	80%	80%	87,23%	109%

Sejak tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum juga melakukan pemeliharaan terhadap alat-alat berat yang digunakan untuk operasional di TPA TAMangapa. Jumlah alat-alat berat seluruhnya adalah sebanyak 47 unit dengan rincian 29 unit alat berat PU daam kondisi baik dan 6 unit dalam kondisi rusak berat, sedangkan jumlah alat berat di TPA Tamangapa 12 unit (Bachoe Loader, Buldozer, Exavator). Rata-rata alat berat diservice sejumlah 4 unit/hari. Jumlah alat-alat berat dalam kondisi baik sebanyak 41 unit sehingga realisasi kinerja Program adalah 87,23% atau dengan capaian 109%.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas PU Kota Makassar guna mendukung pencapaian indikator kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan adalah:

- 1) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
- 2) Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel
- 3) Pengelolaan UPTD Perbengkelan Ke PU-an
- 4) Pemantauan Alat Berat Perbengkelan
- 5) Bimbingan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bengkel (K3)
- 6) Penyusunan Perencanaan Program UPTD Perbengkelan
- 7) Pembangunan Gedung Kantor

Pencapaian target kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.083.454.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.780.323.000,- atau 96,24%.

7. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih

Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2016		
	2015	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah rumah tangga kumuh/miskin yang terjangkau air bersih	8 Titik	8 Titik	17 Titik	212,5%

Indikator kinerja Program diukur melalui rumah tangga miskin yang terjangkau air bersih dimana tahun 2016 terealisasi 17 titik dari target 8 titik atau dengan capaian

212,5%. Hingga tahun 2016 sebanyak 11.457 rumah tangga telah menggunakan air bersih. Berikut daftar lokasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih :

NO	KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH PEMANFAAT (JIWA)
1	Pembangunan Drinking Water	Kel. Bira	625
2	Pembangunan jaringan perpipaan air bersih masyarakat	Kel. Maradekaya Kel. Tamalanrea Indah Kel. Sudiang Raya	300
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kel. Manggala Kal. Paccerakkang Kel. Jongaya Kel. Buloa Kel. Sudiang Raya Kel. Kaluku Bodoa	556 278 278 667 667 278
4	Dana Pendamping Hibah Khusus PAMSIMAS	Kel. Tello Baru Kel. Bulurokeng Kel. Parang Kel. Bangkala	160 200 230 350
5	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK)	Kel. Sudiang Raya	720
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK IPD)	Kel. Barombong	3.060
7	Hibah Insentif Desa (HID) Program PAMSIMAS	Kel. Kapasa Kel. Mangasa	751 1.200

Terkait program hibah khusus PAMSIMAS ada tiga titik lokasi di kelurahan Buloa, Karampuang dan Karunrung yang tidak terealisasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih dengan beberapa alasan diantaranya tidak dicairkannya dana oleh BKM hingga bulan desember serta berdasarkan hasil survey internal BKM dimana masyarakat tidak membutuhkan sarana dan prasarana air bersih pada lokasi tersebut.

Sedangkan satu titik lokasi di Kelurahan Paccerakkang pengadaan sarana dan prasarana air bersih tidak terealisasi dikarenakan berdasarkan opsi PDAM yang

memerlukan adanya koordinasi terkait persetujuan sambungan PDAM dan terjadi perubahan kode rekening kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar guna mendukung pencapaian indikator kinerja Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih adalah:

- 1) Pembangunan Sarana & Prasarana Air Bersih
- 2) Sosialisasi sarana dan prasarana air bersih
- 3) Inspeksi kondisi sarana dan prasarana air bersih
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih
- 5) Lomba pengelolaan air bersih di tingkat masyarakat
- 6) Pendataan Sumber Air Masyarakat
- 7) Dana Pendamping Hibah Khusus PAMSIMAS
- 8) Pendataan Lokasi Hibah Khusus PAMSIMAS
- 9) Pelatihan Pembangunan & Pengelola Sarana & Prasarana Air Bersih
- 10) Penguatan Kelembagaan Badan Pengelolaan Air Bersih
- 11) Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK)
- 12) Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Infrastruktur Publik Daerah (DAK)

Pencapaian indikator kinerja Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.090.471.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.287.887.040,- atau 61,54%.

8. Program peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lingkungan

Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2016		
	2015	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase tersedianya prasarana lingkungan (jalan lingkungan)	70%	75%	65,74%	87,65%

Indikator kinerja Program diukur melalui data panjang jalan lingkungan yang ditangani dibandingkan dengan data panjang jalan lingkungan yang ada di Kota Makassar, dengan target 75%. Panjang jalan lingkungan yang ditangani tahun 2015 adalah 1.465.400 m' (1.465,4 Km), sedangkan panjang jalan lingkungan yang ditangani tahun 2016 hanya 23.510,68 m' yang dilaksanakan pada 70 kelurahan. Hingga tahun 2016 total panjang jalan lingkungan yang dibangun adalah 1.488.910,68 m'. Total panjang jalan lingkungan yang ada di kota Makassar adalah 2.264.819 m' sehingga realisasi sebesar 65,74% atau dengan capaian kinerja program sebesar 87,65%. Kurangnya capaian kinerja program disebabkan oleh karena anggaran yang tersedia untuk pembangunan jalan lingkungan terbatas, selain itu volume (lebar) jalan lingkungan yang besar sehingga panjang jalan lingkungan (m') yang menjadi tolak ukur dalam menghitung persentase jalan lingkungan lebih kecil.

Penataan kaki lima yang merupakan program prioritas 8 jalan masa depan walikota dilaksanakan pada Metro Tanjung Bunga (240,20 m² untuk 28 kios) dan di Jalan Kartini (338,91 m² untuk 300 kios). Sedangkan Penataan lorong dilaksanakan pada 14 kelurahan. Luas kawasan kumuh yang ditangani hingga tahun 2016 melalui

program NUSP-2 dan PLPBK mencapai 271,92 Ha dari total luas kawasan kumuh 676,31 Ha.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar guna mendukung pencapaian indikator kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Lingkungan adalah:

- 1) Pembangunan Jalan Lingkungan
- 2) Inspeksi Kondisi Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan
- 3) Penataan Kaki Lima Kota Makassar
- 4) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kota
- 5) Penyusunan DED Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh
- 6) Penyerasian Program Keciaptakaryaan dalam RPIJM
- 7) Penataan Lorong Kota Makassar
- 8) Pelatihan PNPM-P2KP
- 9) Pematangan Lahan Kawasan Permukiman Prioritas
- 10) Dana BOP PNPM Mandiri (P2KP) dan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunal (PLPBK)
- 11) Sosialisasi Neighborhood Upgrading And Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)
- 12) BOP LCO dan Fasilitasi Kegiatan NUSP-2
- 13) Pembangunan Prasarana Umum dan Gerbang Tapal Batas Kota Makassar

Pencapaian target kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Lingkungan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.678.043.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 35.884.220.692,- atau 73,71%

9. Program Pengadaan Lampu Jalan

Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2016		
	2015	Target	Realisasi	% Capaian
Presentasi cakupan ketersediaan Lampu Jalan	81%	85%	41,4%	48,7%

Indikator kinerja program diukur melalui data panjang jalan yang harus diberi penerangan dibandingkan dengan data panjang jalan yang diberi penerangan. Jalan yang diberi penerangan sepanjang 1.233,54 km, dibandingkan dengan jalan yang harus diberi penerangan sepanjang 2.977,50 km (41,4%) atau dengan capaian kinerja 48,7%.

Pada tahun 2016 pengadaan lampu jalan sejumlah 443 titik pada lokasi : 1) Jl.AP.Pettarani (185 titik), 2) Jl.Boulevard (70 titik), 3) Jl.Yusuf Dg.Ngawing (66 titik), 4) Jl.Pendidikan Raya (25 titik), 5) Pajukukang Barombong (96 titik). Pengadaan lampu kanal sejumlah 135 titik pada lokasi : 1) Kanal Jl.Kerung-Kerung – Jl.AB.Lambogo, 2) Kanal Belakang Al-Markas, 3) Kanal Jl.Rappocini – Jl.Banta-Bantaeng, 4) Kanal Jl.M.Tahir – Jl.Dg.Ngeppe, 5) Kanal Tanggul Patompo – Jl.Tanjung Alang. Pengadaan lampu taman sejumlah 87 titik pada lokasi :

- 1) Rumah Jabatan Walikota,
- 2) Kantor Balaikota,
- 3) Taman Macan,
- 4) Taman Hasanuddin.

Pengadaan sambungan listrik (Hibah kepada masyarakat) sejumlah 37 titik di Kampung Pisang.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar guna mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pengadaan Lampu Jalan adalah:

- 1) Pengadaan lampu jalan
- 2) Updeting Database Lampu Jalan di Kota Makassar
- 3) Penerapan Smart PJU
- 4) Pengadaan Sambungan Listrik (Hibah kepada masyarakat)

Pencapaian indikator kinerja Program Pengadaan Lampu Jalan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.257.534.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.906.879.250,- atau 83,64%.

10. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Lampu

Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2016		
	2015	Target	Realisasi	% Capaian
Presentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik	90,1%	98%	93%	94,8%

Indikator kinerja Program diukur dari jumlah lampu jalan yang berfungsi baik (25.514 titik) dibagi jumlah lampu jalan keseluruhan (27.412 titik) dengan realisasi 93% atau dengan capaian kinerja Program 94,8%. Tahun ini Dinas PU Kota Makassar mengadakan penggantian lampu konvensional dengan PJU LED sejumlah 896 titik dengan kapasitas 120 Watt (655 Buah) dan 200 Watt (241 Buah) yang dapat

mengurangi pemakaian beban listrik dan menghemat sekitar 75% dari penggunaan lampu jalan konvensional.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar guna mendukung pencapaian indikator kinerja Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan adalah:

- 1) Langganan penerangan lampu jalan
- 2) Operasional dan rehabilitasi penerangan lampu jalan
- 3) Oprasional pengawasan/pengecekan meteran langganan listrik
- 4) Pendataan dan Pengawasan Penyedia Tenaga Listrik
- 5) Sosialisasi penerangan jalan dan taman
- 6) Inspeksi Penerangan Jalan
- 7) Normalisasi Panel dan Jaringan PJU
- 8) Penggantian Lampu Jalan Konvensional dengan LED
- 9) Penanganan Limbah B3 Lampu Mercury

Pencapaian target kinerja Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.306.376.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 53.957.688.744,- atau 88,01%.

11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2016		
	2015	Target	Realisasi	% Capaian
Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	60%	60%	45,63%	76,05%

Indikator kinerja Program diukur melalui jumlah IPAL yang berfungsi dengan baik dibagi dengan jumlah IPAL secara keseluruhan dengan realisasi kinerja 45,63% atau dengan capaian kinerja Program 76,05%. IPAL yang berfungsi baik sejumlah 47 unit, rusak ringan sejumlah 20 unit, rusak berat sejumlah 36 unit dari total 103 unit IPAL yang telah dihibahkan melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dari total 127 unit IPAL yang telah dibangun. Pembinaan lembaga dilaksanakan pada 12 lembaga yang tidak aktif pada tahun 2016 sehingga total lembaga pengelola IPAL yang aktif sejumlah 47 lembaga.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar guna mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah adalah:

- 1) Sosialisasi Pengelolaan Air Limbah On Site System
- 2) Penyusunan Data Base Pengelolaan Air Limbah
- 3) Pendataan Sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (P-SLLT)
- 4) Sosialisasi Pembinaan Penyedotan Tangki Septik Individual
- 5) Sosialisasi Penguatan Kelembagaan IPAL Komunal
- 6) Pemetaan Sensus Wilayah Pelayanan Penyedotan Tinja Individual (Tangki Septik)
- 7) Lomba Pengelolaan air limbah di tingkat masyarakat
- 8) Penyusunan/Perencanaan Program Pengelolaan Air Limbah
- 9) Workshop Pokjasan Kelompok Kerja Sanitasi Masyarakat
- 10) Workshop Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi
- 11) Sosialisasi Sewerage System Perkotaan
- 12) Sosialisasi IPAL Kawasan/Komunal

13) Forum Diskusi Badan Pengelolaan Sanitasi

14) Penyusunan Database Infrastruktur Sanitasi

Pencapaian indikator kinerja Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.270.542.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.113.472.100,- atau 95,19%.

12. Program Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah

Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2016		
	2015	Target	Realisasi	% Capaian
Terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan air limbah	60%	60%	44,32%	73,86%

Indikator kinerja Program diukur melalui jumlah IPAL yang dilakukan pemeliharaan (9 unit) dibagi jumlah IPAL yang kondisinya rusak (36 unit) atau dengan realisasi kinerja program 25%. Jumlah sarana dan prasarana Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) yang dimanfaatkan sejumlah 7 unit dibagi jumlah sarana dan prasarana Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) yang ada sejumlah 11 unit atau dengan realisasi kinerja 63,64%. Sehingga total sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang terpelihara baik sarana dan prasarana IPAL maupun IPLT adalah 44,32%.

Hibah barang atau jasa kegiatan terdiri atas :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Industri Rumah Tangga berlokasi di Kel.Maccini Sombala (30 KK), Kel.Bara-Baraya Timur (25 KK), Kel.Barang Baru (25 KK).

2. Rehabilitasi IPAL Komunal berbasis masyarakat berlokasi di : Kel. Karang Anyar (82 KK), Kel.Bara-baraya Utara (21 KK), Kel.Ballaparang (30 KK), Kel.Kaluku Bodoa (40 KK), Kel.Bara-Baraya Timur (60 KK), Kel.Rappokalling (52 KK), Kel.Mariso (28 KK), Kel.Rappocini (35), Kel.Buloa (25 KK).

Pembangunan Jaringan IPAL Sambungan Rumah berlokasi di : Kel.Bontolebang (47 KK), Kel.Mariso (70 KK), Kel.Kalukuang (55 KK), Kel.Wala-walaya RW.5 (60 KK), Kel.Wala-walaya RW.4 (60 KK), Kel.Pannambungan RW.6 (40 KK), Kel.Tanjung Merdeka RW.1 (195 KK). Pembangunan infrastruktur sanitasi IPAL Komunal Berbasis Masyarakat berlokasi di : Kel. Jongaya (32 KK), Kel.Antang (40 KK), Kel.Gunung Sari (60 KK), Kel.Lette (49 KK), Kel.Banta-Bantaeng (40 KK), Kel.Rappokalling (40 KK), Kel.Mattoangin (48 KK), Kel.Tanjung Merdeka RW.5 (40 KK), Kel.Kaluku Bodoa (25 KK), Kel.Tallo (lanjutan) (50 KK), Kel.Maccini Sombala (60 KK).

Pembangunan Prasarana Sanitasi Kawasan Padat Permukiman Infrastruktur Publik Daerah (DAK) berlokasi di : Kel.Bontorannu (55 KK).Pengembangan Jaringan dan Perpipaian dan SR (DAK) berlokasi di : Kel.Buloa (50 KK) dan Kel.Maccini Sombala (25 KK).

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar guna mendukung pencapaian indikator kinerja Program Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah adalah:

- 1) Inspeksi Kondisi Sarana Pengelolaan Air Limbah
- 2) Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan IPLT
- 3) Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Limbah Domestik IPAL Komunal
- 4) Peningkatan Fasilitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Nipa-Nipa

- 5) Dana Pendamping Pembangunan Infrastruktur Sanitasi
- 6) Pembangunan Sarana & Prasarana Pengelolaan Industri Rumah Tangga
- 7) Rehabilitasi IPAL Komunal Berbasis Masyarakat
- 8) Pembangunan Jaringan IPAL Sambungan Rumah
- 9) Pembangunan Infrastruktur Sanitasi IPAL Komunal Berbasis Masyarakat
- 10) Dana Pendamping Program Hibah Sanitasi Kota Makassar
- 11) Pembangunan Infrastruktur Sanitasi IPAL Kawasan
- 12) Pembangunan IPAL
- 13) Pengembangan Jaringan dan Perpipaan dan SR (DAK)
- 14) Pembangunan Prasarana Sanitasi Kawasan Padat Permukiman Infrastruktur Publik Daerah (DAK)
- 15) Pelatihan Pelaksanaan Konstruksi Sarana Sanitasi

Pencapaian target kinerja Program Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.769.257.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.610.617.700,- atau 88,2%.

Dari 12 (enam) Program Utama yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, memiliki 15 (lima belas) target kinerja dengan rata-rata capaian kinerja 99,74% atau dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**.

2.4 Tantangan dan peluang Dinas Pekerjaan Umum

Guna memfokuskan strategi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*). Faktor-faktor kunci keberhasilan ini dapat diidentifikasi dari

1. Kekuatan dan kelemahan, sebagai lingkungan internal Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
2. Tantangan dan kendala/ancaman, sebagai lingkungan eksternal Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

Yang dilengkapi dengan sumber daya, sarana prasarana, peraturan perundangan dan kebijakan, serta dana.

Tabel 2.4
Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota Terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2016	Sasaran pada Renstra	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan jalan dan jembatan dalam kondisi baik	66,80%	Meningkatnya kualitas layanan jalan dan jembatan	(1) Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing, dan (2) Meningkatnya kemantapan jalan nasional.
2	Cakupan titik genangan yang di tangani	5 Titik	Meningkatnya kualitas drainase permukiman perkotaan	Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air
3	% penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	73 %	Meningkatnya kualitas drainase permukiman perkotaan	Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak
4	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih yang aman	75.67 %	Meningkatnya kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	1) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat;

				(2) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak;
5	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	98 %	Meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat.
6	Persentase tersedianya layanan ijin usaha jasa konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja (IKK)	-	Tersedianya dokumen perencanaan, pengawasan teknis dan layanan ijin usaha jasa konstruksi (IUJK)	Meningkatnya kapasitas dan kualitas konstruksi

Salah satu instrument yang digunakan dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan ini adalah **analisis SWOT** (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*). Secara efektif analisis SWOT dapat membantu menstrukturkan masalah dan menganalisa lingkungan internal dan eksternal. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Salah satu instrumen yang digunakan dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan ini adalah **Analisis SWOT**. SWOT merupakan singkatan dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman), Menurut Pearce dan Robinson (1991), analisis SWOT merupakan cara sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dan merupakan strategi yang

menggambarkan kecocokan paling baik diantaranya. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang dan meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Analisis SWOT merupakan salah satu alat bantu yang dapat digunakan untuk mengembangkan alternatif strategi yang berdasarkan pada situasi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah sesuatu kondisi yang dimiliki organisasi, dimana organisasi tersebut masih berdaya untuk mempengaruhi kondisi tersebut.

Lingkungan eksternal adalah sesuatu kondisi yang berada diluar organisasi, dimana organisasi tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadapnya, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan ini akan mempengaruhi kinerja organisasi. Kondisi pada lingkungan internal dalam analisis SWOT diidentifikasi sebagai faktor kekuatan dan faktor kelemahan, sedangkan kondisi pada lingkungan eksternal diidentifikasi sebagai faktor peluang dan faktor ancaman.

ANALISIS SWOT

Empat komponen yang selalu dimiliki oleh suatu organisasi adalah kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) secara internal, serta peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) secara eksternal. Dengan analisis SWOT, diidentifikasi setiap potensi/peluang, kekuatan, tantangan / kendala / ancaman dan kelemahan suatu organisasi sehingga dapat ditentukan strategi yang dapat dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi secara efektif dan efisien.

1. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

a. Kekuatan (*Strengths*)

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam mencapai Visi dan Misi yang telah disepakati. Faktor-faktor kekuatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Adanya Kebijakan
- 2) Jumlah sarana dan prasarana yang memadai
- 3) Adanya dukungan program
- 4) Adanya Tupoksi yang jelas
- 5) Tersedianya SDM yang berpengalaman
- 6) Adanya sistem pelaporan yang sudah baku dan berjalan sesuai kesepakatan

Secara nasional, ada kebijakan untuk pengelolaan lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang ada yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman pada dasarnya sudah berada dalam koridor pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang (UU) sektor ke-PU-an. Kedua Undang-undang tersebut memberikan pedoman secara garis besar adanya hak dasar rakyat untuk memperoleh pelayanan umum.

Pembangunan jati diri pada setiap individu harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang antara lain dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga yang demikian

diharapkan dapat menciptakan pembangunan berwawasan infrastruktur untuk menuju pembangunan berkelanjutan.

b. Kelemahan (Weakness)

Selain memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan di atas, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar masih memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan, beberapa kelemahan tersebut adalah seperti dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Jumlah dan tingkat pendidikan pegawai yang tidak merata di tiap-tiap bagian
- 2) Motivasi kerja pegawai kurang/lemah
- 3) Pengetahuan dan keterampilan pegawai yang tidak merata
- 4) System surveilans data dan kasus belum berjalan optimal
- 5) Lemahnya manajemen SDM, distribusi SDM professional kurang merata, pembinaan SDM yang tidak optimal
- 6) Kurang kesempatan SDM untuk peningkatan profesionalisme dibidang ke PU-an
- 7) Seringnya ada pergantian *Stakeholder*, sehingga kesinambungan pelaksanaan program tidak terjamin
- 8) Tenaga Teknisi yang ada di daerah kab/kota masih kurang dari jumlah pelayanan ke masyarakat yang ada
- 9) Masih kurangnya data base dan pengembangan teknologi informasi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketenagalistrikan.
- 10) Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kegiatan ketenagalistrikan.

- 11) Tidak adanya tempat khusus penyimpanan untuk limbah B3 yang dihasilkan dari material sisa / bekas penerangan jalan umum.

2. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

a. Peluang (*Opportunities*)

Beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam mencapai Visi dan Misinya diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum dalam suatu pelaksanaan tugas
- 2) Dukungan anggaran yang memadai
- 3) Kesempatan mengembangkan keahlian dan keterampilan yang cukup
- 4) Meningkatnya kesejahteraan pegawai
- 5) Kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan
- 6) Perkembangan ilmu dan teknologi dalam peningkatan SDM ke-PU an
- 7) Adanya program-program unggulan
- 8) Meningkatnya peran profesi di pelayanan infrastruktur
- 9) Meningkatnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan umum yang bermutu di mana pelayanan umum merupakan bagian dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum
- 10) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Penghematan energi.
- 11) Kesempatan pengembangan SDM
- 12) Kerjasama lintas program/lintas sektor sudah mulai berjalan

- 13) Dukungan Walikota menjadikan program infrastruktur merupakan program skala prioritas dalam pembangunan di Kota Makassar
- 14) Adanya lembaga pendidikan yang mencetak tenaga professional/teknis
- 15) Digalakkan praktik *good governance* yang memacu kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta
- 16) Kebijakan anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dari APBN dan APBD
- 17) Kebijakan otonomi daerah

b. Ancaman (*Threats*)

Selain peluang-peluang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat pula ancaman/tantangan/kendala terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Ancaman ini terutama datang dari luar Dinas Pekerjaan Umum yang akan berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya pelatihan peningkatan keterampilan dalam perencanaan program
- 2) Rendahnya pengawasan tingkat disiplin pegawai
- 3) Kurang tersosialisasinya pelaksanaan UU atau kebijakan Infrastruktur
- 4) Lemahnya Pengawasan bidang ketenagalistrikan dan dampak yang ditimbulkan dari limbah B3 yg dihasilkan dari material sisa / limbah penerangan jalan umum.
- 5) Status lahan objek pembangunan infrastruktur beberapa diantaranya belum jelas.

Tersedianya lahan untuk pembangunan midle ring road pada lokasi di maminasata sangat perlu di utamakan disebabkan lahan yang tersedia untuk saat ini belum begitu sempurna pembebasannya sehingga belum terlaksana dengan baik pelaksanaan pekerjaannya, namun dalam hal ini Dinas pekerjaan Umum Kota Makassar untuk tahun 2014 ini akan dilaksanakan penimbunannya untuk lokasi tersebut, maka dari itu pemerintah propinsi sangat diperlukan dalam hal pembebasan lokasi tersebut, karena lokasi maminasata ini sangat penting karena untuk meningkatkan tingkat penggunaan jalan dan jembatan pada ruas jalan propinsi, meningkatkan prosentase jaringan jalan propinsi dalam kondisi mantap, meningkatkan pertumbuhan kapasitas pada ruas jalan, dan berkurangnya lokasi rawan kecelakaan terkait kondisi pada ruas jalan yang meningkatkan.

BAB III**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN****DINAS PEKERJAAN UMUM****3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan****Umum**

Berdasarkan permasalahan yang menyangkut tugas dan fungsi pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar pada tabel dibawah ini dijelaskan dari aspek fisik terdapat masalah yang harus dituntaskan pada tahun 2014-2019 dan diharapkan dapat diselesaikan dengan tuntas. Uraian tentang kondisi umum ini akan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

Permasalahan Pembangunan Infrastruktur di Kota Makassar

Aspek Fisik
<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya lahan pembangunan infrastruktur kota - Kurang terpadunya program pembangunan infrastruktur kota - Tantangan kondisi geografis wilayah Kota yang sebagian besar pada elevasi yang cukup rendah. - Kondisi iklim dan cuaca yang berpengaruh pada implementasi program fisik.
Aspek Kelembagaan
<ul style="list-style-type: none"> - Belum memadainya regulasi termasuk implementasi di tingkat yang lebih detail. - Kapasitas SDM yang masih belum sesuai dengan kebutuhan - Kurangnya pemanfaatan Energi terbarukan - Belum memadainya pengawasan terhadap kegiatan pembangunan. - Hasil perencanaan design yang ada tidak sesuai dengan kondisi pada saat pekerjaan akan dilaksanakan

Aspek Sosial
<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur - Keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki - Belum optimalnya sistem informasi di bidang ke PU-an

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Renstra K/L

No	ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNA KAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMA- SALAHAN PELAYANAN SKPD
				INTERNAL (KEWENA- NGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
1	2	3	4	5	6	7
	SPM					
1	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	Masih dalam pemenuhan target	Permen PU No. 14 /PRT/M/ 2010	SDM, Sarana dan Prasarana	Kesadaran Pelaku usaha masih rendah Kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan infrastruktur	Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak seimbang dengan penambahan panjang jalan. Pemanfaatan ruang milik jalan tidak sesuai dengan fungsinya.
2.	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat					
3.	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.					

4.	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana					
5.	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/ orang/ hari	Masih dalam proses pengembangan konstruksi jaringan air bersih/air minum	Permen PU No. 14 /PRT/M/ 2010			Akses terhadap pelayanan air minum/air bersih masih kurang. Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum belum dapat mencukupi sepenuhnya
6	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	Masih belum memenuhi standar teknis pengelolaan air limbah	Permen PU No. 14 /PRT/M/ 2010	Kurang SDM dan regulasi yang mendukung perbaikan pengolahan air limbah	<ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran dan perilaku masyarakat untuk perbaikan pengolahan air limbah - Tidak tersedianya lahan - Kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan infrastruktur 	Belum tersedianya pelayanan pengelolaan air limbah domestik skala kota
7	Tersedianya sistem air limbah skala komunal/kawasan/kota	Masih dalam proses pengembangan sarana & prasarana				

8.	<p>Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.</p> <p>Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun</p>					
9	<p>Tersedianya Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)</p> <p>Terjadinya Pencegahan Genangan Agar Tidak Lebih dari 2 (dua) Kali dalam Setahun.</p>		Permen PU No. 14 /PRT/M/ 2010	SDM, Sarana dan Prasarana	<p>Kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan infrastruktur</p> <p>Kondisi iklim dan cuaca yang tidak mudah diprediksi.</p>	<p>Belum memadainya infrastruktur drainase.</p> <p>Kurangnya lahan resapan air.</p>

Tabel 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dinamika politik ekonomi internasional	Dinamika politik ekonomi nasional	Dinamika politik ekonomi regional (propinsi/kawasa/kota) - Adanya link yang tidak sinkron dengan propinsi misalnya jalan mamminasata dan jalan-jalan lain yang ada di kota(pemeliharaan) - Tidak adanya koordinasi dan sinkronisasi dengan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	
2	Perubahan iklim	Respon terhadap tekanan internasional bagi isu-isu global seperti perubahan iklim, pemenuhan MDGs, penerapan CDM	Tekanan lingkungan termasuk urbanisasi, degradasi daya dukung lingkungan, keterbatasan SDA terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar	
3	Tekanan bagi negara berkembang untuk menerapkan clean development mechanism dan pemenuhan MDGs	Percepatan pembangunan antara lain MP3EI	Pemenuhan terhadap p2kp Belum sepenuhnya dilaksanakan di lapangan hal ini disebabkan karena pihak LPM dan BKN sama-sama mau melaksanakan di lapangan.	

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tugas fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang infrastruktur berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Sebagaimana visi Kepala Daerah untuk RPJMD 2014-2019 adalah “ **Terwujudnya Kota Dunia Baru yang Aman dan Nyaman untuk Semua**” dimana misi yang diemban terdiri dari 3 (tiga) kebijakan dan 8(delapan) penjabaran dari misi sebagai berikut :

1. **Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia;**

- a. Menuju bebas pengangguran;
- b. Jaminan sosial keluarga serbaguna untuk semua;
- c. Pelayanan kesehatan darurat gratis ke rumah 24 jam;
- d. Deposito pendidikan gratis semua bisa sekolah;
- e. Sampah kita dia tukar beras;
- f. Training keterampilan gratis dan dana bergulir tanpa agunan;
- g. Rumah kota murah untuk rakyat kecil;
- h. Hidup hijau dengan kebun kota.

2. **Meresforasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia;**

- a. Kota nyaman kelas dunia mempunyai kebijakan atasi macet;
- b. Banjir sampah dan masalah perkotaan lainnya;
- c. Bentuk badan pengendali pembangunan kota;

- d. Bangun water front city selamatkan pesisir dan pulau pulau makassar;
- e. Bangun sistem transportasi publik kelas dunia;
- f. Lengkapi infrastruktur kota berkelas dunia;
- g. Bangun biringkanal city dan icon kota baru lainnya;
- h. Bangun taman tematik, tata total lorong.

3. Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas dunia bebas korupsi;

- a. Menuju PAD 1 Triliun;
- b. Insentif progresif semua aparat RT dan RW 1 juta perbulan;
- c. Kuota anggaran keluaran 2 milyar per kelurahan dalam setahun;
- d. Pelayanan publik langsung kerumah;
- e. Fasilitas pelayanan publik terpusat terpadu di kecamatan;
- f. Bebas bayar internet diruang publik kota makassar cyber city
- g. Pembayaran pajak dan retribusi tahunan online terpadu;
- h. Bentuk makassar incoor porated dan bank of makassar.

Dari ketiga misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar adalah misi kedua meresforasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia. Hubungan antara Misi, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan terkait dengan program unggulan yang menjadi prioritas daerah dapat dijabarkan seperti tabel di bawah ini :

GAMBAR III.1.
Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

filosofi

1. Tidak akan berlibat dalam urusan politik, hanya mengabdikan diri dalam upaya positif
2. Selalu menjaga KEWAJIBAN dalam melaksanakan tugas MASA DEPAN

asas & prinsip

1. Kerja Maksimal
2. Pro Rakyat, Pro Lingkungan, Pro Bisnis & Pro Pembangunan
3. Transparansi dan Akuntabel
4. Membangun Kepercayaan Dunia dan Abadi
5. Aman, Nyaman, Produktif dan Berprestasi
6. Tangga Demokratis

VISI Mewujudkan KOTA DUNIA untuk semua | Tata Lorong Bangun Kota Dunia

MISI

1. memekatkan NASEB RAKYAT menjadi MASYARAKAT SELAMATERA standar dunia
2. merevitalisasi TATA RILANG KOTA menjadi KOTA NYAMAN kelas dunia
3. memfasilitasi TATA PEMERINTAHAN menjadi PELAYAN PUBLIK kelas dunia bebas korupsi

visi dan misi

di saat matahari terbit tanggal 18 September 2013

8 jalan masaDPan hari

8 jalan masaDPan

Moh. Ramdhan Pomanto & Syamsu Rizal M
Calon Walikota & Wakil Walikota Makassar 2014-2019

Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah wakil kepala daerah, seperti dalam tabel 3.2.

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : Mewujudkan KOTA DUNIA yang aman dan nyaman untuk semua				
NO.	MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1	MERESTORASI TATA RUANG KOTA MENJADI KOTA NYAMAN Kelas Dunia			Adanya Anggaran
	Atasi macet, banjir, sampah dan masalah perkotaan lainnya	pertumbuhan jumlah kendaraan tidak seimbang dengan penambahan panjang jalan	Keterbatasan lahan	Kebutuhan mendesak
		Kurangnya lahan resapan air	Perubahan fungsi lahan	Komitmen pemerintah
	Lengkapi infrastuktur kota berkelas dunia	Pemanfaatan ruang milik jalan tidak sesuai dengan fungsinya	Pedagang kaki lima, parkir	- UU No. 38 Tahun 2004 - UU Nomor 22 Tahun 2009
	Belum tersedianya pelayanan pengelolaan air limbah domestik skala kota	- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah	Regulasi pengelolaan air limbah	

		Akses terhadap pelayanan air minum/air bersih masih kurang	Ketersediaan air baku masih kurang	Peningkatan kualitas hidup masyarakat
		Belum memadainya infrastruktur drainase	Resistensi masyarakat	Dukungan bagi upaya pengendalian banjir
		Belum tertatanya jaringan dan pemerataan pelayanan PJU	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat tentang penghematan energy - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan informasi 	<p>Mewujudkan smart PJU</p> <ul style="list-style-type: none"> - PP No. 70. Th.2009 tentang Konservasi Energi - PP. No.18 Th.1999 Tentang Pengolahan Limbah B3 - Permen ESDM No.13 Th. 2012 Tentang Penghematan Energi
	Bangun Birring kanal City dan 8 ikon kota baru lainnya			
	Bangun taman tematik			
	Tata lorong total	<p>Belum tertatanya sarana dan prasarana lorong yang presentative</p> <p>Belum ter-Standardisasi pemakaian pemakaiannya Daya/Watt Lampu Jalan untuk lorong</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya partisipasi masyarakat - Kurangnya lahan yang diperuntukkan sebagai tempat aspirasi masyarakat lorong. - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak lampu jalan ber watt besar 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen pemerintah untuk menciptakan lorong terampil - Terciptanya lorong yang mempunyai karakteritas bercirikan potensi masyarakat

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi

Tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat terus meningkat. Demikian pula dengan infrastruktur yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah diharapkan akan dapat terus mendorong percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial dan kenyamanan lingkungan.

Tantangan umum lainnya yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, khususnya bidang PU dan permukiman di Indonesia adalah kendala alamiah berupa struktur wilayah geografis; disparitas dan distribusi penduduk di Jawa dan luar Jawa; menurunnya kinerja infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah seperti jalan provinsi/kabupaten/kota; serta sulitnya pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang menyebabkan terhambatnya kelancaran pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.

1. Tantangan pembangunan. sub bidang SDA

- Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju deforestasi dan eksplorasi air tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan land subsidence dan intrusi air asin/laut

- Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum. Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum belum dapat mencukupi sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi target Millennium Development Goals (MDGs) yang menetapkan bahwa pada tahun 2015 separuh dari jumlah penduduk Indonesia harus dapat dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air minum.
- Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan selama 5 bulan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau yang berlangsung selama 7 bulan.
- Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.

Isu strategis. sub bidang SDA

- Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas.
- Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi.
- Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana air bersih
- Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air dari dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah-wadah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.

- Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi konflik antar pengguna sumber daya air, meningkatkan kinerja pengelolaan Sistem Informasi SDA (SISDA) pada BBWS/BWS dan Dinas SDA dan melengkapi data dan informasi tentang SDA untuk dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan serta memperluas akses publik terhadap data dan informasi SDA.
- Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan bidang SDA, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
- Mencari peluang-peluang investasi baru dalam upaya pengembangan infrastruktur SDA.

2. Tantangan pembangunan. sub bidang jalan

- Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi nasional harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil dan sistem logistik nasional.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
- Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
- Menjaga integrasi nasional melalui sistem jaringan jalan nasional, keseimbangan pembangunan antar wilayah terutama percepatan pembangunan Kawasan

Timur Indonesia (KTI), daerah tertinggal, daerah perbatasan, serta mengurangi kesenjangan dalam pulau maupun antara kota dan desa.

- Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta outlet. Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang telah mencapai 11: 0,4 (pendekatan demand approach) yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global, terutama pada lintas utama dan wilayah perkotaan khususnya 8 (delapan) kota metropolitan.
- Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan secara umum jalan daerah di tengah-tengah desentralisasi dan otonomi daerah dan situasi kelembagaan penyelenggaraan jalan yang masih memerlukan penguatan terutama dalam menyiapkan produk-produk pengaturan, fasilitasi jalan daerah, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.
- Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang jalan, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

Isu strategis. sub bidang jalan

- Jaringan jalan di lintas utama 4 (empat) pulau besar, yaitu Lintas Timur Sumatera, Pantai Utara Jawa, Lintas Selatan Kalimantan, dan Lintas Barat Sulawesi masih belum memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

regional dan nasional, dan 11 (sebelas) ruas strategis di Papua masih sangat kurang dalam mendukung pengembangan potensi wilayah.

- Jaringan jalan tol Trans Jawa (koridor Jakarta – Surabaya) yang masih belum tersambung dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.
- Masih banyaknya titik kemacetan lalu-lintas pada jaringan jalan di perkotaan terutama di 8 (delapan) kota metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Makassar) dan kota-kota non-metropolitan. Demikian pula jalan akses yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan nasional, seperti kawasan industri, pelabuhan laut (outlet) dan pelabuhan udara yang masih mengalami kemacetan.
- Sebagian ruas-ruas baru yang dibangun belum dapat berfungsi karena hambatan penyediaan tanah dan kekurangan alokasi dana.
- Pembebanan berlebih (overloading) masih terjadi terutama pada lintas Pantura Jawa dan lintas Timur Sumatera.
- Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, serta jaringan jalan di kawasan perbatasan dan di pulau-pulau terdepan/terluar terutama pintu gerbang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena belum sepenuhnya berfungsi untuk mendukung transportasi lintas pulau dan melayani mobilitas dan aksesibilitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga pertahanan nasional. Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.

- Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalankabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan).
- Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan dengan amanat RTRWN, yang meliputi pemantapan jaringan jalan arteri dan kolektor.

3. Tantangan pembangunan sub bidang ke Cipta-Karya

- Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi maupun antar kabupaten/kota dan provinsi.
- Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
- Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupandan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publikdan kesehatan.
- Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.
- Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.

Isu strategis sub bidang ke-Cipta Karya-an.

- Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah
- Arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam.
- Saat ini penduduk perkotaan mencapai 50% dari total penduduk nasional.
- Diperkirakan pada tahun 2025 nanti 68,3 persen penduduk Indonesia akan mendiami kawasan perkotaan.
- Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi.

Ditinjau dari tingkat pengembangan konsep ke depan berkaitan dengan pengembangan Kota Makassar sesuai dengan tupoksi di Dinas pekerjaan Umum Kota Makassar yaitu :

1. Bidang Jalan dan Jembatan meliputi konsep
 - a. Mengatasi Kemacetan :
 - 1) Percepatan Pembangunan Jalan Alternatif
 - a) Jalan Lingkar Tengah (Middle Ring Road)
 - b) Jalan Lingkar Dalam (Inner Ring Road)
 - c) Jalan Lingkar Pesisir
 - d) Jalan Layang
 - 2) Pelebaran Jalan
 - 3) Pembenahan Persimpangan Jalan
 - a) Pelebaran Simpang
 - b) Flyover
 - c) Underpass

2. Bidang Drainase; drainase di kota makassar masih banyak yang tidak berfungsi penggunaannya hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat sangat minim akan pemanfaatan drainase, salah satunya drainase itu dijadikan tempat pembuangan sampah, lahan bisnis atau tempat penjualan kaki lima, sehingga drainase menjadi tersumbat atau tidak sama sekali berfungsi, maka dari ini bidang bangunan air akan memberikan konsep yang lebih terukur dan terarah untuk mewujudkan makassar sebagai kota dunia yang nyaman aman untuk semua, sehingga makassar untuk tahun kedepan menjadi kota yang bebas dari banjir.

3. Bidang Kelistrikan, bidang ini mempunyai konsep kedepannya yaitu Smart PJU yang ramah lingkungan hemat energi dan mandiri dengan cara :
 - Pembebanan lampu jalan dan taman kota
 - Pembenahan jaringan dan normalisasi panel
 - Meningkatkan pelayanan lampu jalan
 - Mensosialisasikan dampak buruk dan pemakaian lampu jalan yang melebihi ketentuan (Standarisasi lampu jalan) kepada masyarakat
 - Memanfaatkan energi terbarukan.

4. Bidang Bina teknik, Jasa konstruksi dikenal sebagai kegiatan yang sangat terfragmentasi. Fragmentasi vertikal terjadi dalam rantai produksi antara produsen material, pemasok, manufaktur, kontraktor spesialis, dan kontraktor general, sementara fragmentasi horizontal terjadi dalam siklus proyek yaitu gagasan, konseptual desain, studi kelayakan, perencanaan detail, pengadaan, konstruksi,

penyerahan pekerjaan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Selain permasalahan tersebut, rendahnya mutu masih mewarnai penyelenggaraan konstruksi di Indonesia. Di bidang jalan misalnya, masih terjadi jalan mengalami kerusakan struktural sebelum umur rencana berakhir. Lemahnya kemampuan tenaga ahli dan konsultan di bidang pekerjaan umum juga sangat dirasakan. Pada saat ini hanya terdapat beberapa konsultan nasional yang bereputasi tinggi dan umumnya tidak bekerja di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Luputnya perhatian pemerintah dan terbatasnya kemampuan asosiasi profesi mengawal *billing rate* tenaga ahli yang pantas berakibat langsung pada kemampuan perusahaan konsultan untuk mempertahankan dan membina tenaga ahli serta mengembangkan usahaserta terjadinya praktek-prakter yang kurang professional. Mutu sumber daya manusia sektor konstruksi tidak kurang memprihatinkan. Dari 6,9 juta pekerja, 60% adalah tenaga kasar, 30% tenaga terampil, dan hanya 10% tenaga ahli. Dari total tenaga kerja tersebut, kurang dari 10% yang telah disertifikasi.

5. Bidang Prasarana dan bangunan pemerintah, program dan kegiatan yang dilaksanakan dinas pekerjaan umum kota Makassar mengarah kepada pencapaian target 100 % akses air bersih untuk penduduk dan 0 % BABS (buang air besar sembarangan).

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan	Pemanfaatan ruang milik jalan tidak sesuai dengan fungsinya	Pedagang kaki lima, parkir	- UU No. 38 Tahun 2004 - UU Nomor 22 Tahun 2009
2	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran	Kurang optimalnya sistem pendataan hasil pelaksanaan kegiatan dinas PU	Kurangnya SDM yang memahami sistem perencanaan, pemrograman dan penganggaran	Tersedianya sistem informasi perencanaan, pemrograman dan penganggaran
3	Meningkatnya Kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional	Keterbatasan konsultan tenaga ahli	Belum optimalnya kinerja perencanaan dan pengawasan teknis	Terbentuknya bidang bina teknik
4	Meningkatnya ketahanan air	Akses terhadap pelayanan air minum/air bersih masih kurang	Ketersediaan air baku masih kurang	Peningkatan kualitas hidup masyarakat
5	Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing	Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi yang dibuat oleh kementerian PUPR	Kurangnya SDM sebagai operator sistem informasi yang dibuat oleh kementerian PUPR	Koordinasi yang memadai antar SKPD, PU provinsi dan kementerian PUPR
6	Meningkatnya	Pemanfaatan ruang	Pedagang kaki	- UU No. 38

	kemantapan jalan nasional	milik jalan tidak sesuai dengan fungsinya	lima, parkir	Tahun 2004 - UU Nomor 22 Tahun 2009
7	Meningkatnya sumberdaya manusia yang kompeten dan berintegritas	-	-	Pelaksanaan Bimbingan teknis untuk SDM PU secara rutin setiap tahun
8	Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Belum adanya bidang penelitian untuk pemanfaatan teknologi ke PU-an	Belum dianggarkannya biaya penelitian untuk inovasi teknologi ke PU-an	Kebijakan Walikota Makassar yang mendorong SKPD untuk berinovasi
9	Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data, dan informasi publik, serta sarana dan prasarana	Belum adanya SDM di PU yang ahli dibidang hukum	Belum adanya SDM di PU yang ahli dibidang hukum	Tersedianya sistem informasi ke Pu-an yang terintegrasi dengan sistem informasi induk diskominfo

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan yang menjadi tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Tabel 3.5
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kota Makassar

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rencana sistem Pusat Pelayanan Kota				
a)	Pusat Pelayanan Kota	(1) Kawasan Pemerintahan di kec. Makassar dan Ujung Pandang (2) Kawasan Karebosi (3) Kawasan perdagangan dan jasa di kecamatan Wajo, Bontoala dan Ujung Pandang (4) Kawasan Pecinan di Kec. Wajo (5) Kawasan Benteng Rotterdam (6) Kawasan Losari	(1) Pembangunan fisik sarana dan prasarana lingkungan dan bangunan pemerintah (2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan	(1) Perlu didukung dengan akses jalan yang memadai (2) Penyediaan, perbaikan dan peningkatan sarana prasarana lingkungan dan bangunan pemerintah	(1) Bangunan gedung di balaikota dan kantor lurah (2) Penataan kawasan Kaki Lima di Karebosi dan Metro tanjung bunga (3) Pembangunan trotoar dan pemeliharaan jalan kota di kecamatan Ujung pandang dan Makassar
b)	Sub Pusat Pelayanan Kota	(1) Kawasan daya sebagai pusat kegiatan perumahan, perdagangan, jasa, pelayanan kesehatan, olahraga, industri dan perdagangan (2) Kawasan Untia	Pengembangan, peningkatan dan pemantapan fasilitas dengan fungsi kegiatan meliputi: perumahan, penelitian dan pendidikan tinggi, kegiatan olahraga, industri, maritim,	Dukungan akses Jalan, drainase, PJU, sarana air minum dan sanitasi	Kecamatan Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, Tallo, Ujung Tanah, Panakukang, Rappocini, Mariso, Ujung pandang, Wajo, Bontoala, Mamajang, Makassar, Tamalate dan

		<p>sebagai pusat kegiatan perumahan, pendidikan dan maritim</p> <p>3) Kawasan manggala, Bontoala dan Panakukang sebagai pusat kegiatan perumahan dan keg. Industri</p> <p>4) Kawasan Tallo sebagai pusat kegiatan perumahan, industri, budaya dan transportasi laut</p> <p>5) Kawasan Losari sebagai pusat kegiatan perumahan, pariwisata, sosial budaya, pariwisata, pelayanan kesehatan dan transportasi laut</p> <p>6) Kawasan Mattoanging dan barombang sebagai pusat kegiatan perumahan, perdagangan, penelitian, olahraga dan budaya</p> <p>7) Kawasan Sangkarrang sebagai pusat kegiatan perumahan dan wisata</p>	perdagangan dan jasa		Sangkarang
--	--	--	----------------------	--	------------

		bahari			
c)	Pusat Lingkungan	Pusat pelayanan sosial, ekonomi dan administrasi	Pengembangan, peningkatan, pemantapan dan rehabilitasi fasilitas pusat pelayanan lokal meliputi perkantoran, pemerintahan, perdagangan dan jasa, pelayanan sosial budaya skala lingkungan	Penyediaan, perbaikan dan peningkatan sarana prasarana lingkungan dan bangunan pemerintah	Seluruh Wilayah Kecamatan

Tabel 3.6
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah
Kota Makassar

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kawasan Lindung				
a)	Kawasan Yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Kawasan Danau Balangbaru/tanjung bunga, DAS Bonelengga dan DAS Tallo	Pengembangan , peningkatan, pemantapan dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan air di kawasan danau Balangbaru, DAS Bonelengga dan DAS Tallo	Bukan merupakan tupoksi Dinas PU Kota Makassar	Bukan merupakan tupoksi Dinas PU Kota Makassar
b)	Kawasan perlindungan setempat	(1) Kawasan sempadan pantai membentang dari kawasan pesisir bagian utara kota sampai bagian barat kota (2) Kawasan sempadan sungai	Pengembangan peningkatan, pemantapan, rehabilitasi fungsi lindung pada kawasan sempadan pantai, sungai dan danau	Bukan merupakan tupoksi dinas pekerjaan umum kota Makassar	Bukan merupakan tupoksi dinas pekerjaan umum kota Makassar

		sepanjang sungai jeneberang dan sungai Tallo (3) Kawasan sekitar danau di danau UNHAS, Balangtonjong, Balangbaru, waduk tunggu bitoa dan waduk Tallo			
C)	Kawasan Suaka Alam, kawasan Pelestarian alam dan Kawasan Cagar Budaya	(1) Kawasan hutan bakau ditetapkan dengan luas 558,93 Ha di sebagian wilayah Kec. Biringkanaya, Manggala, Panakukang, Tallo dan Tamalanrea (2) Kawasan cagar Budaya ditetapkan di Kawasan Benteng Fort Rotterdam, Makam raja-raja Tallo, Makam Lajangiru, Makam Lomori Antang di kec. Manggala	Pengembangan , peningkatan, pemantapan dan rehabilitasi fungsi kawasan pantai dan berhutan bakau serta kawasan cagar budaya	Bukan merupakan tupoksi dinas pekerjaan umum kota Makassar	Bukan merupakan tupoksi dinas pekerjaan umum kota Makassar
d)	Kawasan Rawan Bencana	(1) Kawasan rawan banjir ditetapkan di sebagian kec. Wajo, Biringkanaya, Tamalanrea, Tallo, bontoala, Manggala, Tamalate, Panakukang, Rappocini, Ujung tanah	Pengembangan , peningkatan, pemantapan dan rehabilitasi kawasan rawan banjir, angin puting beliung dan kebakaran	Penyediaan jalan evakuasi bencana	Seluruh wilayah kecamatan

		(2) Kawasan rawan angin puting beliung ditetapkan pada wil. Pesisir kota Makassar, kepulauan sangkarrang, sebagian kec. Tamalanrea dan Biringkanaya			
		(3) Kawasan rawan bencana kebakaran di sebagian kec. Wajo, Biringkanaya, Tamalanrea, Tallo, bontoala, Manggala, Tamalate, Panakukang, Rappocini, Ujung tanah dan Sangkarrang			
e)	Kawasan Lindung Geologi	Kawasan rawan abrasi, rawan gelombang pasang dan tsunami ditetapkan wilayah pesisir kota Makassar dan kepulauan Sangkarrang	Pengembangan , peningkatan, pemantapan dan rehabilitasi kawasan rawan abrasi, gelombang pasang dan tsunami	Pembangunan tanggul dan talud	Di wilayah pesisir kota Makassar dan kepulauan Sangkarrang
f)	Kawasan lindung lainnya	Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Pengembangan , peningkatan, pemantapan dan rehabilitasi kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Bukan merupakan tupoksi dinas pekerjaan umum kota Makassar	Bukan merupakan tupoksi dinas pekerjaan umum kota Makassar
g)	Ruang terbuka Hijau	RTH publik paling sedikit 10 % dan RTH Privat Paling sedikit 20 % dari luasan kawasan kota yang sudah	Pengembangan , peningkatan, pemantapan dan rehabilitasi RTH privat dan publik	Bersifat bantuan teknis dan koordinasi dengan SKPD terkait	Seluruh kecamatan di kota Makassar

		terbangun			
2	Kawasan Budidaya				
	Kawasan peruntukan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, peruntukan industri, pergudangan, pariwisata, ruang terbuka non hijau, ruang evakuasi bencana, ruang bagi kegiatan sektor informal dan peruntukan lainnya	Tersebar di wilayah kota Makassar	Pengembangan , peningkatan, pemantapan dan rehabilitasi Kawasan peruntukan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, peruntukan industri, pergudangan, pariwisata, ruang terbuka non hijau, ruang evakuasi bencana, ruang bagi kegiatan sektor informal dan peruntukan lainnya	Dukungan akses Jalan, drainase, PJU, sarana air minum dan sanitasi	Kecamatan Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, Tallo, Ujung Tanah, Panakukang, Rappocini, Mariso, Ujung pandang, Wajo, Bontoala, Mamajang, Makassar, Tamalate dan Sangkarang

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Secara umum, konteks pola ruang Kota Makassar mencakup Wilayah Kota Makassar yang memiliki 15 (lima belas) kecamatan dimana didalamnya mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sedangkan secara khusus, rencana pengembangan Kota Makassar terbagi kedalam 12 (dua belas) kawasan terpadu yang berada dalam ke-15 kecamatan wilayah Kota Makassar. sebagai berikut :

1. Kawasan Pusat Kota yaitu menjadikan Kawasan Pusat Kota sebagai kawasan dengan kualitas standar pelayanan yang lebih baik kepada lingkungan dan masyarakatnya, dengan mendorong aktivitas pembangunan fisik berkembang secara vertikal dan pengelolaan lingkungan yang lebih terkendali.

2. Kawasan Permukiman Terpadu yaitu mewujudkan dan mengembangkan kawasan permukiman yang berkepadatan sedang dan tinggi ke arah Timur Kota serta mengendalikan kegiatan Jasa dan Niaga yang melebihi kebutuhan kawasan.
3. Kawasan Pelabuhan Terpadu yaitu mendukung pengembangan pelabuhan beserta lingkungannya menjadi kawasan dengan tingkat pelayanan terbaik yang berstandar internasional dan meningkatkan kualitas ruang dari kondisi eksisting kawasan yang ada dengan jalan *meremajakan, menata kembali dan merevitalisasi* dalam rangka mendukung Fungsi Utama sebagai Pusat Jasa Kepelabuhanan.
4. Kawasan Bandara Terpadu yaitu mewujudkan kawasan Bandara sebagai Gerbang (*gate*) dan Ruang Tamu (*Living Room*) Kota dengan Penataan Kembali kawasan dan mengarahkan pengembangan kawasan sebagai Kawasan Berikat (*Bounded Zone*) dalam mendukung peran Bandara Hasanuddin sebagai pusat koordinasi di Kawasan Timur Indonesia.
5. Kawasan Maritim Terpadu yaitu mewujudkan kawasan Untia menjadi kawasan Maritim Terpadu berskala regional dan nasional, Mewujudkan pengembangan kawasan menjadi Kota Nelayan Terpadu sekaligus menjadi percontohan yang dapat dibanggakan. Mengembangkan pariwisata berwawasan lingkungan (*eco tourism*) dengan melestarikan dan mengelola kawasan mangrove di Pesisir Pantai Utara Makassar.
6. Kawasan Industri Terpadu yaitu meningkatkan pengembangan kawasan sebagai Pusat Industri (Selektif) Terpadu dalam skala Global, membatasi pertumbuhan dan pemanfaatan ruang sebagai kawasan pergudangan, serta

- mendorong tumbuhnya ruang-ruang pendukung kawasan yang bisa mendukung kawasan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
7. Kawasan Pergudangan Terpadu yaitu mengarahkan pengembangan kawasan sebagai pusat pergudangan yang lengkap dan terpadu. Memberhentikan pertumbuhan pemanfaatan ruang pergudangan yang tidak tertata baik, menata dan mewujudkan kawasan sebagai kawasan bebas banjir dengan merencanakan sistem drainase terpadu serta mendorong tumbuhnya ruang-ruang pendukung kawasan yang bisa mendukung kawasan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
 8. Kawasan Riset dan Pendidikan Tinggi Terpadu yaitu meningkatkan fungsi kawasan sebagai pusat Riset dan Pendidikan Tinggi dengan standar global, *image* yang baik dan atmosfer akademik yang tinggi, membatasi kegiatan pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan fungsi utama kawasan, menata kawasan kosong sekitar kawasan Sungai Tallo dengan model pemanfaatan ruang berbasis lingkungan yang berstandar global, serta mendorong tumbuhnya ruang-ruang pendukung kawasan.
 9. Kawasan Budaya Terpadu yaitu melakukan perencanaan dan penataan kembali (*Re-Masterplan*) Kawasan Benteng Somba Opu sebagai pusat budaya dan sejarah Sulawesi, mengembangkan ruang-ruang pendukung kawasan untuk memperkuat daya tarik fungsi utama kawasan, menetapkan/mewajibkan seluruh bangunan yang ada pada kawasan ini diwajibkan bergaya tradisional (*vurnicular*) serta memberi batas jelas dengan kawasan Kota Baru Tanjung Bunga.

10. Kawasan Olahraga Terpadu yaitu mewujudkan fungsi kawasan sebagai pusat semua olahraga, baik olahraga air maupun olahraga lainnya, dan memanfaatkan kebutuhan mitigasi pantai sebagai ruang untuk fungsi olahraga dan rekreasi, serta mendorong tumbuhnya ruang-ruang pendukung kawasan.
11. Kawasan Bisnis dan Pariwisata Terpadu yaitu melakukan peninjauan kembali (*review*) terhadap Masterplan Tanjung Bunga, mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai penetapan fungsi kawasan sebelum dan sesudahnya.
12. Kawasan Bisnis Global Terpadu yaitu mewujudkan Kawasan Tanjung Beringin sebagai kawasan bisnis dengan standar Internasional, mewujudkan kegiatan mitigasi pantai sebagai kebutuhan lingkungan yang mendesak, mengembangkan fungsi kawasan hanya pada fungsi bisnis yang berskala global, serta memperjelas status tanah dalam upaya mempersiapkan atmosfir investasi berdaya tarik tinggi.

Dari ke-12 kawasan terpadu tersebut, masing-masing kawasan terpadu tidak hanya terpatok berada dalam 1 (satu) wilayah kecamatan tetapi 1 kawasan terpadu dapat masuk kedalam 2 (dua) atau 3 (tiga) bagian wilayah kecamatan.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pekerjaan Umum dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Pekerjaan Umum dapat menyusun rancangan program dan kegiatan beserta targetnya yang sesuai dengan dokumen RTRW tersebut.

Untuk mendapatkan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum untuk periode 2014-2019, agar sesuai dengan arahan RTRW, perlu dilakukan telaahan terhadap Rencana Struktur Ruang Kota, dan telaahan terhadap Rencana Pola Ruang Kota yang dituju.

Hasil telaahan Dinas Pekerjaan Umum terhadap dokumen RTRW Kota Makassar dapat diketahui bahwa sebagian besar indikasi program yang terkait dengan urusan Pekerjaan Umum yang ditentukan dalam RTRW, sangat terkait dengan upaya pencapaian Standar Pelayanan yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum. Beberapa indikasi Program yang dibutuhkan untuk pencapaian SPM, namun belum diarahkan secara tegas dalam Indikasi Program RTRW antara lain:

- a. Indikasi Program untuk Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri sekunder
- b. Indikasi Program untuk pembangunan jaringan utilitas terpadu antara Dinas pekerjaan Umum, PDAM, PLN, Perindagtamben (utilitas Gas), dan Telekomunikasi.

Tabel 3.7
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kota Makassar
Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

No	Aspek kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Berkurangnya kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat pembangunan	Pembangunan yang dilaksanakan membutuhkan studi kelayakan lingkungan	Perlu dilakukan antisipasi terhadap pola ruang agar sebelum kawasan tergenang telah ada upaya untuk memindahkan penggunaan lahannya
2	Perkiraan mengenai	Pembangunan	Pembangunan jalan,	Pembangunan didahului

	dampak dan resiko lingkungan hidup	memiliki dampak positif dan negatif terhadap lingkungan	jembatan, drainase dan bangunan pemerintah	dengan studi kelayakan lingkungan
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Layanan/jasa ekosistem dapat dipertahankan dengan mengimplementasikan RPPLH	Pembangunan kolam resapan dan retensi, pembangunan rumah pompa dan pintu air	Peningkatan daerah resapan air dan pengendalian aliran air
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Pemanfaatan Sumber daya alam dengan tetap memperhatikan resiko lingkungan hidup yang ditimbulkan	Penggunaan material ramah lingkungan, pengembangan sistem green building	Program Bina teknik membuat perencanaan dengan tetap memperhatikan dampak lingkungannya
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Terdapat beberapa titik lokasi rawan banjir sebagai dampak kurangnya reasapan air	Pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase kota	Untuk infrastruktur transportasi yang melintasi lokasi rawan banjir harus dilakukan pengendalian lahan disekitarnya, misalnya yang terkait dengan perumahan dan kawasan bisnis. Bagi ruas jalan yang melewati lokasi banjir disesuaikan ketinggian dan drainasenya.
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	-	Konservasi sumber daya air	Setiap pembangunan yang dilakukan dilengkapi dengan upaya konservasi sumber daya air

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Dinas PU merupakan analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa program-program pembangunan yang direncanakan sudah menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kajian ini juga ditujukan untuk menelaah bahwa tidak ada program atau kegiatan yang direncanakan akan menimbulkan terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Rekomendasi umum hasil kajian lingkungan hidup strategis Kota Makassar terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yakni:

1. Perlu dilakukan antisipasi terhadap pola ruang agar sebelum kawasan tergenang telah ada upaya untuk memindahkan penggunaannya
2. Untuk infrastruktur transportasi yang melintasi lokasi rawan banjir harus dilakukan pengendalian lahan disekitarnya, misalnya yang terkait dengan perumahan dan kawasan bisnis. Bagi ruas jalan yang melewati lokasi banjir disesuaikan ketinggian dan drainasenya.
3. Lintasan jalan layang, monorail dan rel kereta api yang melewati kawasan pemukiman kepadatan sedang dan tinggi, perlu dilakukan pembangunan kedap suara pada saat konstruksinya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis ini merupakan tantangan yang harus dijawab untuk menjadikan Kota Makassar memiliki daya tarik yang besar baik sebagai tujuan investasi, tujuan pariwisata, maupun pemodal pembangunan kota yang berhasil. Ada beberapa isu strategis yang menjadi bahan kajian Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, diantaranya adalah:

1. Aspek fisik dan lingkungan

Kota Makassar memiliki letak geografis yang sangat strategis menjadikan pusat pertemuan/titik simpul seluruh modal transportasi di Indonesia Timur Sebagai konsekuensi letak geografis tersebut kapasitas infrastruktur yang ada menjadi tidak seimbang dengan beban yang terjadi. Sehingga saat ini sudah terasa bertambahnya titik-titik kemacetan, selain itu jumlah jalan dengan kondisi rusak pun semakin bertambah.

Aksesibilitas dan mobilitas merupakan komponen penting kegiatan wilayah dan mendukung kegiatan social dan ekonomi. Hambatan sering terjadi akibat kurangnya aksesibilitas dan mobilitas. Infrastruktur transportasi merupakan faktor utama hal tersebut.

2. Mitigasi bencana, perubahan iklim dan penurunan daya dukung lingkungan

Hal ini telah menjadi isu international, yang termasuk idalamnya adalah upaya untuk memerangi perubahan iklim dan peningkatan pemanasan global. Penanganan infrastruktur dalam rangka mitigasi bencana, antisipasi perubahan iklim dan penurunan daya dukung lingkungan merupakan hal yang sangat penting pula. Pengelolaan sungai, drainase, lahan hijau, tanah dan perairan serta udara adalah hal yang perlu diperhatikan. Banyak hal lain juga berkaitan termasuk adaptasi dan resiliensi masyarakat serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi hal tersebut. Kota Makassar merupakan kota pantai yang menjadi ujung sebagai aliran sungai-sungai di wilayah makassar.

Sebagai kota pantai kondisi kemiringan lereng sangat landai dan hal ini menyebabkan air larian cenderung lambat, dengan bertambahnya fenomena pemanasan global dan terjadinya kerusakan di wilayah hulu terutama disekitar gunung bawakaraeng, banjir dan genangan hujan menjadi permasalahan yang kemudian muncul. Kondisi ini ditambah dengan berkurangnya daerah resapan karena pesatnya pembangunan fisik serta keberadaan ruang terbuka hijau yang semakin hari semakin jarang.

3. Urbanisasi dan pemenuhan kebutuhan dasar

Permasalahan globai yang dihadapi oleh semua kota ini merupakan isu strategis

di mana laju urbanisasi yang tinggi mengakibatkan peningkatan kepadatan penduduk sementara tingkat pemenuhan kebutuhan dasar menjadi perhatian khusus. Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan, air bersih dan sarana sanitasi menjadi tanggung jawab pemerintah. Adapun isu – isu yang dinilai dalam pelaksanaan pelayanan infrastruktur yang masih belum secara optimal meningkatkan status (jalan,air,sarana prasana lingkungan,listrik) yaitu ;

Tabel 3.8
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

NO.	KRITERIA	BOBOT
1	2	3
1	Memiliki pengaruh besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kota	20%
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas PU Kota Makassar	10%
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap public	20%
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10%
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15%
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25%
	Total	100%

Berdasarkan kajian kondisi dan situasi pengelolaan Infrastruktur tahun 2010 – 2014, maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, dilakukan penilaian seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Nilai Skala Kriteria

NO	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA KRITERIA KE-						TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Fluktuasi Harga Minyak			20				20
2	Perubahan Iklim	20	10	20	10			60
3	Krisis Ekonomi	20		20	10			50
4	Aksesibilitas dan mobilitas	20	10	20	10		25	85
5	mitigasi bencana, perubahan iklim dan penurunan daya dukung lingkungan	20	10	20	10		25	85
6	urbanisasi dan pemenuhan kebutuhan dasar	20	10	20	10		25	85

Tabel 4.0
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

NO	ISU-ISU STRATEGIS	TOTAL SKOR	RATA-RATA SKOR
1	2	3	4
1	Fluktuasi Harga Minyak	20	64,167
2	Perubahan Iklim	60	
3	Krisis Ekonomi	50	
4	Aksesibilitas dan mobilitas	85	
5	mitigasi bencana, perubahan iklim dan penurunan daya dukung lingkungan	85	
6	urbanisasi dan pemenuhan kebutuhan dasar	85	

Berdasarkan analisis pada tabel 3.9 dan 4.0 dapat diketahui isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi dinas pekerjaan umum kota Makassar meliputi:

1. Aksebilitas dan mobilitas

2. Mitigasi bencana, perubahan iklim dan penurunan daya dukung lingkungan
3. Urbanisasi dan pemenuhan kebutuhan dasar

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Sebelum merumuskan visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, perlu dikemukakan beberapa prinsip yang mendasari rumusan visi tersebut. Prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar adalah bagian integral dari Pemerintah Kota Makassar.
2. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar terdiri dari bagian-bagian yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang bervariasi.
3. Bahwa keberadaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Makassar, memiliki interaksi dengan lingkungan strategis Kota Makassar, sehingga tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perkembangan Kota Makassar.

Berdasar pada pertimbangan di atas, maka Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Umum yang Berkualitas dan Berkelas Dunia”

Rumusan visi tersebut dapat diinterpretasi dan diberi pemaknaan sebagaimana berikut ini.

1. Infrastruktur : Mewujudkan infrastruktur ke-PU-an dalam arti Manajemen infrastruktur Modern dan akuntabel.

2. Pelayanan Umum : melayani secara umum untuk kepentingan umum/bersama.
3. Berkualitas : berkualitas artinya infrastruktur sesuai standar yang ditetapkan pemerintah
4. berkearifan lokal : artinya sesuai dengan nilai budaya dan berdayaguna bagi masyarakat

Sedangkan nilai yang terkandung didalam visi tersebut meliputi:

1. Inovasi : selalu membuat yang baru
2. Partisipatif : berpartisipasi/ikut serta dlm setiap kegiatan
3. Akuntabilitas : Bertanggung Jawab

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas pekerjaan Umum

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	ISU STRATEGIS Aksesibilitas dan mobilitas		ISU STRATEGIS Mitigasi bencana, perubahan iklim dan penurunan daya dukung lingkungan		ISU STRATEGIS Urbanisasi dan pemenuhan kebutuhan dasar	
	penanganan kemacetan dan peningkatan mobilitas	<input checked="" type="checkbox"/>	Terbangun dan terpeliharanya Jalan dan Jembatan yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
penanganan banjir	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Terbangunnya dan terpeliharanya saluran drainase/go-rong-gorong	<input checked="" type="checkbox"/>	
perbaiki sanitasi dan penyediaan air bersih	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan air limbah permukiman	<input checked="" type="checkbox"/>	Tersedianya sarana dan prasarana air minum

Tabel 4.2
Perumusan Visi

NO	PEWUJUDAN VISI	POKOK-POKOK VISI	PERNYATAAN VISI
1	2	3	4
1	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang berkualitas	Membangun infrastruktur untuk menangani aksesibilitas dan mobilitas	Terwujudnya Infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan berkelas Dunia
2	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan serta bangunan pemerintah yang berkualitas.	Membangun infrastruktur untuk menangani kebutuhan dasar dan penanganan lingkungan serta bangunan pemerintah	
3	Pembangunan dan pemeliharaan prasarana drainase dan pengendali banjir yang berkualitas	Membangun infrastruktur untuk mitigasi bencana dan penanganan lingkungan	
4	Pembangunan dan pemeliharaan sarana penerangan jalan dan ketenagalistrikan	Membangun infrastruktur untuk menangani kebutuhan dasar dan memberi keamanan dan kenyamanan	

Tabel 4.3
Penyusunan Penjelasan Visi

NO	VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
1	2	3	4
1	Terwujudnya Infrastruktur pelayanan umum	Membangun infrastruktur untuk menangani	Membangun prasarana transportasi yang memadai, unggul dan berkualitas

yang berkualitas dan berkelas dunia	aksesibilitas dan mobilitas	
	Membangun infrastruktur untuk menangani kebutuhan dasar, mitigasi bencana dan penanganan lingkungan	Membangun sarana dan prasarana lingkungan, bangunan pemerintah, sanitasi dan air bersih serta drainase dan pengendali banjir yang berkualitas
	Membangun infrastruktur untuk memberi keamanan dan kenyamanan	Membangunan sarana penerangan jalan yang berkualitas Membangun sarana lingkungan yang berkualitas

Rumusan visi di atas akan diupayakan perwujudannya melalui misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan penanganan pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas dan berhasil guna;
2. Meningkatkan pembangun bangunan air terpadu didukung sistem informasi data base untuk pelayanan yang berkesinambungan
3. Meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan dan bangunan pemerintah yang berkualitas.
4. Meningkatkan pelayanan Ketenagalistrikan berbasis Teknologi Informasi Guna memberikan pelayanan yang lebih baik dan ramah lingkungan.
5. Meningkatkan kapasitas perencanaan, pengawasan pengendalian pelaksanaan, dan akuntabilitas kinerja untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan publik bidang pekerjaan umum.

Tabel 4.4
Perumusan Misi

NO	VISI	POKOK-POKOK VISI	Stakeholder layanan				Misi
			SKPD Lain	Pengguna layanan	Pelaku Ekonomi	Lainnya	
1	Terwujudnya Infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan berkelas dunia	Membangun infrastruktur untuk menangani aksesibilitas dan mobilitas	Data tidak tersedia	Masyarakat Kota Makassar	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Mengembangkan penanganan pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas dan berhasil guna
		Membangun infrastruktur untuk menangani kebutuhan dasar, mitigasi bencana dan penanganan lingkungan	Data tidak tersedia	Masyarakat Kota Makassar	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Meningkatkan pembangunan air terpadu didukung sistem informasi data base untuk pelayanan yang berkesinambungan
		Membangun infrastruktur untuk memberi keamanan dan kenyamanan	Data tidak tersedia	Masyarakat Kota Makassar	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	(1) Meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan dan bangunan pemerintah yang berkualitas (2) Meningkatkan pelayanan Ketenagalistrikan berbasis Teknologi Informasi Guna memberikan pelayanan yang lebih baik dan ramah lingkungan (3) Meningkatkan kapasitas perencanaan, pengawasan pengendalian pelaksanaan, dan akuntabilitas kinerja untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan publik bidang PU

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum

Sebagai penjabaran atas visi Kementerian PU, maka tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam periode lima tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan kualitas pengendalian banjir secara terpadu dalam peningkatan kualitas drainase/gorong-gorong pada bidang bangunan air untuk mewujudkan Makassar Kota Dunia yang aman dan nyaman untuk semua;
2. Meningkatkan mutu Infrastruktur pekerjaan umum dalam bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan untuk mewujudkan infrastruktur bertaraf dunia;
3. Meningkatkan kualitas Infrastruktur cakupan air bersih dan pelayanannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur bangunan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat;
5. Terwujudnya Infrastruktur sistem air limbah yang berkualitas, dan merata;
6. Peningkatan infrastruktur penerangan lampu jalan dengan cara pengadaan lampu jalan disetiap jalan dan lorong untuk mewujudkan kota dunia yang nyaman dan aman;
7. Meningkatkan daya dukung sarana prasarana kebinamargaan;
8. Tercapainya peningkatan kapasitas dan kinerja yang akuntabel;
9. Peningkatan kinerja pelayanan publik;
10. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi.

Sedangkan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam periode 2014-2019 secara keseluruhan akan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas drainase permukiman perkotaan
2. Meningkatnya kualitas layanan jalan dan jembatan
3. Meningkatnya kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana gedung pemerintah
5. Meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman
6. Meningkatnya layanan penerangan lampu jalan
7. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kebinamargaan
8. Tersedianya dokumen perencanaan, pengawasan teknis dan layanan ijin usaha jasa konstruksi (IUJK)
9. Terwujudnyapelayanan publik yang cepat dan berkualitas
10. Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah.

Tabel 4.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan mutuInfrastruktur pekerjaan umum dalam bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan	Meningkatnya kualitas layanan jalan dan jembatan	Cakupan ketersediaan jalan dan jembatan yang terbangun Cakupan jalan dan jembatan dalam kondisi	0 Km 2 Buah 20 Km 1 Buah	0 Km 2 Buah 25 Km 1 Buah	3 Km 4 Buah 20 Km 1 Buah	2,2 Km 3 Buah 25 Km 2 Buah	2,6 Km 3 Buah 25 Km 2 Buah

Rencana Strategis(RENSTR) Tahun 2014-2019

	jembatan untuk mewujudkan infrastruktur bertaraf dunia;		baik Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Lingkungan		65 %	65 %	70 %	80 %
2	Meningkatkan kualitas pengendalian banjir secara terpadu dalam peningkatan kualitas drainase/gorong-gorong pada bidang bangunan air untuk mewujudkan Makassar Kota Dunia yang aman dan nyaman untuk semua	Meningkatnya kualitas drainase permukiman perkotaan	Cakupan titik genangan yang di tangani % penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota cakupan Wilayah rawan banjir yang tertangani	1 Titik 10 %	2 Titik 20 %	5 Titik 30 % 13 %	5 Titik 40 % 12%	5 Titik 50 % 10 %
3	Meningkatkan kualitas Infrastruktur cakupan air bersih pelayanannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih yang aman	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %
4	Meningkatkan kualitas infrastruktur bangunan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana gedung pemerintah	Persentase Cakupan Ketersediaan gedung pemerintah yang layak			65 %	70 %	75 %
5	Terwujudnya Infrastruktur sistem air limbah yang berkualitas, dan merata	Meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman	% penduduk yang terlayani sistem air limbah setempat yang memadai	60 %	60 %	63,40 %	65 %	70 %

Rencana Strategis(RENSTRA) Tahun 2014-2019

6	Peningkatan infrastruktur penerangan lampu jalan dengan cara pengadaan lampu jalan disetiap jalan dan lorong untuk mewujudkan kota dunia yang nyaman dan aman;	Meningkatnya layanan penerangan lampu jalan	Rasio panjang jalan yang diberikan penerangan lampu jalan	81 %	85 %	86 %	88 %	88 %
7	Meningkatkan daya dukung sarana prasarana kebinamargaan	Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kebinamargaan	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	80 %	80 %	87 %	88 %	90 %
8	Tercapainya peningkatan kapasitas dan kinerja yang akuntabel	Tersedianya dokumen perencanaan, pengawasan teknis dan layanan ijin usaha jasa konstruksi (IUJK)	Persentase tersedianya layanan ijin usaha jasa konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja			100 %	100 %	100 %
9	Peningkatan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10	Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	% SDM Aparatur yang menempati unit kerja sesuai dengan kompetensinya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum

Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) Misi yang dijabarkan ke dalam sasaran pokok berdasarkan tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 yaitu mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Strategi pengembangan wilayah nasional diarahkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN. Dalam pengembangan wilayah nasional tersebut, pembangunan infrastruktur pekerjaan umum sangat signifikan dalam membentuk struktur dan pola ruang termasuk mendorong pembangunan daerah dan pengembangan suatu wilayah. Oleh karenanya dalam strategi pengembangan wilayah rencana pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman harus terpadu dan searah dengan RTRWN yang merupakan matra spasial dari kebijakan pembangunan nasional. Hal ini berarti, arahan lokasi dan pembangunan sistem jaringan infrastruktur pekerjaan umum selain harus sesuai dengan pola ruang wilayah (peruntukan, pengembangan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengendalian) juga harus sesuai dengan struktur ruang wilayah nasional (sistem infrastruktur) dan sesuai

dengan sistem kota Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur, maka fokus prioritas rencana pembangunan bidang sarana dan prasarana ditetapkan dengan:

1. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan SPM.
2. Mendukung peningkatan daya saing sektor riil.
3. Meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).

Sedangkan prioritas bidang dalam rencana pembangunan bidang sarana dan prasarana mencakup:

1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan.
2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional.

Pencapaian Indikator Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas layanan jalan dan jembatan
2. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kebinamargaan
3. Meningkatnya kualitas drainase permukiman perkotaan
4. Meningkatnya kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana gedung pemerintah
6. Meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman
7. Meningkatnya layanan penerangan lampu jalan

8. Tersedianya dokumen perencanaan, pengawasan teknis dan layanan ijin usaha jasa konstruksi (IUJK)
9. Tersedianya sumber Daya Manusia yang berpotensi sesuai dengan keterampilan yang dimiliki untuk menunjang efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik bidang pekerjaan

Tabel 4.6
Penentuan Alternatif Strategi

Faktor eksternal	<p>Peluang:</p> <p>(1) Kesempatan yang luas untuk pendidikan dan pelatihan teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum</p> <p>(2) Peran serta masyarakat dalam pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya</p> <p>(3) Melimpahnya bahan bangun konstruksi jalan dan jembatan</p> <p>(4) Perbaikan lingkungan dan permukiman lebih dapat dirasakan masyarakat karena menyangkut lingkungannya</p>	<p>Tantangan:</p> <p>(1) Reformasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM</p> <p>(2) Peningkatan transparansi dan pengembangan sistem informasi</p> <p>(3) Peningkatan akuntabilitas dan kemampuan pengawasan penyelenggaraan sarana dan prasarana</p> <p>(4) Kondisi struktur tanah yang labil</p> <p>(5) Meningkatnya muatan dan dimensi berlebih dan rendahnya alokasi dana pemeliharaan</p> <p>(6) Banyaknya kerusakan prasarana jalan dan jembatan akibat bencana alam</p> <p>(7) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sanitasi sehat</p>
Faktor Internal		
<p>Kekuatan:</p> <p>(1) Adanya tupoksi</p> <p>(2) Adanya program kerja kantor</p> <p>(3) Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran kantor</p> <p>(4) Tersedianya anggaran yang memadai</p>	<p>Pentahapan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase, air bersih, sanitasi, lampu jalan dan bangunan pemerintah sesuai dengan kapasitas pembiayaan</p>	<p>(1) Penyesuaian konstruksi jalan dan jembatan serta drainase dengan kondisi lingkungan dan iklim</p> <p>(2) Peningkatan kualitas sarana prasarana lingkungan dan bangunan pemerintah</p> <p>(3) Pengembangan sanitasi dari sederhana menjadi perpipaan dengan IPAL di kawasan permukiman</p>
<p>Kelemahan</p> <p>(1) Belum memadainya kualitas sumber daya manusia</p> <p>(2) Belum optimalnya kualitas sarana dan prasana penunjang</p> <p>(3) Data dan informasi organisasi sosial kemasyarakatan dan politik masih terbatas</p> <p>(4) Tingkat koordinasi antar</p>	<p>Pengembangan pelibatan swasta dalam pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, jembatan, drainase, air bersih, sanitasi, lampu jalan</p>	<p>(1) Peningkatan daya dukung sarana prasarana kebinamargaan</p> <p>(2) Terlaksananya Pelayanan perizinan Ketenagalistrikan</p> <p>(3) Peningkatan kualitas sumber Daya Manusia yang berpotensi sesuai dengan keterampilan yang dimiliki untuk menunjang efektifitas</p>

lembaga belum berjalan dengan baik		dan efisiensi dalam pelayanan publik bidang pekerjaan
------------------------------------	--	---

Berdasarkan hal tersebut, wujud dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan untuk mendukung visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel 4.7

Tabel 4.7
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan berkelas dunia			
MISI I : Mengembangkan penanganan pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas dan berhasil guna;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan mutu Infrastruktur pekerjaan umum dalam bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan untuk mewujudkan infrastruktur bertaraf dunia;	Meningkatnya kualitas layanan jalan dan jembatan	-Pentahapan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan kapasitas pembiayaan -Penyesuaian konstruksi jalan dan jembatan dengan kondisi lingkungan dan iklim -Pengembangan pelibatan swasta dalam pembiayaan pembangunan jalan dan jembatan.	Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas di seluruh wilayah Kota untuk melanjutkan pembangunan mencapai Makassar Kota Dunia yang aman dan nyaman untuk semua
Meningkatkan daya dukung sarana prasarana kebinamargaan	Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kebinamargaan	Peningkatan daya dukung sarana prasarana kebinamargaan	
MISI II : Meningkatkan pembangun bangunan air terpadu didukung sistem informasi data base untuk pelayanan yang berkesinambungan			

Meningkatkan kualitas pengendalian banjir secara terpadu dalam peningkatan kualitas drainase/gorong-gorong pada bidang bangunan air untuk mewujudkan Makassar Kota Dunia yang aman dan nyaman untuk semua	Meningkatnya kualitas drainase permukiman perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pentahapan pembangunan drainase sesuai dengan kapasitas pembiayaan - Penyesuaian konstruksi drainase dengan kondisi lingkungan dan iklim - Pengembangan pelibatan swasta dalam pembiayaan pembangunan drainase - Pentahapan pemeliharaan drainase sesuai dengan kapasitas pembiayaan - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase 	Penyediaan infrastruktur drainase yang berkualitas di seluruh wilayah Kota
Misi III	Meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan sarana prasarana lingkungan dan bangunan pemerintah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas Infrastruktur cakupan air bersih pelayanannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Penyambungan/pembangunan jaringan air bersih	Pencapaian MDGs, 100 % akses air bersih
Meningkatkan kualitas infrastruktur bangunan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana gedung pemerintah	Peningkatan kualitas sarana prasarana gedung pemerintah	Penyediaan sarana prasarana gedung pemerintah yang layak dalam peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat
Terwujudnya Infrastruktur sistem air limbah yang berkualitas, dan merata	Meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sanitasi dari sederhana menjadi perpipaan dengan IPAL di kawasan permukiman - Pengembangan sistem perpipaan air limbah dari 	Mengembangkan sistem IPAL Kota dan IPAL kawasan secara terukur dan terpadu dalam kawasan terpadu

		rumah tangga	
MISI IV : Meningkatkan pelayanan Ketenagalistrikan berbasis Teknologi Informasi Guna memberikan pelayanan yang lebih baik dan ramah lingkungan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan infrastruktur penerangan lampu jalan dengan cara pengadaan lampu jalan disetiap jalan dan lorong untuk mewujudkan kota dunia yang nyaman dan aman;	Meningkatnya layanan penerangan lampu jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Pelayanan perizinan Ketenagalistrikan - Terpenuhinya Kebutuhan Lampu Jalan - Terpeliharannya Lampu Penerangan Jalan 	pelayanan yang cepat tanggap dan maksimal
MISI V : Meningkatkan kapasitas perencanaan, pengawasan pengendalian pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan publik bidang pekerjaan umum			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kapasitas pengawasan pengendalian pelaksanaan, dan akuntabilitas kinerja untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan publik bidang pekerjaan umum;	<p>Tersedianya dokumen perencanaan, pengawasan teknis dan layanan ijin usaha jasa konstruksi (IUJK)</p> <p>Terwujudnya Pelayanan Publik yang cepat dan berkualitas dan Terwujudnya Pendayagunaan</p>	Peningkatan kualitas sumber Daya Manusia yang berpotensi sesuai dengan keterampilan yang dimiliki untuk menunjang efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik bidang ke PU-an	Penyediaan perencanaan, pengawasan pengendalian pelaksanaan, dan akuntabilitas kinerja untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan publik bidang pekerjaan umum

Aparatur Pemerintah Daerah	
----------------------------------	--

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Uraian pada bab ini dilakukan pengelompokan kebijakan yang telah dikemukakan terdahulu. Kemudian setiap kebijakan dijabarkan ke dalam program utama. Program utama tersebut dikembangkan dalam bentuk program-program rinci. Setiap program diikuti dengan uraian kegiatan rinci yang relevan dengan program tersebut, masing-masing bagian tidak tampak dalam uraian ini. Untuk hal tersebut atau persesuaian antara kebijakan, program dan kegiatan dengan masing-masing bagian dapat dilihat pada bagian lampiran (matriks kebijakan, program dan kegiatan) lima tahun.

Uraian berikut ini akan dilakukan berdasar pada masing-masing kebijakan yang diikuti dengan program utama, program dan kegiatan yang rinci dari masing-masing kebijakan.

I. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan :

1. Pembangunan Jalan
2. Pembangunan Jalan (Hibah Kepada Masyarakat/Pihak Ke Tiga)

II. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan :

1. Pembangunan Trotoar
2. Pemeliharaan Jalan Kota
3. Inspeksi Jalan Kota

4. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Jalan (DAK)
5. Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar
6. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan APBD II
7. Penataan Simpang Jalan
8. Rehabilitasi/Pemeliharaan Median Jalan
9. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
10. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (DID)

III. Program Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Lingkungan (Jalan Lingkungan)

1. Pembangunan Jalan Lingkungan Kota
2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan
3. Pembangunan Infrastruktur Lorong
4. Penataan Kaki Lima Kota Makassar
5. Sosialisasi Neighborhood Upgrading And Shelter Project Phase
6. BOP LCO dan Fasilitasi Kegiatan NSUP 2
7. Pelatihan Kotaku
8. Dana BOP KOTAKU dan Penataan Lingkungan Pemukiman berbasis Komunal (PLPBK)
9. Pengadaan Utilitas penunjang pada Fasilitas Umum

IV. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong :

1. Inspeksi Kondisi Drainase
2. Pembangunan Drainase Perkotaan
3. Penataan Anjungan Pantai Losari

V. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong :

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong
2. Gerakan Bersih Saluran Drainase (GBSD)
3. Pemeliharaan Rutin Berkala Saluran Drainase/Gorong-Gorong

VI. Program Pengendalian Banjir :

1. Normalisasi/Pengerukan Kanal Kota Makassar
2. Pembangunan Rumah Pompa & Pintu Air
3. Operasional Pengelolaan Pintu Air
4. Rehabilitasi sedang/berat Dermaga
5. Pembangunan Tanggul dan Talud
6. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Pompa dan Pintu Air
7. Pembangunan Kolam Resapan dan Kolam Retensi

VII. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih:

1. Pembangunan Sarana & Prasarana Air Bersih
2. Sosialisasi Sarana & Prasarana Air Bersih
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih
4. Lomba Pengelolaan Air Bersih di Tingkat Masyarakat
5. Pelatihan pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih
6. Pengujian kualitas air pada sarana pengelolaan Air Bersih
7. Penguatan kelembagaan Badan Pengelola Air Bersih
8. Pembangunan sarana air bersih (Hibah)
9. Pendataan sarana dan prasarana Air Bersih (DAK)

VIII. Program Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air

Limbah :

1. Workshop Pokjasa Kelompok Kerja Sanitasi Makassar
2. Workshop Pengelolaan & Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi
3. Sosialisasi Sewerage System Perkotaan
4. Sosialisasi IPAL Kawasan/Komunal
5. Forum Diskusi Badan Pengelolaan Sanitasi
6. Pembangunan infrastruktur Sanitasi (Hibah Sanitasi Kota Makassar)
7. Pembangunan Infrastruktur Sanitasi IPAL Komunal Berbasis Masyarakat
8. Pembangunan infrastruktur Sanitasi (DAK)
9. Pembangunan Sarana & Prasarana Pengelolaan Industri Rumah Tangga
10. Pembangunan Jaringan IPAL Sambungan Rumah
11. Rehabilitasi IPAL Komunal berbasis masyarakat
12. Rehabilitasi IPAL Kawasan
13. Pembangunan IPAL Kantor Pemerintahan
14. Pembangunan Infrastruktur Sanitasi skala individual (septic tank)
15. Inspeksi Sarana Prasarana Sanitasi dan Air Bersih
16. Pembangunan IPAL Losari

IX. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah Daerah

1. Pembangunan Gedung Pemerintah
2. Rehabilitasi /pemeliharaan sedang/berat bangunan milik pemerintah
3. Pemantauan bangunan Gedung Pemerintah

4. Taksasi bangunan gedung/rumah sarana dan prasarana umum
5. Rehabilitasi sedang/berat gedung (hibah kepada masyarakat/pihak ketiga)
6. Rehabilitasi sedang/berat Prasarana Pemerintah
7. Pengelolaan Sistem Informasi Bid. Prasarana dan Bangunan Pemerintah
8. Penataan Kaki Lima Kota Makassar
9. Penataan Anjungan Pantai Losari
10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Multimedia Gedung Pemerintah

X. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan :

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel
3. Pengelolaan UPTD Perbengkelan Ke PU-an
4. Pemantauan Alat Berat perbengkelan
5. Pengelolaan dan Peralatan K3 UPTD Perbengkelan

XI. Program Pengadaan Lampu Jalan:

1. Pengadaan Lampu Jalan
2. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Penerangan pada Lorong-lorong
3. Updeting Data Base Lampu Jalan di Kota Makassar
4. Penerapan Smart PJU

XII. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan;

1. Langganan penerangan lampu jalan
2. Rehabilitasi penerangan lampu jalan

3. Pengawasan/pengecekan meteran langganan listrik
4. Pendataan dan pengawasan penyedia tenaga listrik
5. Penggantian lampu jalan konvensional dengan LED
6. Penanganan B3 Lampu Mercury
7. Sosialisasi penerangan jalan dan taman
8. Inspeksi penerangan jalan
9. Normalisasi panel dan jaringan lampu jalan

XIII. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah :

1. Sosialisasi Pengelolaan Air Limbah On Site Sistem (IPAL Komunal) Sosialis
2. Sosialisasi Pembinaan Penyedotan Tangki Septik Individual & LLTT
3. Sosialisasi Penguatan Kelembagaan IPAL Komunal
4. Penyusunan Data Base Pengelolaan Air Limbah
5. Pendataan Sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (P-SLLT)
6. Pemetaan Sensus Wilayah Pelayanan Penyedotan Tinja Individual (Tangki Septik)
7. Lomba Pengelolaan Air Limbah di Tingkat Masyarakat
8. Penyusunan Regulasi Pengelolaan Air Limbah
9. Sosialisasi Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik
10. Pelatihan Pengelolaan UPTD PAL
11. Penyusunan dan revisi SOP UPTD PAL
12. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan IPLT

13. Inspeksi Kondisi Sarana Pengelolaan Air Limbah
14. Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Limbah Domestik IPAL Komunal
15. Pengujian Berkala Effluent IPAL Komunal, IPAL Kawasan dan IPLT
16. Peningkatan Fasilitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Nipa- nipa

XIV. Program Bina Teknik

1. Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Air dan Drainase
2. Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan
3. Perencanaan Teknis Pembangunan UPTD
4. Pengukuran dan Pematokan Jalan
5. Penyerasian Program Keciaptakaryaan dalam RPIJM
6. Penyusunan DED Penanganan Lingkungan dan Pemukiman Kumuh (NUSP dan KOTAKU)
7. Pembuatan Indeks Harga Satuan
8. Review Desain Gedung Pemerintah mengacu Konsep Green Building
9. Sayembara Desain Gedung Pemerintah
10. Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Prasarana dan Bangunan Pemerintah
11. Penyusunan Dokumen Lingkungan
12. Penyusunan *Leger* Jalan dan Jembatan
13. Review dan Penyerasian Hasil Usulan Masyarakat
14. Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Perkotaann

15. Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan
16. Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan UPTD
17. Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Pemerintah
18. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMIJA)
19. Penyusunan Laporan Penataan Pengelolaan Dampak Lingkungan
20. Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Bidang ke Pu-an
21. Bimbingan Teknis Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
22. Bimbingan Teknis Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa
23. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ke PU an
24. Workshop Penyusunan Dokumen Pengadaan Konstruksi
25. Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pengawasan ke - PU an
26. Pembinaan dan Peningkatan Jasa Konstruksi
27. Bimbingan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
28. Sayembara Desain Infrastruktur Kota

XV. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis lainnya
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan bahan bacaan
5. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
6. Pelaporan data potensi kepegawaian
7. Pengelolaan administrasi perkantoran
8. Sosialisasi kinerja pelayanan publik

9. Penyediaan jasa administrasi perkantoran
10. Pelaporan dan pengelolaan, penerimaan dan pengeluaran barang dan jasa kantor
11. Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
12. Penyusunan Buku DPU dalam angka

XVI. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

1. Pelatihan Mekanik UPTD Perbengkelan
2. Pelatihan Sistem e-Monitoring ke PU-an
3. Sosialisasi Pengukuran Standar Analisis Beban Kinerja
4. Workshop Penyelesaian Permasalahan Kontrak
5. Workshop Standar Operating Prosedur ke PU-an
6. Bimbingan Teknis Perencanaan dan Program
7. Sosialisasi Perundang-undangan bidang ke PU-an

XVI. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

XVII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur;

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung tempat kerja
2. Pengadaan alat-alat besar darat
3. Pengadaan alat angkut apung bermotor
4. Pengadaan alat angkutan darat bermotor
5. Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor

6. Pengadaan alat bengkel bermesin
7. Pengadaan alat bengkel tak bermesin
8. Pengadaan alat ukur
9. Pengadaan alat kantor
10. Pengadaan alat rumah tangga
11. Pengadaan komputer
12. Pengadaan meja dan kursi kerja/rapat
13. Pengadaan alat studio
14. Pengadaan alat komunikasi
15. Pengadaan alat keamanan dan perlindungan
16. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
17. Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor
18. Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor
19. Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga
20. Pemeliharaan rutin/berkala alat komputer
21. Pemeliharaan meja dan kursi kerja/rapat
22. Pemeliharaan alat studio
23. Pemeliharaan alat komunikasi
24. Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung tempat kerja
25. Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi
26. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
27. Pengadaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM)
28. Pemeliharaan Rutin/berkala Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM)

XVIII. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

1. Penyusunan LAKIP
2. Penyusunan laporan Keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun serta perhitungan penyusutan asset SKPD
3. Penyusunan Perjanjian Kinerja
4. Pengelolaan Keuangan SKPD
5. Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Administrasi
6. Penyusunan RKA-SKPD
7. Penyusunan DPA-SKPD
8. Penyusunan Renja SKPD
9. Penyusunan Renstra SKPD
10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
11. Penyusunan realisasi fisik keuangan
12. Publikasi perkembangan/kemajuan pembangunan
13. Penyusunan standar harga satuan ke PU-an

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2018 – 2019

LAMPIRAN

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi SKPD pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang ditujukan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi pelaksanaan urusan wajib bidang Pekerjaan Umum di Kota Makassar.

Prestasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan

berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Pekerjaan Umum itu sendiri serta SPM yang diatur dalam Permen PU nomor 01/PRT/M/2014. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kota Makassar tahun 2014–2019.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang termuat dalam dalam RPJMD, maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2014–2019 dapat diuraikan padaTabel 6.1.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2014)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Tahun RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Jumlah titik genangan yang dikurangi tinggi, luas dan lama genangan	34 titik (Titik genangan yang akan dikurangi)	1 titik	2 titik	5 titik	5 titik	5 titik	10 titik (Revisi target akhir titik genangan yang akan dikurangi)
2	50 % Panjang Saluran yang berfungsi dengan baik dari total panjang saluran	20% Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik	10%	10%	10%	10%	10%	70% Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik
3	24 Rumah Pompa dan Pintu Air	8 Unit bangunan Rumah pompa dan Pintu air sudah terbangun	2 bangunan	3 bangunan	3 bangunan	3 bangunan	4 bangunan	23 bangunan Rumah pompa dan Pintu air sudah terbangun
4	Panjang jalan dan jembatan yang dibangun	0 km jalan, 3 unit jembatan	0 km, 2 unit	0 km, 2 unit	3 km, 4 unit	2,2 Km 3 unit	2,6 Km 3 unit	7,8 Km 17 unit
5	Panjang Jalan dan jembatan yang diperbaiki	25 km jalan, 3 unit jembatan	20 km, 0 unit	20 km, 0 unit	20 km, 4 unit	25 km, 3 unit	25 km, 3 unit	135 km, 13 unit

Rencana Strategis(RENSTR) Tahun 2014-2019

6	Cakupan ketersediaan jalan lingkungan dalam kondisi baik	64,76 %	65%	66%	65%	70%	80%	80%
7	Jumlah titik sarana prasarana air bersih yang terbangun	20 titik	2Titik	2Titik	8 Titik	8 Titik	8 Titik	48 titik
8	Jumlah bangunan pemerintah yang terbangun	45 unit			6 unit	7 unit	8 unit	66 unit
9	Jumlah bangunan pemerintah yang direhabilitasi	40 unit			22 unit	23 unit	24 unit	109 unit
10	Peningkatan Jumlah rumah tangga yang terakses sanitasi Layak	1521 rumah tangga (SR)			400 Rumah tangga (SR)	400 Rumah tangga (SR)	400 Rumah tangga (SR)	2721 Rumah tangga (SR)
11	Persentase IPAL dalam kondisi baik	36 %	60%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
12	Persentase ketersediaan sistem air limbah yang memadai	48,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
13	Presentasi cakupan ketersediaan Lampu Jalan	86%			86 %	88 %	88 %	88%
14	Presentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik	98%			90%	90%	90%	90%
15	Persentase peralatan alat-alat berat dlm kondisi baik	76,92%			85 %	90 %	90 %	90%

Rencana Strategis(RENSTR) Tahun 2014-2019

16	% Dokumen Perencanaan Teknis yang dilaksanakan	0	-	-	100%	100%	100%	100%
17	% titik pengawasan teknis yang terlaksana	0	-	-	100%	100%	100%	100%
18	% dokumen ijin usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan	0	-	-	100%	100%	100%	100%
19	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Cakupan Ketersediaan Sarana dan prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran disiplin berpakaian dinas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Cakupan Aparatur yang mendapatkan Pelatihan Kompeten di bidangnya	100%			100%	100%	100%	100%
23	% Capaian Kinerja yang termuat dalam citizen charter	12 dok			12 dok	12 dok	12 dok	36 dok

BAB VII

PENUTUP

Sebagai konsistensi implementasi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014-2019 untuk selanjutnya perlu diperhatikan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan implementasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Indikator Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2014-2019 dan revisinya serta telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014-2019, setiap tahun disusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas yang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan revisinya serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Rencana Strategis Dinas Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014-

2019 dan revisinya serta Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, setiap tahun dari tahun 2014 sampai dengan 2019 dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bidang ke PU-an.

Demikian revisi dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2019 dan disusun sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang ke PU-an.

Selanjutnya diharapkan peran aktif seluruh bidang teknis sebagai unit satuan kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 - 2019.

Makassar, Oktober 2017
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Makassar

LAMPIRAN TABEL 5.1
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN 2018-2019

URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD / BIDANG	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM RPJMD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KERANGKA PENDANAAN DAN REALISASI														
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Akhir Tahun RPJMD				
							Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)			
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																					
SEKRETARIAT	Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik yang cepat dan berkualitas (44)	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	6.568.669,000	100%	6.382.748,000	100%	6.472.375,900	100%	6.875.994,695	100%	7.219.794,430	100%	33.519.582,025			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jaringan telepon, listrik dan air setiap tahun	60%	100%	1.534.425,000	100%	1.687.868,000										3.222.293,000	
					Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia					3 Jenis	1.416.000,000	3 Jenis	1.486.800,000	3 Jenis	1.561.140,000	9 Jenis	4.463.940,000				
				Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis lainnya	Tersedianya pegawai non PNS yang kompetensial sesuai dengan bidangnya	285 orang	100%	2.022.000,000	100%	2.224.200,000											4.246.200,000
					Jumlah jasa Pegawai Honoror					276 Orang	1.821.600,000	276 Orang	1.912.680,000	276 Orang	2.008.314,000	828 Orang	5.742.594,000				
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya 5 orang jasa kebersihan setiap tahun	50%	100%	63.473,000	100%	69.820,000											133.293,000
					Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang tersedia					3 Orang	140.815,000	3 Orang	147.855,750	3 Orang	155.248,538	9 Orang	443.919,288				
				Penyediaan bahan bacaan	Tersedianya 17 jenis Koran dan buku Peraturan perundang-undangan	100%	100%	73.980,000	100%	81.378,000											155.358,000
					Jumlah bahan bacaan yang tersedia					19 Media cetak	68.676,000	19 Media Cetak	72.109,800	19 Media Cetak	75.715,290	57 Media Cetak	216.501,090				
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	45%	16	800.000,000	132	880.000,000	142 Perjalanan	700.000,000	150 Perjalanan	735.000,000	158 Perjalanan	771.750,000	598 Perjalanan	3.886.750,000			
					Terukurnya jumlah pegawai	45%	100%		100%	110.096,000							110.096,000				
				Pelaporan Data Potensi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pelaporan data potensi kepegawaian					3 dok	143.793,300	3 dok	150.982,965	3 dok	158.532,113	9 Dok.	453.308,378				
				Pengelolaan administrasi perkantoran	Terlaksananya administrasi yang akurat	45%	100%	994.600,000	100%	1.094.060,000											2.088.660,000
					Jumlah Tenaga Jasa Administrasi Aparatur Kantor yang tersedia					49 Orang	924.911,600	49 Orang	971.157,180	49 Orang	1.019.715,039	147 Orang	2.915.783,819				
Sosialisasi Kinerja Pelayanan Publik	Terlaksananya Sosialisasi Kinerja	100%	100%	220.000,000	100%	242.000,000											462.000,000				
	Jumlah Jasa Publikasi, Dokumentasikan Iklan yang tersedia					18 Media	716.900,000	18 Media	752.745,000	18 Media	790.382,250	54 Media	2.260.027,250								
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Jasa Administrasi perkantoran	80%	100%	370.000,000	100%	407.000,000											777.000,000				
	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran yang tersedia					5 Jenis	325.808,000	5 Jenis	342.098,400	5 Jenis	359.203,320	15 Jenis	1.027.109,720								
Pelaporan dan Pengelolaan, Penerimaan dan Pengeluaran Barang dan Jasa Kantor	Jumlah Pelaporan dan Pengelolaan, Penerimaan dan Pengeluaran Barang dan Jasa yang tersedia					20 Dokumen Laporan	168.272,000	20 Dokumen	176.685,600	20 Dokumen	185.519,880	60 Dokumen	530.477,480								
Penyedia Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendapat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan					280 Orang	45.600,000	280 Orang	47.880,000	280 Orang	50.274,000	840 Orang	143.754,000								
Penyusunan Buku DPU dalam angka (Kegiatan Baru)	Jumlah Dokumen DPU dalam angka yang tersusun									1 Dokumen	80.000,000	1 Dokumen	84.000,000	2 Dokumen	164.000,000						

URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD / BIDANG	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM RPJMD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KERANGKA PENDANAAN DAN REALISASI														
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Akhir Tahun RPJMD				
							Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)			
Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah (42)	% SDM Aparatur yang menempati unit kerja sesuai dengan kompetensinya	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten di bidangnya	100%	100%	3,150,000,000	100%	3,089,210,000	100%	777,311,700	100%	1,513,451,800	100%	1,589,124,390	100%	10,119,097,890				
				Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pengawasan ke - PU an	100%	100%	300,000,000	100%	330,000,000										630,000,000		
				Pelatihan Mekanik UPTD Perbengkelan	100%	100%	150,000,000	100%	165,000,000											315,000,000	
							Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Mekanik UPTD Perbengkelan					185 Orang	235,027,500	185 Orang	246,778,875	185 Orang	259,117,819	555 Orang	740,924,194		
				Bimbingan Teknis Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	0%	100%	300,000,000	100%	330,000,000											630,000,000	
				Bimbingan Teknis Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa	0%	100%	300,000,000	100%	330,000,000											630,000,000	
				Pelatihan Sistem e- Monitoring ke PU-an	0%	100%	300,000,000	100%	330,000,000											630,000,000	
							Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Sistem e- Monitoring ke PU-an					185 Orang	283,217,700	150 Orang	145,000,000	150 Orang	152,250,000	485 Orang	580,467,700		
				Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur ke PU-an	0%	100%	300,000,000	100%	330,000,000											630,000,000	
				Sosialisasi Pengukuran Standar Analisis Beban Kinerja	0%	100%	300,000,000	100%	330,000,000											630,000,000	
							Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Pengukuran Standar Analisis Beban Kinerja					185 Org	259,066,500	185 Org	272,019,825	185 Org	285,620,816	555 Org	816,707,141		
				Workshop Penyelesaian Permasalahan Kontrak	0%	100%	300,000,000	100%	330,000,000											630,000,000	
							Jumlah peserta workshop Penyelesaian Permasalahan Kontrak							180 Orang	283,217,700	180 Orang	297,378,585	360 Orang	580,596,285		
Workshop Penyusunan Dokumen pengadaan Konstruksi	0%	100%	300,000,000	100%	330,000,000											630,000,000					
Workshop Standar Operating Prosedur ke PU-an	100%	100%	300,000,000	100%	330,000,000											630,000,000					
			Jumlah peserta workshop Standar Operating Prosedur ke PU-an							180 Orang	283,217,700	180 Orang	297,378,585	360 Orang	580,596,285						
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang ke PU-an			Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang							180 Orang	283,217,700	180 Orang	297,378,585	360 Orang	580,596,285						
Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah (42)	% SDM Aparatur yang menempati unit kerja sesuai dengan kompetensinya	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Disiplin Berpakaian Dinas	100%	100%	200,000,000	100%	253,875,000							100%	453,875,000				
				Persentase Ketersediaan Pakaian Dinas Pegawai						100%	275,000,000	100%	278,207,500	100%	292,850,000	100%	846,057,500				
				Pengadaan pakaian dinas	75%	100%	200,000,000	100%	253,875,000									453,875,000			

URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD / BIDANG	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM RPJMD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KERANGKA PENDANAAN DAN REALISASI											
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Akhir Tahun RPJMD	
							Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)
				dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Perengkapannya yang tersedia					550 Orang	275,000,000	550 Orang	278,207,500	550 Orang	292,850,000	1.650 Orang	846,057,500	
Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik yang cepat dan berkualitas (44)	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	33,589,882,000	100%	36,948,870,000								70,538,752,000	
				Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur					100%	20,760,621,600	100%	22,902,145,260	100%	25,119,612,311	100%	68,782,379,171		
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Pengecekan dan perbaikan gedung kantor tiap tahun	100%	100%	92,400,000	100%	101,640,000							194,040,000	
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung tempat kerja	Jumlah pemeliharaan dan perbaikan gedung tempat kerja setiap tahun													
				Pengadaan alat-alat besar darat	Jumlah Pengadaan alat-alat besar darat yang tersedia	100%	100%	20,160,000,000	100%	22,176,000,000	1 Unit	765,000,000	2 Unit	841,500,000	3 Unit	900,000,000	44,842,500,000	
				Pengadaan alat angkut apung bermotor	Jumlah Pengadaan alat-alat besar apung yang tersedia	100%	100%	4,600,000,000	100%	5,060,000,000	1 unit	434,500,000	2 unit	477,950,000	3 unit	525,745,000	11,098,195,000	
				Pengadaan alat angkutan darat bermotor	Jumlah Pengadaan alat angkutan darat bermotor yang tersedia	100%	100%	1,346,550,000	100%	1,629,326,000	11 Unit	1,068,000,000	13 Unit	1,174,800,000	15 Unit	1,292,280,000	6,510,956,000	
				Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang tersedia	100%	100%	77,000,000	100%	84,700,000	-		5 Unit	102,487,000	5 Unit	112,735,700	376,922,700	
				Pengadaan alat bengkel bermesin	Jumlah alat bengkel bermesin yang tersedia	100%	100%	2,456,500,000	100%	2,702,150,000	105 Unit	2,892,514,000	220 Unit	3,181,765,400	230 unit	3,499,941,940	14,732,871,340	
				Pengadaan alat bengkel tak bermesin	Jumlah alat bengkel tak bermesin yang tersedia	100%	100%	383,235,000	100%	421,559,000	7 Jenis	491,700,000	7 Jenis	516,285,000	7 Jenis	542,099,250	2,354,878,250	
				Pengadaan alat ukur	Jumlah alat ukur yang tersedia	100%	100%	60,500,000	100%	66,550,000	27 Unit	370,300,000	28 Unit	388,815,000	30 Unit	427,696,500	1,313,861,500	
				Pengadaan alat kantor	Jumlah alat kantor yang tersedia	100%	100%	31,400,000	100%	34,540,000	33 Jenis	196,500,000	35 Jenis	216,150,000	40 Jenis	237,765,000	716,355,000	
				Pengadaan alat rumah tangga	Jumlah alat rumah tangga yang tersedia	100%	100%	62,350,000	100%	68,585,000	34 Jenis	276,700,000	38 Jenis	304,370,000	42 Unit	334,807,000	1,046,812,000	
				Pengadaan komputer	Jumlah komputer yang tersedia	100%	100%	302,250,000	100%	332,475,000	53 Unit	587,200,000	59 Unit	645,920,000	65 Unit	710,512,000	2,578,357,000	
				Pengadaan meja dan kursi kerja/rapat	Jumlah Pengadaan meja kusi kerja rapat yang tersedia	100%	100%	50,000,000	100%	55,000,000	90 Unit	232,300,000	100 Unit	255,530,000	120 Unit	281,083,000	873,913,000	
				Pengadaan alat studio	Jumlah Pengadaan alat studio	100%	100%	66,600,000	100%	73,260,000	25 Unit	258,000,000	30 Unit	283,800,000	35 Unit	312,180,000	993,840,000	
				Pengadaan alat komunikasi	Jumlah alat komunikasi yang tersedia	100%	100%	120,400,000	100%	132,440,000	23 Unit	125,000,000	27 Unit	137,500,000	30 Unit	151,250,000	666,590,000	
				Pengadaan alat keamanan dan perlindungan	Jumlah Pengadaan alat keamanan dan perlindungan yang tersedia	100%	100%	42,120,000	100%	46,332,000	3 Buah	18,000,000	4 Buah	18,900,000	5 Buah	19,845,000	145,197,000	
				Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	100%	100%	40,000,000	100%	44,000,000	1 Unit	40,000,000	1 Unit	42,000,000	1 Unit	44,100,000	210,100,000	
				Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor	Jumlah alat angkutan darat bermotor dalam kondisi baik	100%	100%	2,621,952,000	100%	2,884,147,000	409 Unit	11,801,737,600	420 Unit	12,981,911,360	433 Unit	14,280,102,496	44,569,850,456	
Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor	Jumlah alat kantor dalam kondisi baik	100%	100%	8,150,000	100%	8,965,000	-		10 Unit	10,847,000	15 Unit	11,931,700	39,893,700					
Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga	Jumlah alat rumah tangga dalam kondisi baik	100%	100%	104,500,000	100%	114,950,000	100 Unit	147,000,000	150 Unit	161,700,000	180 Unit	177,870,000	706,020,000					
Pemeliharaan rutin/berkala alat komputer	Jumlah alat komputer dalam kondisi baik	100%	100%	37,075,000	100%	40,783,000	100 Unit	95,000,000	110 Unit	99,750,000	120 Unit	104,737,500	377,345,500					

URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD / BIDANG	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM RPJMD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KERANGKA PENDANAAN DAN REALISASI											
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Akhir Tahun RPJMD	
							Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)
				Pemeliharaan meja dan kursi kerja/rapat	Jumlah meja dan kursi kerja rapat dalam kondisi baik	100%	100%	12,800,000	100%	14,080,000	-	2 Unit	17,036,000	2 Unit	17,887,800	61,803,800		
				Pemeliharaan alat studio	Jumlah alat studio dalam kondisi baik	100%	100%	23,000,000	100%	25,300,000	2 Unit	28,000,000	3 Unit	30,800,000	4 Unit	33,880,000	140,980,000	
				Pemeliharaan alat komunikasi	Jumlah alat komunikasi dalam kondisi baik	100%	100%	5,000,000	100%	5,500,000	10 Unit	7,000,000	11 Unit	7,350,000	11 Unit	8,085,000	32,935,000	
				Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung tempat kerja	Jumlah bangunan gedung tempat kerja yang dipelihara	100%	100%	396,000,000	100%	435,600,000	-	-	-	-	-	#VALUE!		
				Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi	Jumlah perizinan dan sertifikasi yang diadakan	100%	100%	262,200,000	100%	288,200,000	268 Dokumen	650,000,000	275 Dok	715,000,000	290 Dok	786,500,000	2,701,900,000	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	100%	100%	28,100,000	100%	30,910,000	300 Unit	49,470,000	300 Unit	51,943,500	300 Unit	54,540,675	214,964,175	
				Pengadaan aplikasi sistem informasi manajemen (SIM) yang diadakan	Jumlah Aplikasi Sistem informasi manajemen (SIM) yang diadakan	100%	100%	200,000,000	100%	220,000,000	1 aplikasi	186,700,000	1 aplikasi	196,035,000	1 aplikasi	205,836,750	1,008,571,750	
				Pemeliharaan Rutin/berkala Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM)	Jumlah SIM yang terupdate						1 Software	40,000,000	1 Software	42,000,000	1 Software	46,200,000	128,200,000	
Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik yang cepat dan berkualitas (44)	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% Capaian Kinerja yang termuat dalam Citizen Charter	100%	100%	2,236,740,000	100%	2,710,851,000	100%	3,119,916,600					8,067,507,600		
				% capaian Kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah							100%	3,229,047,430	100%	3,408,378,152	100%	6,637,425,582		
			Penyusunan LAKIP	Tersedianya dokumen LAKIP SKPD sebanyak 15 eksemplar setiap tahunnya	100%	100%	25,000,000	100%	27,500,000									52,500,000
				Jumlah dokumen LAKIP-OPD yang tersedia						1 Dokumen	45,000,000	1 Dokumen	47,250,000	1 Dokumen	49,612,500	3 Dokumen	141,862,500	
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun serta Perhitungan Penyusutan Asset SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun serta asset 15 eksemplar tiap tahun	100%	100%	80,000,000	100%	88,000,000									168,000,000
				Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun serta asset yang tersedia						15 Dokumen	37,500,000	15 Dokumen	39,375,000	15 Dokumen	41,343,750	45 Dokumen	118,218,750	
			Penyusunan Dokumen penetapan Kinerja kota Makassar	laporan dokumen penetapan Kinerja sebanyak 15 eksemplar tiap tahunnya	100%	100%	15,000,000	100%	16,500,000									31,500,000
			Penyusunan Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun						1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,750,000	1 Dokumen	17,325,000	3 Dokumen	48,075,000	
			Pengelolaan keuangan SKPD	Tersedianya laporan pengelolaan keuangan SKPD sebanyak 25 eksemplar setiap tahunnya	100%	100%	725540000	100%	798094000									1,523,634,000
				Jumlah laporan pengelolaan keuangan-OPD yang tersedia setiap tahunnya						25 Dokumen	1,197,200,000	25 Dokumen	1,257,060,000	25 Dokumen	1,319,913,000	75 Dokumen	3,774,173,000	
Peningkatan Kinerja				Tersedianya dokumen pelayanan dan administrasi		100%	100%	106,400,000	100%	117,040,000						223,440,000		

URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD / BIDANG	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM RPJMD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KERANGKA PENDANAAN DAN REALISASI											
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Akhir Tahun RPJMD	
							Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)
				Pelayanan dan Administrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi yang tersedia					1 Dokumen	116,400,000	1 Dokumen	122,220,000	1 Dokumen	128,331,000	3 Dokumen	366,951,000	
				Penyusunan RKA-SKPD	Tersedianya laporan penyusunan RKA- SKPD (pokok dan perubahan) sebanyak 30 eksemplar setiap tahunnya	100%	100%	30,000,000	100%	33,000,000							63,000,000	
					Jumlah dokumen RKA yang tersedia dalam setahun					2 Dokumen	80,750,000	2 Dokumen	84,787,500	2 Dokumen	89,026,875	6 Dokumen	254,564,375	
				Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya laporan penyusunan DPA- SKPD (pokok dan perubahan) sebanyak 30 eksemplar setiap tahunnya	100%	100%	15,000,000	100%	16,500,000							31,500,000	
					Jumlah dokumen DPA yang tersedia dalam setahun					2 Dokumen	74,550,000	2 Dokumen	78,277,500	2 Dokumen	82,191,375	6 Dokumen	235,018,875	
				Penyusunan Renja SKPD	Tersedianya dokumen Renja sebanyak 20 eksemplar setiap tahunnya	100%	100%	50,000,000	100%	55,000,000							105,000,000	
					Jumlah dokumen Renja-OPD yang tersedia					1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	78,750,000	1 Dokumen	82,687,500	3 Dokumen	236,437,500	
				Penyusunan Renstra-SKPD	Tersedianya dokumen Renstra SKPD 2014-2019 sebanyak 30 eksemplar setiap tahunnya	60%	-	-	-	-							-	
					Jumlah dokumen Renstra-OPD yang tersedia					1 Dokumen	75,000,000	-	-	-	1 Dokumen	75,000,000		
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan sekretariat untuk 4 Bidang dan 2 UPTD	80%	100%	429,900,000	100%	471,900,000							901,800,000	
					Jumlah Dokumen Hasil Monev, Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada sekretariat untuk 4 bidang dan 2 uptd yang tersedia tiap bulan					12 Dokumen	325,557,800	12 Dokumen	341,835,690	12 Dokumen	358,927,475	36 Dokumen	1,026,320,965	
				Penyusunan realisasi fisik keuangan	Tersedianya laporan realisasi fisik keuangan setiap bulan sebanyak 10 eksemplar	100%	100%	235,932,000	100%	259,525,000							495,457,000	
					Jumlah Dokumen realisasi fisik dan keuangan yang tersedia					4 Dokumen	325,540,000	4 Dokumen	341,817,000	4 Dokumen	375,998,700	12 Dokumen	1,043,355,700	
				Publikasi perkembangan/kemajuan pembangunan	Tersedianya Publikasi perkembangan/kemajuan pembangunan	100%	100%	338,050,000	100%	426,855,000							764,905,000	
					Jumlah kegiatan publikasi perkembangan kemajuan pembangunan selama setahun					36 Media	637,700,000	36 Media	701,470,000	36 Media	736,543,500	108 Media	2,075,713,500	
				Penyusunan standar harga satuan ke PU-an	Tersedianya standar harga satuan ke PU-an	100%	100%	108,618,000	100%	119,480,000							228,098,000	
					Jumlah dokumen sebagai acuan dalam Penyusunan harga satuan ke PU-an					1 Dokumen	114,718,800	1 Dokumen	120,454,740	1 Dokumen	126,477,477	3 Dokumen	361,651,017	
BIDANG JALAN DAN JEMBATAN	Meningkatkan mutu Infrastruktur pekerjaan umum dalam bidang pembangunan	Meningkatnya kualitas layanan jalan dan jembatan	Cakupan ketersediaan jalan dan jembatan yang terbaharu	Program pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah panjang jalan dan jembatan yang dibangun	0 KM, 3 Buah	0 KM, 2 Buah	78,680,854,000	0 KM, 2 Buah	101,172,555,000						0 KM, 4 Buah	179,853,409,000	
					Jumlah panjang jalan yang dibangun					3 Km	7,703,441,400	2,2 Km	8,300,000,000	2,6 Km	9,100,000,000	7,8 KM	25,103,441,400	
					Jumlah jembatan yang dibangun					4 Buah		3 buah		3 buah		10 Buah		

URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD / BIDANG	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM RPJMD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KERANGKA PENDANAAN DAN REALISASI												
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Akhir Tahun RPJMD		
							Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	
dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta				Perencanaan pembangunan jalan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan	1 Buah	2 Buah	300,192,000	2 Buah	330,211,000							630,403,000		
				Perencanaan pembangunan jembatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jembatan	2 Buah	2 Buah	329,997,000	2 Buah	362,997,000									692,994,000
				Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	3 Buah	2 Buah	3,991,200,000	2 Buah	4,390,320,000	4 Buah	4,659,297,400	3 Buah	5,000,000,000	3 buah	5,500,000,000			23,540,817,400
				Pembangunan Jalan	Jumlah jalan yang dibangun	0	0 KM		0 KM			0							-
				Pembangunan Jalan (Hibah kepada Masyarakat / Pihak Ketiga)	ruas Jalan yang terbangun untuk di Hibahkan (Yang tidak termasuk Aset Pemkot)						3 Ruas	3,044,144,000	3 Ruas	3,300,000,000	3 Ruas	3,600,000,000			9,944,144,000
				Pengukuran dan pematokan jalan	Jumlah laporan pengukuran dan pematokan jalan	1 Laporan	1 Laporan	264,515,000	1 Laporan	290,967,000									555,482,000
				Penyusunan /perencanaan program jalan dan jembatan	Jumlah dokumen usulan program jalan dan jembatan	1 Laporan	1 Laporan	111,589,000	1 Laporan	122,748,000									234,337,000
				Penyusunan Data Base Jalan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi	1 Dokumen	12 Dokumen	647,250,000	12 Dokumen	711,975,000									1,359,225,000
				Cakupan jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Program pemeliharaan jalan dan jembatan yang diperbaiki	Jalan Kota = 25 KM	25 Km	118,551,322,000	50 Km	166,468,801,000	20 Km	165,196,760,500	25 Km	174,956,598,525	25 Km	183,704,428,451	75 Km	808,877,910,476	
							0 Buah	0 Buah	0 Buah	1 Buah	2 Buah	2 Buah	5 Buah						
				Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jumlah dokumen perencanaan rehab/pemeliharaan jalan	1 Buah	1 Buah	423,461,000	1 Buah	465,807,000									889,268,000
				Rehabilitasi (pemeliharaan jalan DAK & Pendamping DAK TA.2010-2012)	Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara	0	1 paket	1,509,562,000	-										1,509,562,000
				Pembangunan trotoar	Panjang Trotoar Yang Di Bangun	0	0,5 Km	15,334,303,000	0,5 Km	16,867,733,000	4,5 Km	47,765,634,500	4,5 km	50,153,916,225	4,5 km	52,661,612,036			182,783,198,761
				Pemeliharaan Jalan Kota	Jumlah Ruas Jalan Kota Yang Terpelihara	110 Ruas	100 Ruas	10,858,800,000	100 Ruas	11,944,680,000	100 Ruas	10,500,000,000	100 Ruas	11,025,000,000	100 Ruas	11,576,250,000			55,904,730,000
				Inspeksi Jalan Kota	Jumlah Dokumen Hasil Inspeksi Jalan Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	292,044,000	1 Dokumen	321,248,000	14 Dokumen	71,000,000	14 Dokumen	74,550,000	14 Dokumen	78,277,500			837,119,500
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan (DAK)	Jumlah Ruas Jalan Yang ditingkatkan Menggunakan Sumber Dana DAK						4 Ruas	21,500,000,000	4 Ruas	22,575,000,000	4 Ruas	23,703,750,000			67,778,750,000
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar	Panjang trotoar yang dipelihara	0	0,5 Km	3,152,205,000	0,5 Km	3,467,426,000									6,619,631,000
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan APBD II	Jumlah Ruas Jalan Yang Memiliki Trotoar Dalam Kondisi Baik						2 Ruas	450,000,000	2 Ruas	472,500,000	2 Ruas	496,125,000			1,418,625,000
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan APBD II	Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara	28,428 Km	25 Km	78,670,588,000	25 Km	86,537,647,000									165,208,235,000
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan APBD II	Jumlah Ruas Jalan Yang ditingkatkan Menggunakan Sumber Dana APBD						29 Ruas	75,800,000,000	30 Ruas	79,590,000,000	32 Ruas	83,569,500,000			238,959,500,000
Penataan Simpang Jalan	Jumlah Titik Simpang Jalan yang ditingkatkan	3 Titik	3 Titik	2,000,000,000	3 Titik	2,200,000,000	7 Titik	1,500,000,000	7 Titik	1,575,000,000	7 Titik	1,653,750,000			8,928,750,000				
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DEBT SWAP)	Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara	1,483 Km	2,5 Km	7,116,473,000	2,5 Km	7,828,120,000									14,944,593,000				
Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR)	Jumlah dokumen lalu lintas harian rata-rata	1 Dokumen	-		1 Dokumen	385,000,000									385,000,000				
Rehabilitasi / Pemeliharaan Median Jalan (Baru)	Jumlah Ruas Jalan Yang Memiliki Median Jalan dalam Kondisi Baik						-		3 Ruas	1,000,000,000	3 Ruas	1,050,000,000			2,050,000,000				

URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD / BIDANG	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM RPJMD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KERANGKA PENDANAAN DAN REALISASI											
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Akhir Tahun RPJMD	
							Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)
				Penataan Taman-taman vertikal untuk desain lorong-lorong	Jumlah laporan hasil pendataan taman vertikal untuk lorong		-		14 Dokumen	2,000,000,000							2,000,000,000	
				Pelatihan PNPM-P2KP	Jumlah peserta Pelatihan PNPM-P2KP		300 Orang	300,000,000	200 orang	323,854,000							623,854,000	
				Pematangan lahan kawasan pemukiman prioritas	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun		1 Dokumen	4,980,000,000	1 Dokumen	5,478,000,000							10,458,000,000	
				Penataan Kaki Lima Kota Makassar	Jumlah lokasi tempat berjualan penataan kaki lima yang tertata di Kota Makassar		Lokasi	532,873,000	Lokasi	586,160,000	4 Lokasi	34,348,352,350					35,467,385,350	
				Sosialisasi Neighborhood Upgrading And Shelter Project Phase	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Neighborhood Upgrading And Shelter Project Phase-2 (NSUP-2)		300 orang	300,000,000	200 orang	323,854,000	185 Orang	382,774,200					1,006,628,200	
				BOP LCO dan Fasilitasi Kegiatan NSUP 2	Jumlah dokumen kawasan kumuh yang tertangani Jumlah ruas kegiatan BOP LCO dan fasilitas kegiatan NSUP-2 yang terlaksana		5 Dok	1,504,200,000	5 Dok	1,654,620,000							3,158,820,000	
				Pelatihan Kotaku	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Kotaku		-	-	-	-	190 Orang	354,769,900					354,769,900	
				Dana BOP KOTAKU dan Penataan Lingkungan Pemukiman berbasis Komunal (PLPBK)	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan P2KO dari PJOK tiap Kecamatan setiap bulan Jumlah ruas BOP KOTAKU dan Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunal (PLBK) yang terlaksana		168 Dok	1,300,000,000	168 Dok	1,430,000,000							2,730,000,000	
				Pengadaan Utilitas penunjang pada Fasilitas Umum (Keg. Baru)	Jumlah titik lampu sorot yang terpasang		-	-	-	-			24 Titik	4,000,000,000			4,000,000,000	
BIDANG PRASARANA DAN BANGUNAN	Meningkatkan kualitas infrastruktur bangunan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana gedung pemerintah yang layak	Persentase Cakupan Ketersediaan gedung pemerintah yang layak	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah Daerah	Jumlah bangunan pemerintah yang terbangun					6 unit			7 unit		8 unit	21 Unit	215,148,022,587	
					Jumlah bangunan pemerintah yang direhabilitasi				22 unit	36,696,238,100	23 unit	83,166,522,270	24 unit	95,285,262,217	69 Unit			
				Pembangunan Gedung Pemerintah	Jumlah Gedung Pemerintah yang dibangun	0			6 unit	2,065,524,900	7 unit	15,000,000,000	8 unit	20,000,000,000	21 unit	37,065,524,900		
				Pembangunan Gedung Pemerintah (Hibah)	Jumlah Gedung Pemerintah yang dibangun (Hibah)						2 Unit	7,100,000,000	2 Unit	7,455,000,000	4 Unit	14,555,000,000		
				Rehabilitasi / pemeliharaan sedang/berat bangunan milik Pemerintah	Jumlah bangunan milik pemerintah yang direhabilitasi	0			22 unit	23,183,380,500	23 unit	12,000,000,000	24 unit	14,000,000,000	69 unit	49,183,380,500		
				Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung tempat kerja	Jumlah pemeliharaan dan perbaikan gedung tempat kerja setiap tahun						1 Unit	1,014,000,000	1 Unit	1,064,700,000	2 Unit	2,078,700,000		
				Pemantauan bangunan gedung Pemerintah	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang dipantau	0			15 Unit	261,637,800	15 Unit	300,000,000	15 Unit	330,000,000	45 unit	891,637,800		
				Taksasi bangunan gedung/umah sarana dan prasarana umum	Bangunan gedung/umah sarana dan prasarana umum yang ditaksasi	0			20 unit	163,456,500	25 unit	250,000,000	30 unit	275,000,000	75 unit	688,456,500		

URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD / BIDANG	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM RPJMD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KERANGKA PENDANAAN DAN REALISASI												
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Akhir Tahun RPJMD		
							Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	
				Rehabilitasi sedang/berat gedung (hibah kepada masyarakat/pihak ketiga)	Jumlah gedung yang direhabilitasi	0				2 unit	2.033,512,000	1 unit	1.500,000,000	1 unit	1.750,000,000	4 unit	5.283,512,000		
				Rehabilitasi sedang/berat Prasarana Pemerintah	Jumlah Prasarana Pemerintah yang di Rehabilitasi	0				2 unit	4.291,783,400	1 unit	2.000,000,000	1 unit	2.200,000,000	4 unit	8.491,783,400		
				Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Prasarana dan bangunan pemerintah	Jumlah aplikasi Sistem Penyimpanan Data dan Informasi bidang prasarana dan bangunan pemerintah	0			0	-	1 Aplikasi	200,000,000	1 Aplikasi (pengembangan)	220,000,000	1 Aplikasi	420,000,000			
				Penataan Kaki Lima Kota Makassar	Jumlah lokasi tempat berjualan penataan kaki lima yang tertata di Kota Makassar	0			0	-	4 Lokasi	37,783,187,585	4 Lokasi	41,561,506,344	4 Lokasi	79,344,693,929			
				Penataan Anjungan Pantal Losari	Jumlah Lokasi Anjungan Pantal Losari tertata				0	-	4 Lokasi	1,087,544,535	4 Lokasi	1,250,676,215	8 Lokasi	2,338,220,750			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Multimedia Gedung Pemerintah	Jumlah Sarana dan Prasarana Multimedia Gedung pemerintah yang tersedia				1 Paket	4,696,943,000	1 Paket	4,931,790,150	1 Paket	5,178,379,658	3 Paket	14,807,112,808			
Meningkatkan kualitas Infrastruktur cakupan air bersih dan pelayanannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih yang aman	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih	Jumlah titik sarana prasarana air bersih yang terbangun	8 titik	8 titik	4,370,064,000	8 titik	15,090,471,000	8 Titik	11,768,146,300	8 Titik	16,442,463,950	8 Titik	19,052,737,148	40 Titik	66,723,882,398		
				Jumlah Rumah Tangga kumuh/miskin yang terjangkau air bersih			11402 SR	1377 SR	1377 SR								14733 SR		
			Pembangunan Sarana & Prasarana Air Bersih	Jumlah sarana & prasarana air bersih yang terbangun	12 unit (data 2008-2013)	2 Unit	15,000,000,000	2 Unit	1,650,000,000	8 unit	10,374,299,000	8 unit	10,893,013,950	8 unit	11,437,664,648	28 unit	49,354,977,598		
			Sosialisasi Sarana & Prasarana Air Bersih	Jumlah lokasi pelaksanaan sosialisasi air bersih	0	1 Kegiatan	71,250,000	1 Kegiatan	78,375,000										149,625,000
				Jumlah Peserta sosialisasi sarana dan prasarana air bersih	0			400 orang	251,670,900	400 orang	150,000,000	400 orang	157,500,000	1200 orang	559,170,900				
			Inspeksi kondisi sarana dan prasarana air bersih	Jumlah laporan hasil pendataan kondisi sarana dan prasarana air bersih		1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	110,000,000										210,000,000
			Pemeliharaan sarana dan prasarana Air Bersih	Jumlah titik lokasi sarana dan prasarana dalam kondisi baik		5 titik	487,170,000	5 titik	535,887,000										1,023,057,000
				Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dipelihara	0			0	-						5 unit	892,500,000	5 unit	892,500,000	
			Lomba Pengelolaan Air Bersih di Tingkat Masyarakat	Jumlah pemenang lomba pengelolaan Air Bersih tingkat masyarakat	0	0		3 Pemenang	200,000,000	3 Pemenang	177,945,350	6 Pemenang	195,700,000	6 Pemenang	205,485,000	18 Pemenang	779,130,350		
			Pendataan Sumber Air Masyarakat	Jumlah Kecamatan tempat pendataan sumber air bersih	0	2 Kecamatan	100,000,000	2 Kecamatan	110,000,000	-									210,000,000
			Pelatihan pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Jumlah Peserta Pelatihan Sarana dan Prasarana Air Bersih	0	-		50 Orang	300,000,000	0	-	200 orang	200,000,000	200 orang	210,000,000	450 orang	710,000,000		
			Pengujian kualitas air pada sarana pengelolaan air bersih	Jumlah sarana prasarana air bersih yang diuji kualitas airnya	0			0	-	5 titik	100,000,000	5 titik	105,000,000	10 titik	205,000,000				
			Penguatan kelembagaan Badan Pengelolaan Air Bersih	Jumlah Badan Pengelola Air Bersih bermasalah dapat diberdayakan aktif dan mandiri	0	-		10 kelembagaan	150,000,000	10 kelembagaan	189,452,150	10 kelembagaan	209,000,000	10 kelembagaan	219,450,000	40 kelembagaan	767,902,150		

URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD / BIDANG	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM RPJMD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KERANGKA PENDANAAN DAN REALISASI											
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Akhir Tahun RPJMD	
							Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)
				Dana pendamping program Hibah Sanitasi Kota Makassar	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang terbangun	0	1 Kegiatan	248,000,000	1 Kegiatan	297,600,000							545,600,000	
				Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (program Hibah Sanitasi Kota Makassar)	Jumlah operasional pembangunan infrastruktur hibah sanitasi kota Makassar							10 bulan	370,000,000	10 bulan	388,500,000		758,500,000	
				Pembangunan Infrastruktur Sanitasi IPAL Komunal Berbasis Masyarakat	Infrastruktur Sanitasi IPAL Komunal Berbasis Masyarakat yang terbangun	0	3 Lokasi	2,575,350,000	3 Lokasi	3,090,420,000	0	0	5 unit	3,250,000,000	5 unit	3,412,500,000	12,328,270,000	
				Dana Pendamping Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (DAK)	jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang terbangun	0	1 Lokasi	586,200,000	1 Lokasi	703,440,000							1,289,640,000	
				Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (DAK)	Jumlah titik Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (DAK)	0						10 titik	700,000,000	12 titik	900,000,000		1,600,000,000	
				Sarana dan prasarana sanitasi (DAK reguler)	jumlah lokasi pembangunan Sarana dan prasarana sanitasi (DAK reguler)							4 lokasi	2,621,350,000	4 lokasi	2,752,417,500		5,373,767,500	
				Sarana dan prasarana sanitasi (DAK penugasan)	jumlah lokasi pembangunan Sarana dan prasarana sanitasi (DAK penugasan)							13 lokasi	8,171,325,000	13 lokasi	8,579,891,250		16,751,216,250	
				Penyusunan Regulasi pengelolaan air limbah	Jumlah draft regulasi yang tersusun		1 Regulasi	250,000,000	1 Regulasi	275,000,000							525,000,000	
				Pembangunan Sarana & Prasarana Pengelolaan Industri Rumah Tangga	Infrastruktur Sarana & Prasarana Pengelolaan Industri Rumah Tangga yang terbangun	0	2 Lokasi	1,500,000,000	2 Lokasi	1,800,000,000	0	0	2 unit	1,500,000,000	2 unit	1,575,000,000	6,375,000,000	
				Pembangunan Infrastruktur Sanitasi IPAL Kawasan	Jumlah infrastruktur Sanitasi IPAL kawasan yang terbangun	0	5 Lokasi	8,022,800,000	5 Lokasi	9,627,360,000							17,650,160,000	
				Pembangunan Jaringan IPAL Sambungan Rumah	Jaringan IPAL Sambungan Rumah yang terbangun	0	250 SR	750,000,000	250 SR	900,000,000	0	0	120 SR	650,000,000	120 SR	682,500,000	2,982,500,000	
				Rehabilitasi IPAL Komunal berbasis masyarakat	Jumlah IPAL Komunal berbasis masyarakat yang direhabilitasi				6 unit	1,500,000,000	3 unit	520,156,500	12 unit	2,100,000,000	12 unit	2,205,000,000	6,325,156,500	
				Rehabilitasi IPAL Kawasan	Jumlah IPAL kawasan yang direhabilitasi		4 unit	1,000,000,000	5 unit	1,200,000,000	0		2 unit	550,000,000	2 unit	577,500,000	3,327,500,000	
				Pembangunan Sanitasi (DAK dan dana pendamping DAK TA.2011)	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	0	1 Laporan	204,010,000									204,010,000	
				Pembangunan IPAL Kantor Pemerintahan	Jumlah IPAL kantor pemerintahan yang terbangun	0					0	0	3 unit	2,000,000,000	3 unit	2,100,000,000	4,100,000,000	
				Pembangunan Infrastruktur Sanitasi skala individual (septic tank)	Jumlah Tangki septic berstandar untuk masyarakat	0					0	0	100 unit	1,050,000,000	100 unit	1,102,500,000	2,152,500,000	
				Inspeksi sarana prasarana sanitasi dan air bersih	Lokasi pelaksanaan inspeksi sarana prasarana sanitasi dan air bersih	0					0	0	15 kec.	350,000,000	15 kec.	367,500,000	717,500,000	
				Pembangunan IPAL Losari	Jumlah Lokasi pekerjaan pembangunan IPAL losari	0					1 Lokasi	10,101,367,300	1 Lokasi	5,000,000,000	1 Lokasi	5,250,000,000	20,351,367,300	
BIDANG PSDA DAN DRAINASE	Meningkatkan kualitas pengendalian banjir secara berkelanjutan	Meningkatnya kualitas drainase berkelanjutan	Cakupan titik genangan yang di tangani		Jumlah titik genangan yang dikurangi tinggi, luas dan lama genangan	34 Titik Genangan	1 Titik Genangan dikurangi		2 Titik Genangan dikurangi		5 Titik Genangan dikurangi		5 Titik Genangan dikurangi		5 Titik Genangan dikurangi		24 Titik Genangan	

URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD / BIDANG	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM RPJMD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KERANGKA PENDANAAN DAN REALISASI											
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Akhir Tahun RPJMD	
							Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)
Banjir secara terpadu dalam peningkatan kualitas drainase/gorong-gorong pada bidang bangunan air untuk mewujudkan Makassar Kota Dunia yang aman dan nyaman untuk semua	perkotaan	% penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah panjang dan % box culvert yang terpasang dan berfungsi sebagai sarana integrasi utilitas	0	15 Km	35,361,698,000	15 Km	29,231,291,000		36,947,644,800		37,802,051,595		39,692,154,175	3.8 Km	179,034,839,570	
				Jumlah Panjang Box Culvert yang terpasang	0			15 Km		15 Km		15 Km		45 Km				
			Perencanaan dan pengawasan teknis Pembangunan Drainase	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan drainase yang tersedia		8 Dokumen	4,083,000,000	8 Dokumen	3,524,660,000								16 Dokumen	7,607,660,000
			Inspeksi Kondisi Drainase	Jumlah dokumen Kondisi Drainase yang tersusun		1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	330,000,000	1 Dokumen	180,405,700	1 Dokumen	189,425,985	1 Dokumen	198,897,284	5 Dokumen	1,198,728,969	
			Pembangunan Drainase Perkotaan	Jumlah Panjang Drainase Perkotaan yang terbangun	563 Km drainase yang berfungsi dengan baik	15 Km	32,497,214,000	30 Km	35,746,935,000	28 Km	35,821,548,200	28 Km	37,612,625,610	28 Km	39,493,256,891	129 Km	181,171,579,701	
			Penataan Anjungan Pantai Losari	Jumlah Lokasi Anjungan Pantai Losari tertata		1 Lokasi	1,700,000,000	1 Lokasi	1,870,000,000	4 Lokasi	945,690,900					6 Lokasi	4,515,690,900	
			Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	50 % Panjang Saluran yang berfungsi dengan baik dari total panjang saluran (3.234 KM)	20% Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik	10 %	27,902,138,000	10 %	29,127,259,000	10 %	36,947,644,800	10 %	38,795,027,040	10 %	40,734,778,392	50%	173,506,847,232	
			Rehabilitasi Saluran Drainase / Gorong-gorong	Panjang saluran sekunder dan tersier yang direhab		40 Km	9,103,550,000	40 Km	10,013,905,000	30 km	18,534,256,000	30 km	19,460,968,800	30 km	20,434,017,240	170 km	77,546,697,040	
			Gerakan Bersih Saluran Drainase (GBSD)	Jumlah kegiatan Sosialisasi Pengendalian Pekerjaan Penutupan saluran yang terlaksana		1 Kegiatan	182,000,000	1 Kegiatan	200,200,000							1 Kegiatan	382,200,000	
				Jumlah lokasi / kelurahan kegiatan GBSD Kota Makassar						10 lokasi	372,130,000	10 lokasi	390,736,500	10 lokasi	410,273,325	30 lokasi	1,173,139,825	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang saluran yang berfungsi optimal		70 km	14,828,599,000	70 km	16,311,459,000	70 km	18,041,258,800	70 km	18,943,321,740	70 km	19,890,487,827	350 km	88,015,126,367	
			Program pengendalian banjir	24 Rumah Pompa dan Pintu Air	8 Unit bangunan Ruang pompa dan Pintu air sudah terbangun	3 Bangunan	4,543,499,000	3 Bangunan	10,310,789,000	3 Bangunan	16,917,298,100		3 Bangunan	17,760,698,465	4 Bangunan	18,804,031,975	18 Bang.	68,336,316,540
				Panjang kanal yang di normalisasi/dikeruk dan diperbaiki		7 km		7 km	10 km	10 km		10 km		10 km		44 KM		
			Normalisasi / Pengerukan Kanal Kota Makassar	Panjang kanal yang di normalisasi/dikeruk dan diperbaiki	16,4 Km panjang saluran kanal yang telah terbangun s/d tahun 2013	16,4 Km	2,462,140,000	16,4 Km	2,708,354,000	10 km	1,272,530,500	10 km	1,336,157,025	10 km	1,402,964,876	62,8 km	9,182,146,401	
Rehabilitasi dan penataan kanal			7 Km	10,018,400,000	14 Km	11,020,240,000							21 Km	21,038,640,000				

URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD / BIDANG	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM RPJMD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KERANGKA PENDANAAN DAN REALISASI															
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Akhir Tahun RPJMD					
							Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)				
				Pembangunan Rumah Pempa & Pintu Air	Jumlah Rumah Pempa dan Pintu Air yang terbangun		3 unit	1,000,000,000	3 unit	1,100,000,000	3 unit	2,404,963,000	3 unit	2,525,211,150	4 unit	2,777,732,265	16 unit	9,807,906,415				
				Operasional Pengelolaan Pintu Air	Jumlah Rumah Pempa dan Pintu Air dalam keadaan baik dan berfungsi optimal		8 unit	100,200,000	14 unit	252,000,000	17 unit	252,504,600	20 unit	290,380,290	24 unit	333,937,334	83 unit	1,229,022,224				
				Rehabilitasi Sedang / Berat Dermaga	Jumlah Dermaga yang direhabilitasi		1 demaga	1,000,000,000	1 demaga	1,100,000,000	1 demaga	788,300,000	1 demaga	800,000,000	1 demaga	840,000,000	5 demaga	4,528,300,000				
				Penyusunan / Perencanaan Program Drainase	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun		1 Dokumen	152,616,000	1 Dokumen	167,878,000							2 Dokumen	320,494,000				
				Pembangunan Tanggul dan Talud	Panjang tanggul dan talud yang dibangun						350 meter	4,363,500,000	350 meter	4,581,675,000	350 meter	4,810,758,750	1,050 meter	13,755,933,750				
				Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Pempa dan Pintu Air	Jumlah Rumah Pempa dan Pintu Air yang diperbaiki		2 Unit	419,050,000	2 Unit	460,955,000	4 unit	835,500,000	4 unit	877,275,000	4 unit	921,138,750	16 unit	3,513,918,750				
				Pembangunan Kolan Resapan dan Kolan Retensi	Jumlah Kolan Resapan yang dibangun						5 Aqua Pound dan 1 Kolan Retensi	7,000,000,000	5 Aqua Pound dan 1 Kolan Retensi	7,350,000,000	5 Aqua Pound dan 1 Kolan Retensi	7,717,500,000	15 Aqua Pound dan 3 Kolan Retensi	22,067,500,000				
BIDANG BINA TEKNIK	Tercapainya Peningkatan Kapasitas dan Kinerja yang akuntabel	Tersedianya dokumen perencanaan, pengawasan teknis dan layanan ijin usaha jasa konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja	Persentase tersedianya layanan ijin usaha jasa konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja	Program Bina Teknis	% Dokumen Perencanaan Teknis yang dilaksanakan	0%					100%			100%			100%					
					% titik pengawasan teknis yang terlaksana	0%				100%	27,207,220,150		100%	30,460,513,108		100%	32,007,638,918		100%	89,675,372,175		
					% Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi	0%				100%			100%			100%			100%			
				Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Air dan Drainase	Jumlah Dokumen perencanaan teknis pembangunan Bangunan Air dan Drainase yang tersedia						25 Dokumen	4,549,989,000	25 Dokumen		4,777,488,450	25 Dokumen		5,016,362,873	75 Dokumen	14,343,840,323		
				Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen perencanaan teknis pembangunan Jalan dan Jembatan yang tersedia						25 Dokumen	6,645,000,000	25 Dokumen		6,977,250,000	25 Dokumen		7,326,112,500	75 Dokumen	20,948,362,500		
				Perencanaan Teknis Pembangunan UPTD	Jumlah Dokumen perencanaan teknis dalam pembangunan yang dilakukan UPTD						2 dokumen	177,171,800	2 dokumen		186,030,390	2 dokumen		195,331,910	6 Dokumen	558,534,100		
				Pengukuran dan Pematokan Jalan	Jumlah Laporan Hasil pengukuran dan pematokan jalan						1 Dokumen	413,543,000	1 Dokumen		434,220,150	1 Dokumen		455,931,158	3 Dokumen	1,303,694,308		
				Penyerasian Program Keciptakarya dalam RPLJM	Jumlah Dokumen keciptakarya yang mengacu pada RPLJM						1 Dokumen	111,361,300			-	-		-			111,361,300	
				Penyusunan DED Penanganan Lingkungan dan Pemukiman Kumuh (NUSP dan KOTAKU)	Jumlah dokumen DED tentang penanganan lingkungan dan pemukiman kumuh (NUSP dan KOTAKU)						5 Dokumen	200,083,000			-	-		-				200,083,000
				Pembuatan Indeks Harga Satuan	Jumlah Dokumen sebagai acuan dalam penentuan harga satuan bahan						1 Dokumen	159,752,100	1 Dokumen		167,739,705	1 Dokumen		176,126,690	3 Dokumen	503,618,495		
Review Desain Gedung Pemerintah mengacu Konsep Green Building	Jumlah dokumen hasil review desain gedung pemerintah yang telah mengacu pada konsep green building						1 Dokumen	316,144,500	1 Dokumen		331,951,725	1 Dokumen		348,549,311	3 Dokumen	996,645,536						
Sayembara Desain Gedung Pemerintah	Jumlah desain gedung pemerintah yang mengikuti sayembara						1 Dokumen	432,660,700			-	-		-			1 Dokumen	432,660,700				

URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD / BIDANG	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM RPJMD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KERANGKA PENDANAAN DAN REALISASI											
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Akhir Tahun RPJMD	
							Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)
				Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Pemerintah	Jumlah Dokumen perencanaan teknis pembangunan Gedung Pemerintah yang terpenuhi					47 Dokumen	2.420.920,800	47 Dokumen	2.541.966,840	47 Dokumen	2.669.065,182	141 Dokumen	7.631.952,822	
				Penyusunan Dokumen Lingkungan	Jumlah dokumen lingkungan yang tersusun					-	-	5 Dokumen	500.000,000	5 Dokumen	525.000,000	10 Dokumen	1.025.000,000	
				Penyusunan <i>Leger</i> Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen <i>Leger</i> dan Jembatan yang tersusun					-	-	1 Dokumen	850.000,000	1 Dokumen	892.500,000	2 Dokumen	1.742.500,000	
				Review dan Penyerasian Hasil Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Masyarakat yang terakomodir menjadi skala prioritas					-	-	200 Usulan	150.000,000	210 Usulan	165.000,000	410 Usulan	315.000,000	
				Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen pengawasan pembangunan drainase perkotaan yang tersusun					14 Dokumen	2.228.077,200	14 Dokumen	2.339.481,060	14 Dokumen	2.456.455,113	42 Dokumen	7.024.013,373	
				Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen pengawasan pembangunan jalan dan jembatan yang tersusun					26 Dokumen	3.274.413,000	26 Dokumen	3.438.133,650	26 Dokumen	3.610.040,333	78 Dokumen	10.322.586,983	
				Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan UPTD	Jumlah dokumen pengawasan teknis pembangunan UPTD yang tersusun					2 Dokumen	481.419,000	2 Dokumen	505.489,950	2 Dokumen	530.764,448	6 Dokumen	1.517.673,398	
				Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Pemerintah	Jumlah dokumen pengawasan teknis pembangunan gedung pemerintah yang tersusun					18 Dokumen	3.234.118,000	18 Dokumen	3.395.823,900	18 Dokumen	3.565.615,095	54 Dokumen	10.195.556,995	
				Pengawasan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMJJA)	Jumlah Rekomendasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMJJA) dikeluarkan					-	-	100 Rekomendasi	350.000,000	100 Rekomendasi	367.500,000	200 Rekomendasi	717.500,000	
				Penyusunan Laporan Penataan Pengelolaan Dampak Lingkungan	Jumlah laporan penataan pengelolaan dampak lingkungan yang tersusun					-	-	5 Dokumen	500.000,000	5 Dokumen	525.000,000	10 Dokumen	1.025.000,000	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang ke Pu-an	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan					180 Orang	297.255,000					180 Orang	297.255,000	
				Bimbingan Teknis Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan teknis panitia/ pejabat penerima hasil pekerjaan					175 orang	296.995,000	175 orang	311.844,750	175 orang	327.436,988	525 Orang	936.276,738	
				Bimbingan Teknis Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan teknis perencanaan pengadaan barang dan jasa					180 Orang	301.821,000	180 Orang	332.003,100	180 Orang	365.203,410	540 Orang	999.027,510	
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ke PU-an	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ke - PU-an					175 orang	302.991,500	175 orang	318.141,075	175 orang	334.048,129	525 Orang	955.180,704	
				Workshop Penyusunan Dokumen Pengadaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang mengikuti workshop penyusunan dokumen pengadaan konstruksi					180 Orang	301.194,000	180 Orang	316.253,700	180 Orang	332.066,385	540 Orang	949.514,085	
				Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pengawasan ke - PU-an	Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan teknis perencanaan dan pengawasan ke- PU-an					180 Orang	301.988,500	180 Orang	317.087,925	180 Orang	332.942,321	540 Orang	952.018,746	

URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD / BIDANG	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM RPJMD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KERANGKA PENDANAAN DAN REALISASI											
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Akhir Tahun RPJMD	
							Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)
				Pembinaan dan Peningkatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan jasa konstruksi					150 orang		150 orang		150 orang		450 Orang		1,977,752,400
				Konstruksi	Jumlah Rekomendasi dokumen Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan dan terverifikasi					800 Rekomendasi		800 Rekomendasi		800 Rekomendasi		2400 Rekomendasi		
				Bimbingan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)					75 orang		75 orang		75 orang		225 orang		419,161,917
				Sayembara Desain Infrastruktur Kota (Kegiatan Baru)	Jumlah desain infrastruktur kota yang mengikuti sayembara							1 Dokumen		1 Dokumen		2 Dokumen		1,273,601,245
UPTD Bengkulu	Meningkatkan daya dukung Sarana Prasarana Kebinarmargaan	Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana Kebinarmargaan	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kebinarmargaan	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinarmargaan	Cakupan Peralatan Alat-alat Berat dalam kondisi baik	76,92 %	80%	2,521,076,000	80%	8,083,454,000	85%	4,005,695,600	88%	4,696,010,000	90%	5,165,635,000	90%	24,471,870,600
				Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah Alat Berat yang dipelihara		26 Unit	984,970,000	28 Unit	1,083,467,000	41 Unit	2,468,335,000	45 Unit	2,715,160,000	49 Unit	2,986,670,000	189 Unit	10,238,602,000
				Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Bengkel kondisi baik		12 Bulan	566,889,000	12 Bulan	623,578,000								1,190,467,000
					Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Bengkel yang dipelihara					409 Unit		936,868,000	420 Unit	1,030,500,000	433 unit	1,133,550,000	1,262 Unit	3,100,918,000
				Pengelolaan UPTD Perbengkelan Ke PU-an	Jumlah Alat Bengkel yang dikelola		10 Unit	343,017,000	10 Unit	377,319,000	10 Unit	352,017,600	10 Unit	387,200,000	12 Unit	425,920,000	52 Unit	1,885,473,600
				Pemantauan Alat Berat Perbengkelan	Jumlah Alat Berat Perbengkelan yang dipantau		4 Unit	246,575,000	5 Unit	271,233,000	41 Unit	248,475,000	45 Unit	273,300,000	49 Unit	300,650,000	144 Unit	1,340,233,000
				Penyusunan/Perencanaan Program UPTD Perbengkelan	Jumlah Dokumen/Perencanaan Program UPTD Perbengkelan		2 Dokumen	150,000,000	2 Dokumen	165,000,000						4 Dokumen	315,000,000	
				Operasional kegiatan Laboratorium	Terlaksananya kegiatan laboratorium				1 Kegiatan	321,816,000						1 Kegiatan	321,816,000	
				Bimbingan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bengkel (K3)	Terlaksananya Bimbingan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bengkel (K3)		1 Kegiatan	62,824,000	1 Kegiatan	69,106,000						2 Kegiatan	131,930,000	
				Pengelolaan dan Peralatan K3 UPTD Perbengkelan (Kegiatan Baru)	Jumlah Peralatan K3 UPTD Perbengkelan yang dikelola					0		0	85 Orang	289,850,000	90 Orang	318,845,000	175 Orang	608,695,000
UPTD PENERANGAN JALAN	Peningkatan infrastruktur penerangan lampu jalan dengan cara pengadaan lampu jalan di setiap jalan dan lorong untuk mewujudkan Kota Dunia yang nyaman dan aman	Meningkatnya layanan penerangan lampu jalan	Rasio panjang jalan yang diberikan penerangan lampu jalan	Program Pengadaan Lampu Jalan	Cakupan ketersediaan Lampu Jalan	86%	81%	10,455,451,000	85%	8,257,534,000	86%	38,750,000,000	88%	41,450,000,000	88%	44,750,000,000	90%	143,662,985,000
				Pengadaan Lampu Jalan	Jumlah pengadaan lampu jalan		264 titik	3,033,895,000	190 titik	6,405,500,000	200 titik	6,500,000,000	2000 titik	6,700,000,000	2000 Titik	7,000,000,000	4,650 Titik	29,639,395,000
				Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Penerangan pada Lorong-Lorong	Jumlah titik lampu jalan baru pada lorong-lorong yang terpasang		700 Titik	4,000,000,000	800 Titik	5,440,000,000	3,366 Titik	30,000,000,000	3500 titik	32,000,000,000	3500 titik	35,000,000,000	11,866 titik	106,440,000,000
				Updating Data Base Lampu Jalan di Kota Makassar	Jumlah Laporan Updating data base Lampu Jalan yang tersedia		1 Dokumen	215,786,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	5 Dokumen	1,215,786,000
				Pengelolaan perizinan kelenagalistrakan	Jumlah surat izin kelenagalistrakan yang terbit		40 Izin	252,635,000	40 Izin	277,899,000						80 Izin	530,534,000	

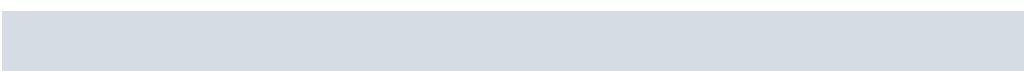
URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD / BIDANG	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM RPJMD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KERANGKA PENDANAAN DAN REALISASI											
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Akhir Tahun RPJMD	
							Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)
				Sosialisasi sistem pelaporan di Kecamatan	Jumlah Sosialisasi sistem pelaporan di Kecamatan		-		3 Kecamatan	100,000,000						3 Kecamatan	100,000,000	
				Penerapan Smart PJU	Jumlah titik yng terpasang Smart PJU		60 titik	500,000,000	80 titik	1,200,000,000	200 titik	2,000,000,000	250 titik	2,500,000,000	250 titik	2,500,000,000	840 titik	8,700,000,000
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan	Presentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik	88.90%	90.10%	71,237,068,000	98%	61,306,376,000	90%	74,737,887,000	90%	78,593,247,150	90%	82,374,576,758	90%	368,249,154,908
				Langganan Penerangan Lampu Jalan	Jumlah KWH Penerangan Jalan Umum (BPJU) yang terbayarkan	1319 KWH	1374 KWH	45,343,957,000	1394 KWH	45,343,957,000	1414 KWH	47,798,542,000	1434 KWH	50,188,469,100	1454 KWH	52,697,892,555		241,372,817,655
				Rehabilitasi Penerangan Lampu Jalan	Jumlah Lampu Jalan Kota yang terpelihara	9004 Titik	1 Paket	7,896,224,000	1 Paket	10,140,000,000	20,000 Titik	11,868,861,000	20,000 Titik	12,462,304,050	20,000 Titik	13,085,419,253		55,452,808,303
				Pengawasan/Pengecekan Meteran langganan Listrik	Jumlah pengecekan meteran langganan listrik	13667 KWH terbaca	16488 KWH terbaca	282,359,000	16728 KWH terbaca	310,595,000	16968 KWH	341,654,000	17208 KWH	375,819,000	17448 KWH	394,609,950		1,705,036,950
				Pendataan dan Pengawasan Penyedia Tenaga Listrik	Jumlah data penyedia Tenaga Listrik	16 Penyedia	100 Penyedia	245,021,000	150 Penyedia	269,523,000	250 Penyedia	244,175,000					500 Penyedia	758,719,000
				Penggantian Lampu Jalan Konvensional dengan LED	Jumlah Penggantian lampu jalan konvensional ke LED yang tersedia		200 titik	12,121,500,000	1000 titik	14,000,000,000	1500 titik	12,000,000,000	1500 titik	12,600,000,000	1500 titik	13,230,000,000	5.700 titik	63,951,500,000
				Penanganan B3 Lampu Mercury	Jumlah Limbah B3 Lampu Mercury yang ditangani	1000 Kg	416,655,000	1000 Kg	416,655,000	1000 Kg	416,655,000	1000 Kg	416,655,000	1000 Kg	416,655,000	5000 Kg	416,655,000	2,083,275,000
				Pembuatan TPS Limbah Mercury lampu jalan	Jumlah TPS Limbah Mercury lampu jalan yang tersedia		1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000							2 Paket	100,000,000
				Sosialisasi Penerangan Jalan dan Taman	Jumlah peserta sosialisasi penerangan jalan dan taman		-		150 Orang	250,000,000	-		150 Orang	250,000,000	150 Orang	250,000,000	450 Orang	750,000,000
				Inspeksi Penerangan Jalan	Jumlah Dokumen Pemantauan Lampu Jalan		4 Dokumen	300,000,000	4 Dokumen	300,000,000	4 Dokumen	150,000,000	4 Dokumen	300,000,000	4 Dokumen	300,000,000	20 Dokumen	1,350,000,000
				Normalisasi Panel dan Jaringan Lampu Jalan	Terlaksananya normalisasi panel dan jaringan PJU		1 Paket	1,000,000,000	1 Paket	1,000,000,000							2 Paket	2,000,000,000
				Normalisasi Panel dan Jaringan Lampu Jalan	Jumlah unit PJU yang dinormalisasi						1300 Unit	1,918,000,000	1300 Unit	2,000,000,000	1300 Unit	2,000,000,000	3900 Unit	5,918,000,000
UPTD PAL	Terwujudnya Infrastruktur sistem air limbah yang berkualitas, dan merata	Meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman	% penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah	Cakupan mutu pelayanan sistem air limbah domestik	21%	60%	3,191,198,000	60%	3,270,542,000	60%	3,042,878,100	60%	5,076,135,613	60%	5,401,005,737	60%	19,981,759,449
				Sosialisasi Pengelolaan Air Limbah On Site Sistem)	Jumlah Kelurahan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	4 Kelurahan	5 Kelurahan	99,985,000	5 Kelurahan	104,984,000							14 Kelurahan	204,969,000
				Sosialisasi Pengelolaan Air Limbah On Site Sistem (IPAL Komunal)	Jumlah Peserta sosialisasi pengelolaan air limbah on site system (IPAL Komunal)						960 orang	233,101,850	1440 Orang	268,067,128	1920 Orang	308,277,197	4320 Orang	809,446,174
				Sosialisasi Pembinaan Penyedotan Tangki Septik Individual	Jumlah Kelurahan yang dilakukan pembinaan		10 Kelurahan	116,058,000	12 Kelurahan	121,861,000							22 Kelurahan	237,919,000
				Sosialisasi Pembinaan Penyedotan Tangki Septik Individual & LLTT	Jumlah Kepala Keluarga (KK) tersosialisasi pembinaan penyedotan tangki septik individual & LLTT						480 KK	406,579,400	560 KK	467,566,310	1040 KK	537,701,257	2080 KK	1,411,846,967
				Pengembangan inovasi hasil olahan lumpur tinja pada SDB (Sludge Drying Beds)	Jumlah lumpur kering yang ada di SDB yang sudah dapat dimanfaatkan		-		2 bak	75,000,000							2 bak	75,000,000
				Peningkatan Capacity Building UPTD PAL	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Capacity Building UPTD PAL		-		1 Kegiatan	50,000,000							1 Kegiatan	50,000,000

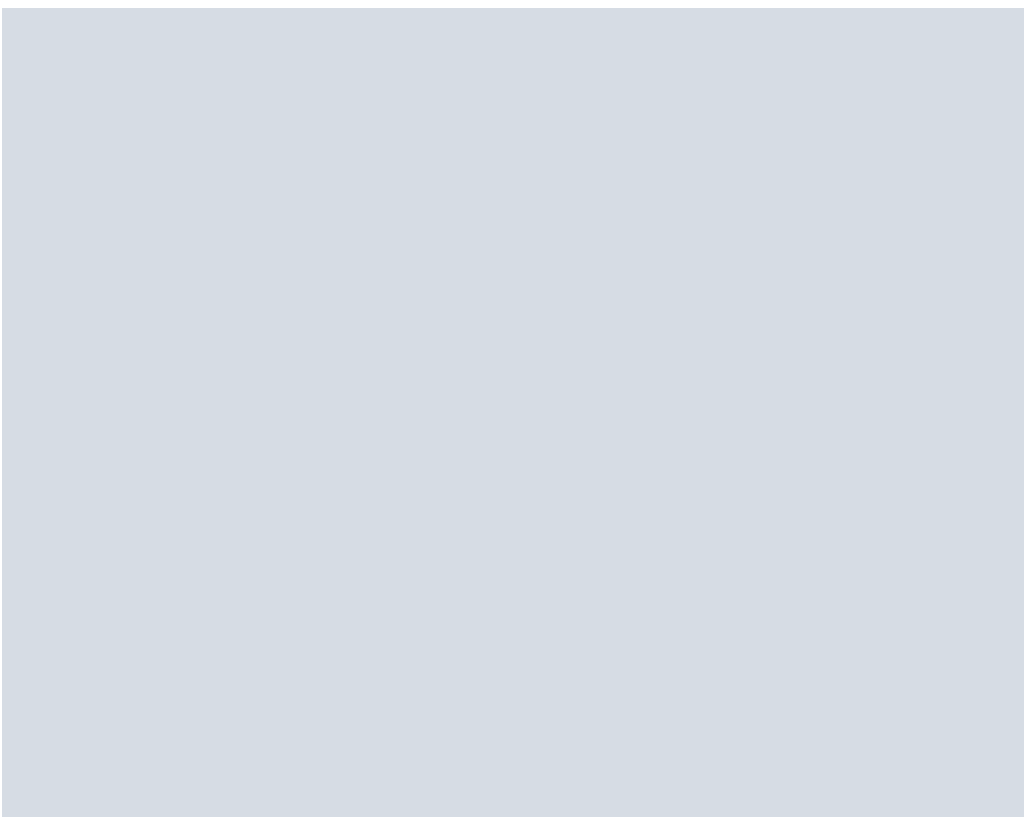
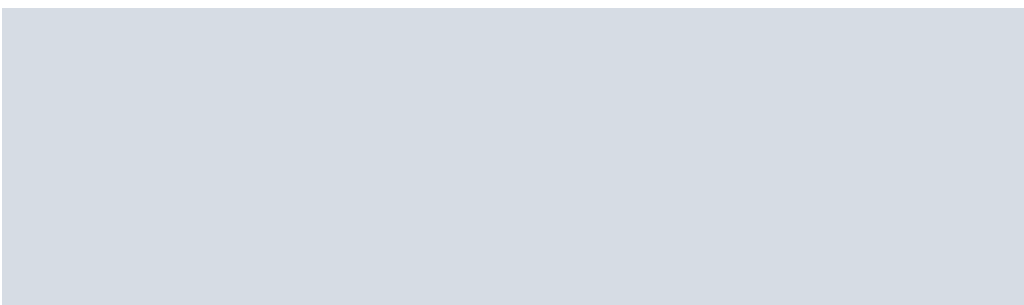
URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD / BIDANG	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM RPJMD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KERANGKA PENDANAAN DAN REALISASI											
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Akhir Tahun RPJMD	
							Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)
				Sosialisasi Penguatan Kelembagaan IPAL Komunal	Jumlah Badan Pengelola IPAL Komunal bermasalah dapat diberdayakan aktif dan mandiri		6 kelembagaan	115.342,000	6 kelembagaan	121.109,000	24 kelembagaan	296.609,000	28 kelembagaan	311.439,450	33 kelembagaan	327.011,423	97 kelembagaan	1.171.510,873
				Penyusunan Data Base Pengelolaan Air Limbah	Jumlah laporan data base Pengelolaan Air Limbah	6 Laporan	12 Laporan	55.084,000	12 Laporan	57.838,000	12 Laporan	97.018,300	12 Laporan	101.869,215	12 Laporan	106.962,676	60 laporan	418.772,191
				Pendataan Sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (P-SLLT)	Jumlah laporan pendataan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)	6 Laporan	12 Laporan	172.258,000	12 Laporan	180.871,000	12 Laporan	246.994,450	12 Laporan	259.344,173	12 laporan	272.311,381	60 laporan	1.131.779,004
				Pemetaan Sensus Wilayah Pelayanan Penyedotan Tinja Individual (Tangki Septik)	Jumlah Kelurahan yang dilakukan sensus.		24 Kelurahan	195.936,000	24 Kelurahan	205.733,000	30 Kelurahan	264.623,350	-	-	-	-	78 Lokasi kelurahan	666.292,350
				Lomba Pengelolaan Air Limbah di Tingkat Masyarakat	Jumlah pemenang lomba pengelolaan air limbah ditingkat masyarakat		3 Pemenang	100.000,000	6 Pemenang	105.000,000	6 Pemenang	263.714,950	6 Pemenang	276.900,698	6 Pemenang	290.745,732	27 Pemenang	1.036.361,380
				Pengembangan Customer Management (Manajemen Pelanggan)	Jumlah peserta yang mengikuti Customer Management (Manajemen Pelanggan)		-	-	50 Orang	75.000,000							50 Orang	75.000,000
				Publikasi UPTD Pengelolaan Air Limbah	Jumlah peserta yang mengikuti Publikasi UPTD Pengelolaan Air Limbah		-	-	20 Orang	35.000,000							20 Orang	35.000,000
				Optimalisasi peningkatan kerja sama pelayanan publik	Jumlah kegiatan Optimalisasi peningkatan kerja sama pelayanan publik		-	-	2 Kegiatan	65.000,000							2 Kegiatan	65.000,000
				Penyusunan/perencanaan program Pengelolaan Air Limbah	Jumlah dokumen usulan program Pengelolaan Air Limbah		3 Dokumen	41.920,000	3 Dokumen	44.016,000							6 Dokumen	85.936,000
				Penyusunan Regulasi Pengelolaan Air Limbah	Jumlah dokumen regulasi jasa penyedot tinja								3 Dokumen	450.000,000	2 Dokumen	400.000,000	5 Dokumen	850.000,000
				Sosialisasi Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik (kegiatan baru)	Jumlah peserta Sosialisasi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Makassar								600 Orang	345.000,000	600 Orang	362.250,000	1200 Orang	707.250,000
				Pelatihan Pengelolaan UPTD PAL	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Pelatihan Pengelolaan UPTD PAL								400 Orang	600.000,000	400 Orang	650.000,000	800 Orang	1.250.000,000
				Penyusunan dan revisi SOP UPTD PAL (Kegiatan Baru)	Jumlah Dokumen SOP yang direvisi								6 Dokumen	200.000,000	6 Dokumen	210.000,000	12 Dokumen	410.000,000
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan IPLT	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan IPLT yang dipelihara		1 Unit	733.688,000	1 Unit	770.327,000							2 Unit	1.504.015,000
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan IPLT	Terpeliharanya sarana dan prasarana IPLT dalam kondisi baik						12 Laporan	791.075,300	12 Laporan	830.629,065	12 Laporan	872.160,518	36 Laporan	2.493.864,883
				Inspeksi Kondisi Sarana Pengelolaan Air Limbah	Jumlah dokumen inspeksi sarana pengelolaan air limbah		1 Dokumen	135.980,000	1 Dokumen	142.779,000							2 Dokumen	278.759,000
				Inspeksi Kondisi Sarana Pengelolaan Air Limbah	Jumlah Lokasi Sarana dan Prasarana yang dilakukan inspeksi pengelolaan air limbah								62 lokasi	250.000,000	131 Lokasi	300.000,000	193 Lokasi	550.000,000
				Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Limbah Domestik IPAL Komunal	Jumlah Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Limbah Domestik IPAL Komunal		10 Paket	200.000,000	10 Paket	210.000,000							20 Paket	410.000,000

URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD / BIDANG	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM RPJMD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KERANGKA PENDANAAN DAN REALISASI											
							Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Akhir Tahun RPJMD	
							Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)	Target	Rp(RPJMD)
				Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Limbah Domestik IPAL Komunal)	Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL Komunal) dalam kondisi baik							65 Lokasi	250,000,000	66 Lokasi	275,000,000	131 Lokasi	525,000,000	
				Pengujian Berkala Effluent IPAL Komunal, IPAL Kawasan dan IPLT (kegiatan baru)	Jumlah titik pengujian hasil effluent secara berkala dan komprehensif	-				40 titik	193,554,500	50 titik	203,232,225	60 titik	213,393,836	150 titik	610,180,561	
				Peningkatan Fasilitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Nipa- nipa	Jumlah Fasilitas Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Nipa-nipa yang ditingkatkan	0 Unit	1 Unit	600,000,000	1 Unit	630,000,000	1 Unit	249,607,000	1 Unit	262,087,350	1 Unit	275,191,718	5 Unit	2,016,886,068
							456,865,351,000		557,151,926,000		573,908,615,860		648,924,613,914		693,854,757,154			

Makassar, 2017
Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Ir. M. ANSAR, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
N i p : 19630517 199203 1 004





15426626200

9218027200

2562566750



22 Feb 2018 rapat asistensi DPA di Bapeda

